



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 84/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **La Ode Muh. Rajiun Tumada, M.Si.**
Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 08, Kelurahan Raha 1,
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi
Tenggara
2. Nama : **Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si.**
Alamat : BTN Laende, Kelurahan Laende, Kecamatan
Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-SLF/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. La Ode Mbunai, S.H., M.H., Aswan Askun, S.H., MH.Li, Sitti Martini, S.H., M.H., Dalili, S.H., M.H., C.Med., C.LDSP., Sarifudin, S.H., La Ode Al Mardan Momo, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., M.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Nopiansyah, S.H., M.H., dan Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada Semesta & Partners Law Firm, beralamat di Ruko Semesta Law Firm, Jalan Moh. Kahfi 1, Nomor 27, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 9, Kelurahan Fookuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/PY.02.1-SU/7403/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Muhamad Rizal Hadju, S.H., Muhammad Takdir Al Mubaraq, S.H., M.H., Muhamad Suhandri, S.H., M.H., Li, La Ode Muhammad Dzul Fijar, S.H., dan LM. Thaufik Rahman, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor advokat/konsultan hukum Baron Harahap & Partners, beralamat di Jalan MT. Haryono, Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari, Nomor 11, Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/PY.02.1-SU/7403/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Robin Abdi Ketaren, S.H. M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Muna Selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Muna, Jalan M. H. Thamrin Nomor 21, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor B-1A/P.3.13/Gp.2/01/2025 bertanggal 10 Januari 2025 meberikan kuasa substitusi kepada Dr. Andi Faik Wana Hamzah, S.H., M.H., Rully Afandi, S.H., M.H., Dr. Sugiarno Migano, S.H., M.H., La Ode Rubiani, S.H., M.H., Ricki Rionart Panggabean, S.H., M.H.Li., Puput Wijaya Putra, S.H., M.H., dan Dhino Ramadhiansyah, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan M. H. Thamrin Nomor 21 Raha, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Drs. H. Bachrun, M.Si.**
Alamat : Jalan Tengiri Nomor 41, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu
 2. Nama : **La Ode Asrafil, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini erdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Januari 2025 memberi kuasa kepada La Ode Muhram, S.H., M.H., Muhammad Saddam Safa, S.H., M.H., dan Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara pada kantor hukum LMN & Partners, beralamat di Jalan Sugi Manuru, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 17:35 WIB, WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 84/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 23.05 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 84/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.30 (WITA);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6

Desember 2024 pukul 17:35 WIB. Sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024. Sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) buruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 ; **(Bukti P – 1)**
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 ; **(Bukti P – 2)**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

Tabel I

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dengan jumlah penduduk ≤ 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 5,29 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna ;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna adalah sebesar 118.086 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 5,29 % x 118.086 suara (total suara sah), atau ada selisih sebanyak 6.253 suara antara Pemohon dengan Pihak yang nyatakan pasangan calon peraih suara terbanyak ;
7. Bahwa ada fakta yang tidak terbantahkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan luar biasa yang sangat mempengaruhi proses pemilihan sehingga terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak dikarenakan antara lain, yaitu :
 - 7.1. Bahwa calon Petahana penyalahgunaan jabatan dengan melakukan mutasi sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada tanggal 6 Juni 2024 terjadi mutasi 31 Pejabat Eselon II, *Kedua* tanggal 12 Juli 2024 terjadi penggantian 21 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemda Muna;

- 7.2. Bahwa Adanya tekanan terhadap masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Wasolangka, Kabupaten Muna yang dilakukan oleh Lurah Wasolangka ;
- 7.3. Bahwa Adanya baliho Drs. H. Bachrun, M.Si selaku Plt. Bupati Muna beserta uraian program kerja, untuk kepentingan pencitraan Petahana pada masa kampanye sampai selesai pelaksanaan Pemilihan baliho tersebut belum diturunkan/ ditertibkan oleh Termohon ;
- 7.4. Bahwa telah terjadi pengerahan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV kepada semua Aparatur Sipil Negara dan honorer untuk memengkan Calon Petahana ;
- 7.5. Adanya sejumlah Camat, Lurah, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas berperan sebagai Donatur/pendana untuk melakukan politik uang/bagi-bagi uang untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Calon Petahanah;
- 7.6. Banyaknya jumlah Anggota Penyelenggara PPS dan Anggota KPPS yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ;
- 7.7. Adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon ;

Sehingga Akibat dari cara-cara tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Muna merupakan Pemilihan yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif ;

8. Bahwa dalam beberapa putusan dalam pemeriksaan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, dalam perkembangannya penerapan ambang batas dimaksud dapat dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang

batas untuk memeriksa suatu permohonan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis ;

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo* ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang diumumkan pada hari Rabu

tanggal 4 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, sebagai berikut :

Tabel II

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|--|-----------------|
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH. | 53.908 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si. | 47.655 |
| 3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 La Ode Kardini, SE., M.Si., dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T.I.P.M | 11.563 |
| 4 | Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Abdul Rahman, SH., MH. dan Awal Jaya Bolombo, SH. | 4.331 |
| 5 | Pasangan Calon Nomor Urut 5 La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M. dan Drs. Syarifuddin, M.M | 629 |
| Total Suara Sah | | 118.086 |

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 47.655 suara ;

2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (**Bukti P – 3**), dan (**Bukti P – 4**) ;

3. Bahwa profil Pasangan Calon nomor urut 1 Bachrun – Asrafil yang ditetapkan sebagai Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, sebagai berikut:
 - 3.1. Bapak Drs. H. Bachrun, M.Si (Calon Bupati) yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugus (Plt) Bupati Muna ;
 - 3.2. Bapak La Ode Asrafil, S.H., M.H., (Calon Wakil Bupati), sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Agraria Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ;
4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon (vide Posita angka 2) di hasilkan dari suatu proses Pemilihan yang bertentangan asas Pemilu yang Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber-Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*/murni, ikhlas tetapi karena antara lain, sebagai berikut :
 - 4.1. Adanya Penyalahgunaan wewenang oleh Calon Petahana dan pemanfaatan program pemerintah, penyalahgunaan penggunaan fasilitas Pemerintah;
 - 4.2. Adanya kecurangan secara signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara Calon Petahana/Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak;
 - 4.3. Bahwa telah terjadi pengerahan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV kepada semua Aparatur Sipil Negara dan honorer untuk memengkan Calon Petahana ;
 - 4.4. Adanya sejumlah Camat, Lurah, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas berperan sebagai Donatur/pendana untuk melakukan politik uang/bagi-bagi uang untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Calon Petahanah;

- 4.5. Banyaknya jumlah Anggota Penyelenggara PPS dan Anggota KPPS yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ;
- 4.6. Adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon ;
5. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan terjadinya selisih 6.253 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak diperoleh karena pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistemik, dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Muna, yang mempengaruhi proses pemilihan. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut :

A. PENYALAGUNAAN JABATAN CALON PATAHANA DAN PEMANFAATAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU);

- 1) Bahwa calon Petahana dalam rangka memuluskan rancana pemenangannya dalam Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna, telah melakukan penyalahgunaan jabatan secara berulang-ulang dalam berbagai kesempatan, seperti melakukan memutasi sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada tanggal 6 Juni 2024 terjadi mutasi 31 Pejabat Eselon II, *Kedua* tanggal 12 Juli 2024 terjadi penggantian 21 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemda Muna. Mutasi tersebut dilakukan tanpa Izin Menteri terkait, yang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon ; **(Bukti P – 5)**
- 2) Bahwa terjadi pemanfaatan penyaluran program pemerintah dimasa/tahap kampanye pada bulan November 2024, dalam bentuk pendistribusian 32.000 (tiga puluh dua ribu) ton bibit jangung untuk 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu :

| No. | Kecamatan | Jumlah Bibi |
|-----|-------------|-------------|
| 1 | TONGKUNO | 2.850 Kg |
| 2 | KABAWO | 2.250 Kg |
| 3 | KONTUKOWUNA | 2.850 Kg |
| 4 | WATOPUTE | 4.500 Kg |
| 5 | KABANGKA | 9.450 Kg |
| 6 | PARIGI | 4.065 Kg |
| 7 | BONE | 1.45 Kg |

Program dimaksud dilakukan secara untuk kepentingan pencitraan Calon Petahana. Hal tersebut sebagai bentuk kecurangan dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya sebagai Plt. Bupati Muna yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Bukti P – 6**) ;

- 3) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, adanya kunjungan kerja oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andap Budhi Revianto di Kabupaten Muna, menyelenggarakan program saluran bantuan Pompanisasi kepada petani dan kegiatan Pasar Murah yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Muna dan Forum Komukasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muna. Kunjungan kerja dimaksud yang dilakukan pada masa Kampanye, Pemohon menilai kunjungan dimaksud adanya muatan politik untuk mengarahkan dukungan politik kepada Calon Petahana ; (**Bukti P – 7**)
- 4) Bahwa calon Petahana menggunakan/memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan kebijakan dan anggaran daerah secara langsung untuk mendukung setiap kampanye Calon Petahana sebagai Calon Bupati yang dilakukan kampanye diluar jadwal dan diwaktu/dalam masa tenang menjelang hari Pemilihan. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosial yang dijadikan sebagai media publisitas untuk kegiatan yang mendukung pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati. Hal tersebut di atas dapat dikonfirmasi dan dirujuk sebagaimana dikutip dari berita berbagai media *online*, yaitu sebagai berikut :

Tabel IV

| No | Keterangan | Sumber Berita |
|----|---|---|
| 1 | Plt. Bupati Muna Bapak Dr. Bachrun, M.Si, melakukan Mutasi pada Bulan Juni 2024, tanpa izin Menteri. Yang dilakukan 3 bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Muna. | https://kolomrakyat.com/plt-bupati-muna-mutasi-31-pejabat-eselon-ii-enam-dinas-berganti-dan-25-kadis-tak-bergeser/ |
| 2 | Plt. Bupati Muna Bapak Dr. Bachrun, M.Si, melakukan Mutasi pada Bulan Juli 2024, tanpa izin Menteri. Yang dilakukan 2 bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Muna. | https://keratonnews.co.id/berita/muna-raya/21-pejabat-administrator-dan-pengawas-dilingkup-pemkab-muna-dimutasi-ini-namanamanya |
| 3 | Pendistribusian 32.000 (tiga puluh dua ribu) ton bibit jangung untuk 7 (tujuh) Kecamatan, se-Kabupaten Muna, yang dilakukan dalam masa Kampanye | https://telisik.id/news/32-ribu-ton-lebih-benih-jagung-kuning-mulai-didistribusikan-di-muna |
| 4 | Kunjungan kerja oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andap Budhi Revianto di Kabupaten Muna, menyalurkan program saluran bantuan Pompanisasi kepada petani dan kegiatan Pasar Murah. Kunjungan kerja dimaksud yang dilakukan pada masa Kampanye. Pemohon menilai sangat tidak etis dan adanya muatan politik untuk | https://www.rri.co.id/daerah/1054062/pj-gubernur-sultra-salurkan-bantuan-dan-tinjau-pasar-murah-di-muna |

| | | |
|---|--|---|
| | mengarahkan dukungan politik kepada Calon Petahana ; | |
| 5 | Calon Petahana melakukan kegiatan Pramuka dari program pemerintah yang memanfaatkan jabatannya. Kegiatan tersebut terjadi pada masa tenang menjelang hari Pemilihan. | https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.publiksatu.co/sultra/1525348678/hari-perdana-bertugas-plt-bupati-muna-langsung-hadiri-undangan-penutupan-giat-pramuka-di-kecamatan-bone&ved=2ahUKEwjhLqDtJaKAXWM9zgGHQgdGD8QFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw0Pyx6O6oB6zIS9UbDZWNbb |

- 5) Bahwa banyaknya pemasangan baliho Drs. H. Bachrun, M.Si selaku Plt. Bupati Muna beserta uraian program kerja, untuk kepentingan pencitraan Petahana pada masa kampanye yang dilakukan oleh Apartur Sipil Negera dan Kepala Desa. Baliho dimaksud sampai selesai hari pelaksanaan pemilihan diselenggarakan tidak diturunkan/ ditertibkan oleh Termohon. **(Bukti P – 8)** ;
- 6) Bahwa Calon Patahana memanfaatkan beberapa fasilitas Pemerintah Kabupaten Muna untuk kempentingan dirinya sebagai Calon Bupati Muna, dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa Calon Petahana menggunakan *Spead Boad* Sangke Palangga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Muna untuk mobilitas penyebrangan untuk melakukan kampanye-kampanye diwilayah Kecamatan Maligano, Kecamatan Pasikolaga, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Batukara dan Kecamatan Wakorumba Selatan; **(Bukti P – 9)**
 - Bahwa Calon Petahana **menggunakan fasilitas Rumah Jabatan** Wakil Bupati sebagai tempat penghitungan *quikc count*/hitung cepat perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang saat

itu dihadiri oleh jajaran Pejabat Eselon termasuk Sekerteris Daerah Kabupaten Muna ; (**Bukti P – 10**)

- 7) Bahwa terjadi pengarahan kepada masyarakat penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Wasolangka sejumlah ± 200 orang dikumpul di Balai Kelurahan, dengan ancaman dan tekanan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Bachrun – Asrafil. Apabila tidak mengikuti arahan maka akan dihapus namanya dalam daftar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). (**Bukti P – 11**) ;
- 8) Bahwa sebagaimana uraian diatas tindakan Calon Petahana telah terbukti menyalahi ketentuan Pasa 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
Ayat (2) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Ayat (3) : Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang diajukan, maka beralasan hukum dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya ;

B. BAHWA TELAH TERJADI PENERAHAN PEJABAT-PEJABAT ESELON II, ESELON III DAN ESELON IV DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN MUNA.

1. Bahwa terjadi pembetulan tim pemenangan Calon Patahana dengan menggerakkan dan mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara mulai

dari Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV (Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah) serta semua tenaga honorer Lingkungan Pemda Muna dan semua Kepala Desa secara berjenjang/tingkatan secara terstruktur, sistematis dan masif, untuk memenangkan dan memilih Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh calon Petahana Drs. H. Bachrun, M.Si selaku Plt Bupati telah kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Muna, dengan uraian sebagai berikut :

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 15 Oktober 2024 dengan Laporan No : 013/LP/PB/KAB/28.09/10/2024. **(Bukti P – 12)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 30 September 2024 dengan Laporan Nomor : 005/LP/PB/KAB/28.09/09/2024. **(Bukti P -12. 1)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 30 September 2024 dengan NomorLaporan : 004/LP/PB/KAB/28.09/09/2024. **(Bukti P – 12. 2)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04 Desember 2024 dengan NomorLaporan : 030/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 3)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 01 Desember 2024 dengan NomorLaporan:020/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 4)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04 Desember 2024 dengan NomorLaporan :028/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 5)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04 Desember 2024 dengan NomorLaporan : 031/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 6)**
- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04 Desember 2024 dengan NomorLaporan : 029/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 7)**

- Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 04 Desember 2024 dengan Nomor Laporan:036/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 8)**
 - Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 01 Desember 2024 dengan Nomor Laporan:023/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 9)**
 - Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 02 Desember 2024 dengan Nomor Laporan :024/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 10)**
 - Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 01 Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 021/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12. 11)**
 - Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Laporan : 008/LP/PB/KAB/28.09/9/2024. **(Bukti P – 12. 12)**
 - Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor Laporan : 012/LP/PB/KAB/28.09/10/2024. **(Bukti P – 12.13)**
 - Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 10 Oktober 2024 dengan Nomor Laporan : 011/LP/PB/KAB/28.09/10/2024. **(Bukti P – 12.14)**
 - Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 30 September 2024 dengan Nomor Laporan : 006/LP/PB/KAB/28.09/9/2024. **(Bukti P – 12.15)**
 - Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna tertanggal 1 Desember 2024 dengan Nomor Laporan : 019/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024. **(Bukti P – 12.16)**
2. Bahwa adanya arahan dan terencana oleh sejumlah Pejabat ASN kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda Muna untuk melakukan urunan/patungan secara bersama-sama mengumpulkan uang dengan tujuan membantu pembiayaan politik Calon Petahana termasuk melakukan pembiayaan (donatur) oleh pejabat-pejabat ASN

untuk melakukan politik uang/*money politik* dengan tujuan memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. **(Bukti P – 13) ;**

3. Bahwa adanya pengarahan oleh Kepala Sekolah Dasar kepada semua Guru-Guru yang terjadi dilingkungan sekolah untuk bersama-sama memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. **(Bukti P – 14) ;**

4. Menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistemik, dan Masif hampir di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Muna, dengan uraian sebagai berikut :

3.1. Temuan kejadian di Kecamatan Tongkuno Selatan : Adanya peristiwa bagi-bagi uang untuk masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada tanggal 24 November 2024 di Desa Labasa. Pembagian uang dimaksud untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1 (Bachrun – Asrafil), atas suruhan Kepala Desa ; **(Bukti P - 15)**

3.2. Temuan kejadian di Kecamatan Tongkuno : Adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada tanggal 25 November 2024 di Desa Lakologou. Pembagian uang dimaksud dilakukan oleh Istri Mantan Kepala Desa Lakologou untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1 ; **(Bukti P - 16)**

3.3. Temuan kejadian di Kecamatan Parigi : Adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) yang bungkus amplop pada tanggal 25 November 2024 di Desa Wakumoro. Pembagian uang dimaksud dilakukan masyarakat atas perintah Camat Parigi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1. Selain itu ada arahan dan tekanan oleh Kepala Puskesmas kepada Honrer Puskesmas untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1 ; **(Bukti P – 17)**

3.4. Temuan kejadian di Kecamatan Kontukowuna, diuraikan :

- Adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop pada tanggal 26 November 2024 di Desa Kontukowuna yang terjadi di rumah Kepala Desa, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1. Selain itu adanya pembagian uang sebanyak 240 Amplop, masing-masing terisi Rp. 200.00,- (dua ratus ribu) per amplop yang dilakukan oleh Perangkat Desa Kontukowuna dibagikan kepada masyarakat atas perintah Kepala Desa, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1. Uang dimaksud bersumber dari Pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna ; **(Bukti P – 18)**
- Bahwa terhadap peristiwa adanya bagi-bagi amplop sebanyak 24 (dua puluh empat) amplop yang berisi uang masing-masing terisi Rp. 200.00,- (dua ratus ribu), telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Muna, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : 026/LP/PB/Kab/28.09/ XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, namun belum mendapat tanggapan/respon ; **(Bukti P – 18. 1)**
- Pada tanggal 26 November 2024 ada pembagian uang sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu) dalam amplop yang dilakukan oleh anggota BPD Desa Kontukowuna dibagikan kepada masyarakat atas perintah Kepala Desa, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1 ; **(Bukti P - 19)**
- Adanya pembagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dalam amplop yang dilakukan oleh KAUR/Perangkat Desa Kontukowuna dibagikan kepada masyarakat atas perintah Kepala Desa, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1, Pada tanggal 26 November 2024 ; **(Bukti P – 20)**
- Pada tanggal 27 November 2024 terjadi pemecatan/pemberhentian, tekanan kepada 4 (empat) orang Perangkat

Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kontukowuna karena tidak mengikuti keinginan/perintah Kepala Desa untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1 ; **(Bukti P – 21), (P – 22), (P – 23), dan (P - 24) ;**

- 3.5. Temuan kejadian di Kecamatan Wakorumba Selatan : Pada tanggal 21 November 2024 terjadi ancaman dan tekanan, kepada masyarakat yang memiliki keluarga/anak sebagai ASN Pemda Muna untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adanya pemaksaan kepada warga untuk menurunkan Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ada di halaman rumah warga, dengan ancaman akan memindah tugaskan keluarga/anak yang seorang Pegawai Negeri Sipil ; **(Bukti P – 25)**
- 3.6. Temuan kejadian di Kecamatan Maligano : Adanya pembagian uang sebanyak Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 November 2024, dimulai pukul 21.30 sampai pukul 04.30 dini hari (dalam satu malam). Pembagian uang kepada masyarakat, yang masing-masing sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu) per amplop yang dilakukan oleh Soerang warga dibagikan kepada masyarakat Desa Pohorua dan Desa Bone-Bone. Uang sebesar Rp. 25.500.000,- tersebut bersumber urunan/patungan secara bersama-sama dari Kepala Desa Pohorua dan Kepala SD Batukara dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1 ; **(Bukti P – 26)**
- 3.7. Temuan kejadian di Kecamatan Napabalano, diuraikan :
- Adanya peristiwa pembagian uang kepada masyarakat mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop pada tanggal 25 November 2024 di Kelurahan Tampo, yang dilakukan oleh Pengurus Partai Nasdem, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1; **(Bukti P - 27)**
 - Adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat Kelurahan Tampo dan Kelurahan Napabalano, yang masing-masing mendapat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam

amplop, uang tersebut bersumber dari Lurah Tampo dan Lurah Napabalano, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1; (**Bukti P – 28**)

- Adanya pembagian uang kepada masyarakat Desa Langkumapo, yang masing-masing mendapat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop. Uang tersebut dibagi-bagikan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Langkumapo, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1; (**Bukti P – 29**)

3.8. Temuan kejadian di Kecamatan Katobu : Adanya pembagian uang kepada masyarakat Katobu, yang mendapat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dan bagi-bagi beras ukuran 5 Kg. kepada warga. Uang dan beras tersebut dibagi-bagikan oleh seorang Camat, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1; (**Bukti P – 30**)

3.9. Temuan kejadian di Kecamatan Kontunaga : Adanya pengalokasian uang kepada team satgas Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk dibagi-bagi kepada masyarakat. Uang tersebut sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta). Uang tersebut bersumber dari seorang Camat, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1; (**Bukti P – 31**)

5. Bahwa sebagaimana uraian diatas tindakan seluruh tindakan semua Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Lingkungan Pemda Muna membentuk tim pemenangan Calon Patahana untuk mengorganisir semua Aparatur Sipil Negara dan semua Honorer secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai Kelurahan dan Desa-Desa untuk mendukung Calon Petahana, telah menyalahi ketentuan **Peraturan Penrundang-Undangan mengenai Nilai Dasar, Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara, yaitu :**

- a. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.**
 - 1) **Pasal 9 ayat (2), Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.**
 - 2) **Pasal 10 huruf c, Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.**
 - 3) **Pasal 24 ayat (1) huruf d, Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas.**
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.**
 - 1) **Pasal 1 angka 2, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;**
 - 2) **Pasal 1 angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik;**
 - 3) **Pasal 6, huruf d, nilai-nilai dasar harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;**
 - 4) **Pasal 6 huruf e, nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang undangan;**
 - 5) **Pasal 6 huruf h, nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi ;**
 - 6) **Pasal 7 menyebutkan Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur didalam Peraturan Pemerintah ini.**

- 7) Pasal 11 huruf c, menyebutkan bahwa Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 1) Pasal 3 huruf e menyebutkan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 2) Pasal 3 huruf f menyebutkan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - 3) Pasal 4 huruf c menyebutkan PNS wajib, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
 - 4) Pasal 5 huruf n angka 6 menyebutkan PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - 5) Pasal 14 huruf i angka 4 menyebutkan bahwa Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada ke berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

- d. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/k.1/09/ 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, Lampiran II huruf B nomor 8, menyebutkan bahwa pelanggaran netralitas ASN berupa mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan Calon Presiden / Wakil Presiden / Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota serta calon Anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang diberikan Hukuman Disiplin Berat. Dan

Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Ayat (1) : Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang diajukan, maka beralasan hukum dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya ;

C. ADANYA KETERLIBATAN TERMOHON DALAM PRAKTEK KECURANGAN PROSES DAN TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.

1) Bahwa keterlibatan dan peran Termohon secara sadar dan terang-terangan dalam mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, diuraikan sebagai berikut :

1.1. Bahwa Termohon mencetak banyak buku visi misi semua Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dibagikan oleh Termohon saat pelaksanaan debat Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 2 November 2024. Dalam buku tersebut pada halaman pertama untuk Visi Misi pasangan Calon Nomor urut 1 terdapat Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Pemohon menilai penggunaan logo Pemerintah Daerah oleh Pasangan Calon nomor urut 1 seharusnya tidak diperbolehkan, Termohon berkewajiban menegur atau menghapus logo tersebut sebagai menjalankan fungsi netralitas penyelenggara. Namun ternyata Termohon membiarkan penggunaan logo Pemerintah Daerah Kabupaten Muna pada visi misi pada Calon Petahana, kemudian tetap mencetak buku tersebut. Atas peristiwa tersebut telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Muna, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : 022/LP/PB/Kab/28.09/ XII/2024, tanggal 1 Desember 2024, namun belum mendapat tanggapan/respon ;
(Bukti P - 32)

1.2. Bahwa dengan sadar dan terencana Termohon mencetak baliho dan kemudian semua anggota PPS dan KPPS memasang baliho tersebut secara serentak diseruh Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Muna pada tanggal 24 November 2024. Dalam uraian/tulisan dalam baliho tersebut **adanya bentuk seruan dan ajakan untuk memilih nomor 1**. Sehingga atas tindakan dan perbuatan Termohon tersebut sangat melanggar Netralitas dan independensnya sebagai Pelaksana Penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna. Tindakan Termohon juga sangat merugikan Pemohon. Atas peristiwa tersebut telah dilaporkan di

Bawaslu Kabupaten Muna, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024, tanggal 30 November 2024, namun belum ada perkembangan hasil pemeriksaan; **(Bukti P - 33)**

- 1.3. Bahwa adanya kesengajaan, penuh kesadaran dan pembiaran oleh Termohon terhadap banyaknya baliho-baliho calon Petahana yang tidak diturunkan/ditertibkan sampai hari selesainya pelaksanaan Pemilihan ;
 - 1.4. Bahwa Termohon melakukan perekrutan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) **banyak dari kalangan Aparatur Sipil Negara dan tenaga Honorer** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. Kendati secara normatif tidak ada yang salah dengan Termohon, namun mengingat Calon Nomor Urut 1 adalah Calon Petahana, untuk menjaga netralitas dan independensi penyelenggaraan Pemilihan, seharusnya Termohon membatasi atau tidak boleh menerima anggota PPS dan anggota KPPS dari kalangan ASN dan Honorer dari Lingkungan Pemda Muna. Menurut Pemohon hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan atau sangat gampang untuk diarahkan Anggota PPS dan KPPS untuk mendukung atau kerjasama untuk memenangkan Calon Petahana ; **(Bukti P - 34)**
 - 1.5. Bahwa atas tindakan Termohon sebagaimana uraian angka 1.2, angka 1.3 dan angka 1.3 diatas, telah ajukan Laporan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana tanda terima dokumen pengaduan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor : 670/02-3/SET-02/XII/2024 . **(Bukti P - 35)**
- 2) Bahwa adanya temuan-temuan kecurangan yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa kecamatan yang mengindikasikan banyak kesalahan karena Pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara

Pemohon. Adapun rincian temuan kecurangan dimaksud, sebagai berikut :

Tabel V

| No | Kecamatan | TPS Kelurahan/ Desa | Formulir Kejadian Khusus |
|----|------------|----------------------------|---|
| 1 | LASALEPA | Desa labone TPS 003 | KPPS membatasi wajib pilih menyalurkan hak pilihnya di TPS 003 Desa Labone atas nama WA ODE NIA umur 41 tahun terdaftar di DPT TPS 003. Karena, KPPS hak pilihnya digunakan oleh WA ODE NIA umur 57 tahun, wajib pilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Desa Labone. |
| 2 | NAPABALANO | Kelurahan Tampo TPS 001 | <p>- Panitia KPPS membiarkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atas nama La Duma nomor DPT 190. Penderita ODGJ ini tidak atau sedang dalam pengampunan Rumah Sakit Jiwa atau Panti Sosial.</p> <p>- Panitia KPPS membiarkan / memberikan kesempatan kepada 2 (dua) orang pemilih yang tercatat di DPT online Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memilih</p> |

| | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| | | | <p>bupati Kabupaten Muna, atas nama JULIANTI, Nomor NIK : 7403064805030001 dan pemilih atas nama Mujahid dengan Nomor NIK: 7471040101890010 terdaftar di DPT ONLine POASIA< Kota Kendari. Kedua pemilih tersebut memilih lewat Jalur DPK.</p> <p>- Terdapat juga Pemilih yang terdaftar di TPS 003 Kelurahan Tampo tetapi memilih di TPS 001, atas nama HASTIERNI dengan Nomor NIK : 7471040101890010</p> |
| | Kelurahan Tampo, TPS 003 | | <p>Panitian KPPS menjoblos kertas suara untuk pemilih atas nama La Fiidi dengan nomor DPT 156 dengan alasan sakit, proses penjoblosan terjadi dirumah La Fiidi sedangkan La Fiidi tidak sakit, sebab pada saat penghitungan suara pemilih atas nama la Fiidi ikut hadir di TPS. (Ada bukti rekaman video);</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Kelurahan Napabalano, TPS 005</p> | <p>Panitia KPPS tidak memberikan hak pilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki Surat Panggilan / C.Pemberitahuan (C6), dikarenakan pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan KTP, namun pemilih tersebut membawa Kartu Keluarga (KK) dan terdaftar sebagai wajib pilih di DPT TPS 005 Kelurahan Napabalano. Nomor DPT 352, atas nama DWI YANI, Nomor NIK : 7403064304070001</p> |
| | <p>Desa Pentiro, TPS 001</p> | <p>Paniti KPPS memberikan hak pilih terhadap lebih dari satu pemilih melalui jalur DPK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemilih yang terdaftar di DPT Online Kabupaten lain Kabupaten Taliabu propinsi Maluku Utara. Atsa nama Siti Rahmawati Ode,dengan Nomor NIK : 8205156308001001 3. Pemilih yang terdaftar di DPT Online Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi tengah. Atas Nama Sahabul Hiji dengan nomor NIK : 7403061305970002 ; |

| | | | |
|---|-------|---------------------------------------|---|
| 3 | LOHIA | Desa Kondongia, TPS 2 TPS 3 | <p>Adanya pemilih ganda atas nama La Ode Ronal, yang juga terdaftar di DPT Desa Lasunapa Kecamatan Duruka, serta di DPT Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano. Melakukan pemilina 2 (dua) kali.</p> <p>Adanya pemilih yang terindikasi pemilih ganda atas nama WA ODE RAHMAT GUSNI, KTP Desa Kondongia namun terdaftar juga di DPT Desa Kombungo;</p> |
| | | Desa Lohia, TPS 01 TPS 02 | <p>Adanya beberapa nama didalam Daftar pemilih Khusus (DPK) A.N La Ode Mila, pemilih yang menggunakan KTP namun tidak ada dalam DPT Kecamatan Lohia. Kemudian pemilih atas nma Wa Uci, KTP Lohia, dikroscek pertama terdaftar di DPT Kelurahan Wasolangka, kroscek berikutnya terdaftar di DPT Khusus.</p> <p>Terdapat data dari C1-Plano, C1-Salinan daftar hadir yang di kroscek dengan melakukan perhitungan surat</p> |

| | | | |
|---|-------|------------------------|--|
| | | | <p>suara sah, suara tidak sah dan surat suara yang digunakan, terjadi perbedaan sehingga di tahapan Pleno ditingkat PPK terjadi penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara TPS 002 Desa Lohia. Setelah dilakukan proses penghitungan suara ulang, terjadi kelebihan suara untuk paslon nomor urut 1 dan paslon lain berkurang satu suara. Pada akhirnya ketua PPK memberikan 2 opsi, kelebihan 2 suara tadi dibagi ke paslon 1 dan paslon 2, namun saksi menolak.</p> |
| 4 | TOWEA | Desa Lakarama, TPS 002 | <p>Pada saat pembacaan C.hasil TPS Desa Lakarama TPS 002 terdapat kekeliruan memasukan sampul, C.hasil Salinan KWK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Yang seharusnya dimasukkan dalam kotak suara pemilihan bupati tetapi dimasukkan dalam kotak suara pemilihan Gubernur.Hal Serupa terjadi juga di TPS 003 Desa Bontu-Bontu.</p> |

| | | | |
|---|-------------|------------------------------|--|
| | | | |
| 5 | BATALAIWORU | Kelurahan Laiworu TPS 006 | Adanya peristiwa yang dilakukan oleh anggota KPPS membuka Kotak Surat Suara Calon Bupati dan menumpahkan isinya dilantai; |
| 6 | TONGKUNO | Desa Oempu, TPS 1 | <p>Terjadi kesalahan dalam penulisan/ pengisian C-Hasil-KWK terkait jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan. Seharusnya surat suara yang tidak terpakai/digunakan sejumlah 237 tetapi ditulis 230 oleh KPPS.</p> <p>Pada saat pengecekan sampul surat suara yang tidak digunakan KPPS tidak menuliskan jumlahnya, sehingga dilakukan proses penghitungan ulang sisa surat suara sisa. Dari penghitungan ulang tersebut ditemukan 40 lembar surat suara yang tidak diberi tanda silang (X) dari total surat suara sisa 237 lembar. Terjadi kesalahan yang disengaja oleh Panitia KPPS, sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor 2 ;</p> |

- 3) Bahwa adanya temuan pada Pleno di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, sebagai bukti tidak profesionalnya Termohon dalam melakukan proses rekapitulasi, sehingga Pemohon menilai adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel VI

| REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN LOHIA |
|--|
| 1. Bahwa penyelenggara Kecamatan Lohia tidak bekerja secara Profesional. |
| 2. Bahwa penyelenggara Kecamatan Lohia mengakui tidak melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait tentang pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP sehingga dilakukan pengecekan DPT yang bersangkutan terdapat DPT diluar Kabupaten Muna. |
| 3. Bahwa daftar hadir dan Surat Suara sah yang digunakan saat terjadi selisih. |
| 4. Bahwa terjadi perbedaan data dari C Plano dan C1 Salinan. |
| 5. Bahwa telah terjadi buka kotak/peti suara dan melakukan penghitungan ulang yang hasilnya merubah jumlah suara Pasangan calon dan mengarah kepasangan calon lain. |
| 6. Bahwa pimpinan pleno Kecamatan Lohia menawarkan 2 opsi untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas untuk membagi suara tersebut kepada Pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2. |
| 7. Bahwa pembagian suara yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; |
| |
| REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN BONE |
| - Pembacaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna untuk Kecamatan Bone dipending pada Jam 17.03 Wita, hal tersebut karena ada permintaan |

penjelasan dari Bawaslu Muna yang tidak dapat dijelaskan oleh PPK Kec. Bone terkait tidak adanya catatan kejadian khusus dan TPS 01 Desa Bone Kainsitala, berkaitan dengan 1 (satu) orang pemilih yang memilih/mencoblos pada 2 lembar Suara Bupati dan Wakil Bupati. Kejadian tersebut tidak dituangkan dalam kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Bone.

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN NAPABALANO

1. Kami menolak hasil pleno Kabupaten untuk Kecamatan Napabalano dikarenakan keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 2 di TPS 1 di Kelurahan Tampo tidak bisa diselesaikan ditingkat pleno Kabupaten, disebabkan ada pemilih yang bernama La Dums nomor DPT 190 pemilih tersebut sakit jiwa (gila) dan dirawat di rumah sakit jiwa namun melarikan diri.
2. Ada pemilih Nomor DPT 156 atas nama La Fiidi pemilih tersebut beralasan sakit sehingga oleh petugas KPPS berkunjung kerumahnya tetapi setelah perhitungan Suara di TPSnya La Fiidi hadir menyaksikan jalanya perhitungan suara.

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN KATOBU

1. Bahwa PPK Kecamatan Katobu tidak mencantumkan waktu pada saat kunjungan kerumah-rumah pemilih yang berhalangan hadir, dimana hal tersebut dimuat dalam kejadian khusus.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, penyelenggara kami anggap lalai, sehingga kami patut curigai bahwa bisa saja kunjungan tersebut dilakukan pada waktu atau jam yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN TONGKUNO

1. Terjadi kesalahan penulisan dalam Form D hasil. KWK Kecamatan Tongkuno pada data DPTB, karena tertulis jumlah laki-laki (L) : 6 dan Perempuan (P) : 8 dan dilakukan perbaikan atau koreksi pada Form D hasil KWK menjadi Laki-laki (L) : 3 dan Perempuan (6) dengan total L+P = 9 ;

2. Terjadi kesalahan penulisan dalam Form D hasil Kecamatan – KWK Kecamatan Tongkuno pada data DPK dimana tertulis jumlah laki-laki (L) 46 dan perempuan (P): 62 dengan total L+P = 108 dan dilakukan perbaikan atau koreksi pada Form D hasil Kabupaten KWK menjadi seharusnya jumlah data DPK Laki-laki (L) : 49 dan Perempuan (P) : 64 dengan total L+P =113 ;

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN WATOPUTE

Terdapat perbedaan data pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) yang tertulis dalam Form D Hasil Kecamatan Watopute dengan yang ditetapkan KPU Muna dimana DPT yang bertulis dalam Form D hasil Kecamatan Watopute yaitu Laki-laki (4.585) dan Perempuan 4.965 dengan total L+P = 9.550. Terhadap hal ini dilakukan pembetulan atau koreksi pada Form D Hasil Kabupaten - KWK menjadi data yang benar yaitu jumlah DPT menjadi Laki-laki (L): 4578 dan Perempuan (P) : 4972 dengan total DPT L+P = 9550 sesuai DPT yang ditetapkan KPUD Kabupaten Muna.

REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN KABANGKA

Terdapat perbedaan data pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) yang tertulis dalam Form D Hasil kecamatan Kabangka dengan yang ditetapkan KPUD Muna dimana DPT yang bertulis dalam Form D hasil Kecamatan Watopute yaitu Laki-laki (L) : 3590 dan Perempuan (P) : 3741 dengan total DPT L+P = 7331, Terhadap hal ini dilakukan pembetulan atau koreksi pada Form D Hasil kabupaten -KWK menjadi data yang benar yaitu jumlah DPT menjadi Laki-laki (L): 3586 dan Perempuan (P) : 3745 dengan Total DPT L+P = 7331 sesuai DPT yang ditetapkan KPUD Kabupaten Muna.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, akibat dari cara-cara yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Muna, merupakan Pemilihan yang banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Penyelenggaraan Pemilihan yang penuh dengan kecurangan dan tidak berdasarkan hukum dan/atau setidak-tidaknya

dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran proses pemilihan sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon ;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta uraian di atas maka telah terjadi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bachrun-Asrafil secara sengaja, terencana, Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan hasil/suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kirannya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Khusus Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. H.Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH. ;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, khusus Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. H.Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH. ;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH., sebagai Pihak yang ditetapkan

sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna ;

6. Menetapkan agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang hanya diikutsertakan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu

| No. | Nama Pasangan Calon |
|-----|--|
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si. |
| 2 | Pasangan Calon Nomor Urut 3 La Ode Kardini, SE., M.Si., dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T.I.P.M |
| 3 | Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Abdul Rahman, SH., MH. dan Awal Jaya Bolombo, SH. |
| 4 | Pasangan Calon Nomor Urut 5 La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M. dan Drs. Syarifuddin, M.M |

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-153, sebagai berikut.

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024. Tanggal 23 September 2024;

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi berita berjudul “Plt Bupati Muna Mutasi 31 Pejabat Eselon II, Enam Dinas Berganti dan 25 Kadis Tak Bergeser”, sumber: kolomrakyat.com, tanggal 6 Juni 2024 dan berita berjudul “21 Pejabat Administrator dan Pengawas Di Lingkup Pemkab Muna Dimutasi, Ini Nama-Namanya”, sumber: keratonnews.co.id, tanggal 12 Juli 2024;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi berita berjudul “32 Ribu Ton Lebih Benih Jagung Kuning Mulai Didistribusikan di Muna”, sumber: telisik.id, tanggal 17 November 2024;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi berita berjudul “PJ Gubernur Salurkan Bantuan dan Pantau Pasar Murah di Muna”, sumber: sultranet.com, tanggal 17 Oktober 2024;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan ke Bawaslu No : 017/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024 mengenai pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024 berupa Baliho yang tidak diturunkan oleh KPUD Kabupaten Muna pada saat penertiban baliho calon di minggu tenang;
9. Bukti P – 9 : Video Calon Bupati Nomor Urut 1 menggunakan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Muna yaitu Speed Boat “ Sangke Palangga”;

10. Bukti P – 10 : Video Calon Bupati Nomor Urut 1 menggunakan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Muna yaitu Rumah Jabatan Wakil Bupati Muna;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Bukti Pengarahan penerima Bantuan PKH Kelurahan Wasolangka, sejumlah 200 orang di Balai Kelurahan untuk memilih pasangan nomor urut 1;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 013/LP/PB/Kab/28.09/10/2024, Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna 2024 terkait Netralitas ASN;
13. Bukti P – 12.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 005/LP/PB/Kab/28.09/09/2024, Dugaan Pelanggaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dalam menghadiri kegiatan Hari Ulang Tahun RI Ke-79 Kabupaten Muna;
14. Bukti P – 12.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 004/LP/PB/Kab/28.09/09/2024, Adanya Dugaan Kepala Desa Liangkabori an. Farlin, SH menghadiri Sosialisasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna;
15. Bukti P – 12.3 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 030/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, Adanya Dugaan Pelanggaran Pilkada, Kepala Puskesmas Batukara menghadiri Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
16. Bukti P – 12.4 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 020/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, adanya Dugaan Pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Muna an. Edy Uga, SH.,M.Si menghandiri perhitungan suara secara di Rumah Jabatan atau Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
17. Bukti P – 12.5 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 028/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, adanya dugaan pelanggaran Pilkada, ASN Setda Muna an. La Ode

Tasman, A.Md sedang mengumpulkan dan mengarahkan masyarakat Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna untuk menghadiri Kampanye Akbar Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1;

18. Bukti P – 12.6 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 031/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 adanya dugaan pelanggaran pemilih pilkada sejumlah ASN dan aparat pemerintah kelurahan Wali kecamatan Watopute, serta anggota KPPS, ikut dalam kegiatan Konsolidasi Pasangan calon bupati dan wakil bupati muna nomor Urut 1;
19. Bukti P – 12.7 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 029/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 adanya dugaan pelanggaran Pilkada ASN kantor camay Duruka Kabupaten Muna atas nama La Ode Mania sedang menghadiri kampanye pasangan Calon Bupati Muna Nomor Urut 1;
20. Bukti P – 12.8 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 036/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 adanya dugaan pelanggaran Pilkada,Memimpin Upacara Hari Guru pada tanggal 25 November 2024 dilakukan oleh calon Bupati Muna Nomor Urut 1;
21. Bukti P – 12.9 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 023/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 adanya dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kab. Muna atas nama Amiruddin sedang makan malam bersama Calon Bupati Muna atas nama Bachrun;
22. Bukti P – 12.10 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 024/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 adanya dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh kabid SD atas nama Kubais dalam Percakapan WhatsApp menyampaikan tentang kemenangan calon Bupati Muna Nomor Urut 1;

23. Bukti P – 12.11 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 adanya dugaan pelanggaran Pelanggaran Pilkada oleh Calon Bupati Muna nomor urut 1 a.n Bachrun menghadiri kegiatan Pramuka yang diselenggarakan oleh kwartir ranting kecamatan Parigi dan Bone pada minggu tenang masa kampanye;
24. Bukti P – 12.12 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 008/LP/PB/Kab/28.09/09/2024 adanya dugaan pelanggaran Pilkada oleh Kepala dusun II desa mabodo an La Ode Kadinba sedang mengikuti iring-iringan kampanye bersama calon bupati Muna Nomor urut 1;
25. Bukti P – 12.13 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 012/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 adanya dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Sekdes desa Wawesa a.n L.M. Munagul, A.Md.Kep sedang menghadiri kegiatan kampanye Pasangan Calon bupati Muna nomor urut 1;
26. Bukti P – 12.14 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 adanya dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 3 batalaiworu, a.n Wa Lindo, S.Pd, SD. Bersama sekdes Wawesa menghadiri kampanye pasangan calon bupati nomor urut 1;
27. Bukti P – 12.15 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 006/LP/PB/Kab/28.09/09/2024 adanya dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh P3K atas nama rahma, S.Pd mengajak masyarakat desa bone kecamatan Bone kabupaten Muna untuk memilih pasangan calon Bupati Nomor urut 1;
28. Bukti P – 12.16 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Bawaslu Nomor: 019/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 adanya dugaan pelanggaran pilkada bahwa adanya whatsApp Group Bernama “ GROUP BAHTERA”/ Tim Kemenangan Paslon

nomor urut 1 yang didalamnya terdapat banyak anggota Group tersebut adalah ASN;

29. Bukti P – 13 : Rekaman suara di kantor Bupati Muna, pembentukan tim paslon Bupati nomor urut 1, oleh Pejabat Pemda Muna;
30. Bukti P – 14 : Rekaman suara kepala sekolah SDN Nomor 5 kabangka, mengarahkan guru-guru untuk memilih Calon Petahana;
31. Bukti P – 15 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Darul Feeli, warga Desa Labasa, Tongkuno Selatan;
32. Bukti P – 16 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Laode Ngkodi, warga Desa Lakologou;
33. Bukti P – 17 : Fotokopi surat pernyataan atas nama La Ali, warga Desa Wakumoro;
34. Bukti P – 18 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Dani Arsat, warga Desa Kontukowuna;
35. Bukti P – 18.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 026/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna 2024 terkait politik Uang sejumlah Rp. 200.000,-;
36. Bukti P – 19 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Wa Imola Binti La Barilangga, warga Desa Kontukowuna;
37. Bukti P – 20 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Darwia Binti La Engku, warga desa Kontukowuna;
38. Bukti P – 21 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Herdianto Bin Jufri Misi Rahim, warga Desa Kontukowuna;
39. Bukti P – 22 : Fotokopi surat pernyataan atas nama La Sali Bin La Feangi, warga Desa Kontukowuna;
40. Bukti P – 23 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Halmina Binti La Saahu, warga Desa Kontukowuna;
41. Bukti P – 24 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Anamaria, S. Pd. I Binti La Engku, warga Desa Kontukowuna;
42. Bukti P – 25 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Imran, warga Kelurahan Labunia;

43. Bukti P – 26 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Sadir Bin Sainong, warga Desa Pohorua;
44. Bukti P – 27 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Nurfaida Binti La Siala, warga Kelurahan Tampo;
45. Bukti P – 28 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Roslan, warga Kelurahan Tampo;
46. Bukti P – 29 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Abdul Ashadin, warga Desa Langkumapo;
47. Bukti P – 30 : Video Camat Katobu Kabupaten Muna (Bagi-bagi Uang dan Beras);
48. Bukti P – 31 : Video Percakapan Camat Kontunaga mendanai uang untuk di bagikan nkepada masyarakat desa sekecamatan Kontunaga;
49. Bukti P – 32 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024;
50. Bukti P – 33 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024;
51. Bukti P – 34 : Video Ketua KPUD Kab. Muna;
52. Bukti P – 35 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Nomor 670/02-3/SET-02/XII/2024;
53. Bukti P – 36 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lasalepa;
54. Bukti P – 37 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon Saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Napabalano, Dan Keberatan Saksi Saat Rekapitulasi KPU Kabupaten Muna;
55. Bukti P – 38 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon Pada Saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lohia Dan Keberatan Saksi Saat Rekapitulasi Kpu Kabupaten Muna;

56. Bukti P – 39 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon Pada Saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Towea;
57. Bukti P – 40 : Fotokopi Catatan Keberatan Saksi Pemohon Pada Saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Batalaiworu;
58. Bukti P – 41 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tongkuno, yaitu Kejadian pada TPS 01 Desa Oempu;
59. Bukti P – 42 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Katobu;
60. Bukti P – 43 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kontukowuna;
61. Bukti P – 44 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pasir Putih;
62. Bukti P – 45 : Fotokopi Keberatan Saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bone;
63. Bukti P – 46 : Fotokopi Keputusan Bupati Muna Nomor 242 Tahun 2024 tentang Pengukuhan, Pelantikan, Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 6 Juni 2024 dan Keputusan Bupati Muna Nomor 345 Tahun 2024 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 12 Juli 2024;

64. Bukti P – 47 : Dokumentasi/foto Penyaluran Pupuk dan Bibit Jagung Program Pemerintah Kementerian Pertanian lewat Dinas Pertanian Kabupaten Muna di 6 (enam) Kecamatan kepada Kelompok Petani (Poktan);
65. Bukti P – 48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Misnadi, warga Desa Sarimulyo, Kecamatan Kabangka, Kab. Muna;
66. Bukti P – 49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harianto, warga Desa Sarimulyo, Kecamatan Kabangka, Kab. Muna;
67. Bukti P – 50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muchtar, warga Desa Wale-Ale, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kab. Muna;
68. Bukti P – 51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Rufu, warga Kelurahan Danago, Kecamatan Tongkuno, Kab. Muna;
69. Bukti P – 52 : Fotokopi Surat Pernyataan La Jalili, Warga Kelurahan Wasolangka, Kecamatan Parigi, Kab. Muna;
70. Bukti P – 53 : Fotokopi Surat Pernyataan La Ode Kalaludin, Kelurahan Wasolangka, Kecamatan Parigi, Kab. Muna;
71. Bukti P – 54 : Fotokopi Formulir Model A.17 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 7 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 006/LP/PB/Kab/28.09/09/2024, tanggal 30 September 2024;
72. Bukti P – 55 : Fotokopi Formulir Model A.17 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 24 Oktober 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 013/LP/PB/Kab/28.09/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024;
73. Bukti P – 56 : Fotokopi Formulir Model A.17 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 4 Oktober 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu

Nomor: 005/LP/PB/Kab/28.09/09/2024, tanggal 30 September 2024;

74. Bukti P – 57 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 4 Oktober 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor : 004/LP/PB/Kab/28.09/09/2024, tanggal 30 September 2024;
75. Bukti P – 58 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 030/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 4 September 2024;
76. Bukti P – 59 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 020/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024;
77. Bukti P – 60 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 028/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024;
78. Bukti P – 61 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu

- Nomor: 031/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024;
79. Bukti P – 62 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 029/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024;
80. Bukti P – 63 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 8 Desember 2024. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 036/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024;
81. Bukti P – 64 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 023/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024;
82. Bukti P – 65 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 024/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024;
83. Bukti P – 66 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024;
84. Bukti P – 67 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 9 Oktober 2024. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 008/LP/PB/Kab/28.09/09/2024, tanggal 7 Oktober 2024;

85. Bukti P – 68 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 14 Oktober 2024. Laporan diteruskan ke Pjs. Bupati Muna. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 012/LP/PB/Kab/28.09/10/2024, tanggal 10 Oktober 2024;
86. Bukti P – 69 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 12 Oktober 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024, tanggal 10 Oktober 2024;
87. Bukti P – 70 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 7 Oktober 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 006/LP/PB/Kab/28.09/09/2024, tanggal 30 September 2024;
88. Bukti P – 71 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 8 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 019/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024;
89. Bukti P – 72 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Sentra GAKKUMDU. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 026/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 30 September 2024;
90. Bukti P – 73 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 7 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

- (DKPP). Berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor : 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024;
91. Bukti P – 74 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 7 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor : 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024;
92. Bukti P – 75 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 6 Desember 2024. Laporan diteruskan ke Badan Kepegawian Negara (BKN) Republik Indonesia. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 030/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024;
93. Bukti P – 76 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 14 Oktober 2024. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 010/LP/PB/Kab/28.09/10/2024, tanggal 10 Oktober 2024;
94. Bukti P – 77 : Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 8 Desember 2024. Berdasarkan Farmulir A.3 Laporan Bawaslu Nomor: 025/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024;
95. Bukti P – 78 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Tamulu, masyarakat Desa Kondongia, Kecamatan Lohia;
96. Bukti P – 79 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nisniti, S.Pd., Warga Desa Korihi, Kecamatan Lohia;
97. Bukti P – 80 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arwin, masyarakat Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu;
98. Bukti P – 81 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wa Sutia, masyarakat Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu;
99. Bukti P – 82 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arwin La Ode Mbega, Warga Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu;

100. Bukti P – 83 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Retno, ST Binti Asnawi, warga Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu;
101. Bukti P – 84 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wa Ode Siti Muliati, warga Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu;
102. Bukti P – 85 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Difan, masyarakat Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka;
103. Bukti P – 86 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Apriyani Binti La Ode Ntao, warga Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka;
104. Bukti P – 87 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Rasimu, warga Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka;
105. Bukti P – 88 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ansar Bin Rasuking, warga Desa Lagasa, Kecamatan Duruka;
106. Bukti P – 89 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lisa Binti La Gani, warga Desa Lagasa, Kecamatan Duruka;
107. Bukti P – 90 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Hamdin Bin La Ode Sababu, warga Desa Banggai, Kecamatan Duruka;
108. Bukti P – 91 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurkisa Binti Abdul Kadir, warga Desa Lagasa, Kecamatan Duruka;
109. Bukti P – 92 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rismayanti Binti Ujing, Warga Desa Ghonebalano, Kecamatan Duruka;
110. Bukti P – 93 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahlyl, A.Ma.Pd.Or, masyarakat Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute;
111. Bukti P – 94 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wa Nana Binti La Aju, masyarakat Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute;
112. Bukti P – 95 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Kasmita, Amd.Tek., Warga Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute;
113. Bukti P – 96 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sriyani Binti Laode Bali, Warga Desa Labaha, Kecamatan Watopute;
114. Bukti P – 97 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sitti Taisa, A.Ma Binti La Rugi, warga Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute;
115. Bukti P – 98 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Agi, warga Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute;

116. Bukti P – 99 : Fotokopi Surat Pernyataan aan atas nama Heni, warga Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa;
117. Bukti P – 100 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ratna Wati Binti La Bai, warga Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa;
118. Bukti P – 101 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Salemuddin, warga Desa Kasaka, Kecamatan Kabawo;
119. Bukti P – 102 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni, warga Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo;
120. Bukti P – 103 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Galudin, A.Ma.PD, warga Desa Rangka, Kecamatan Kabawo;
121. Bukti P – 104 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Udi, warga Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo;
122. Bukti P – 105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arna Wira Wati, Warga Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo;
123. Bukti P – 106 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Mbohu, Warga Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo;
124. Bukti P – 107 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusiono Bin Supardi, warga Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka;
125. Bukti P – 108 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rohen, Warga Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka;
126. Bukti P – 109 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Puryadi, SE., Bin Minto Rejo, Warga Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka;
127. Bukti P – 110 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhayati Binti Daud, warga Desa Sarimulyo, Kecamatan Kabangka;
128. Bukti P – 111 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sartika, S.Pd Binti La Ngkusa, Warga Desa Wataliku, Kecamatan Kabangka;
129. Bukti P – 112 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Saibi, warga Desa Wataliku, Kecamatan Kabangka;
130. Bukti P – 113 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Binti Sarwi, warga Desa Bahutara, Kecamatan Kontukowuna;
131. Bukti P – 114 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fina Binti Agustinus, Warga Desa Bahutara, Kecamatan Kontukowuna;

132. Bukti P – 115 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Mbeko, Warga Desa Kafofo, Kecamatan Kabangka;
133. Bukti P – 116 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Kunuman, Warga Desa Kafofo, Kecamatan Kontukowuna;
134. Bukti P – 117 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ernawati, warga Desa Lembo, Kecamatan Kontukowuna;
135. Bukti P – 118 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Abdul Gamal, warga Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga;
136. Bukti P – 119 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zaifuddin;
137. Bukti P – 120 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Imran, warga Desa Tapi-Tapi, Kecamatan Marobo;
138. Bukti P – 121 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamid, warga Desa Wadolao, Kecamatan Marobo;
139. Bukti P – 122 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurmin M. Binti La Maeha, warga Desa Pure, Kecamatan Wakorumba Selatan;
140. Bukti P – 123 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yana Sabina Binti Kampo Beda, warga Desa Latompa, Kecamatan Maligano;
141. Bukti P – 124 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Takdir Bin La Ngkolu, warga Desa Lanobake, Kecamatan Batukara;
142. Bukti P – 125 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainal Bin Tajudi, Waega Desa Moolo, Kecamatan Batukara;
143. Bukti P – 126 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wa Impi Binti La Bali, warga Desa Moolo, Kecamatan Batukara;
144. Bukti P – 127 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sidin, warga Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi;
145. Bukti P – 128 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhamad Kasim, warga Desa Latampu, Kecamatan Parigi;
146. Bukti P – 129 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wa Ode Niati Binti La Ode Hasai, warga Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu;
147. Bukti P – 130 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alwan, S.Sos, warga Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu;

148. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. La Piata, warga Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu;
149. Bukti P – 132 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamin Gari, Warga Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu;
150. Bukti P – 133 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasyuni, S.Pi., Warga Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu;
151. Bukti P – 134 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usman, Warga Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu;
152. Bukti P – 135 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salmaria Binti La Tanga, Warga Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu;
153. Bukti P – 136 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sri Muhar Sary, S.Sos Binti La Bolo Warga Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu;
154. Bukti P – 137 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Ferasa, warga Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu;
155. Bukti P – 138 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Paeli, Warga Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano;
156. Bukti P – 139 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bustamin, Warga Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano;
157. Bukti P – 140 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wa Ode Hariati, warga Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano;
158. Bukti P – 141 : Video keterlibatan Aparatus Sipil Negara (ASN), Bapak Sumardi (Jabatan Kepala Bidang Perencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Muna), memasang Baliho Calon Petahana (Bachrun);
159. Bukti P – 142 : Video keterlibatan Aparatus Sipil Negara (ASN), Bapak Akira, S.Pi (Jabatan Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Muna), menyumbang beberapa unit kipas angin di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Bachrun – Asrafil);
160. Bukti P – 143 : Video keterlibatan Pejabat Aparatus Sipil Negara (ASN) Rapat/ Pertemuan di Posko Pemenang;

161. Bukti P – 144 : Video Rapat/Pertemuan di Rumah Jabatan oleh Calon Petahana, dihadiri Tim Sukses dan beberapa Pejabat Aparatus Sipil Negara (ASN);
162. Bukti P – 145 : Video Makan Malam bersama beberapa pejabat Aparatus Sipil Negara (ASN) dengan Calon Petahana (Bachrun) dalam acara Sosialisasi/Kampanye;
163. Bukti P – 146 : Video persiapan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 untuk membagikan uang (money politik) berdasarkan data/nama-nama yang sudah tersedia;
164. Bukti P – 147 : Video Panitia KPPS pada TPS 6 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, melakukan pembukaan kotak suara dengan inisiatif sendiri atau cara tidak sah;
165. Bukti P – 148 : Video adanya Baliho diterbitkan oleh KPU Muna yang dipasang oleh Panitia PPS dan Panitia KPPS diseluruh Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Muna, dengan tulisan ajakan/himbauan untuk memilih nomor 1;
166. Bukti P – 149 : Video Pemanfaatan Rumah Jabatan Wakil Bupati Muna oleh Calon Petahana (Bachrun) untuk kepentingan sebagai Calon Bupati dalam penghitungan *quick count*/hitung cepat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kab. Muna dan sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
167. Bukti P – 150 : Video Pengakuan (menggunakan bahasa Daerah Muna) Masyarakat Kecamatan Watopute tentang banyaknya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 1 (Bachrun-Asrafil);
168. Bukti P – 151 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama BAHTIAR. S.Si, (mantan Kasat Pol.PP Pemerintah Kabupaten Muna) Warga Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
169. Bukti P – 152 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. La Ijazah (mantan Kepala Bagian Umum Setda Kab. Muna)

170. Bukti P – 153 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wa Kapo, warga Desa wakomoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar kewenangan Mahkamah berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 10/2016) yang berbunyi:

Perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- 2) Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” yang terdapat di dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022), bertanggal 29 September 2022. Sehingga mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dulunya bersifat sementara dalam hal mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil pemilihan, kini menjadi permanen karena Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan dalam norma Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tidak akan lagi dibentuk. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Putusan MK 85/2022 paragraf 3.22, halaman 42 sebagai berikut:

*Inkonstitusional Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, **kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.***

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya **harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.***

- 3) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 154 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa:

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

- 4) Bahwa selanjutnya mengenai objek perselisihan telah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) sebagai berikut:

Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

- 5) Bahwa untuk menguji apakah perkara *a quo* adalah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan sehingga merupakan ranah wewenang Mahkamah untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang dipertegas dengan Putusan MK 85/2022 *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024 setidaknya mesti diukur pada 3 (tiga) hal pokok, yakni:
 - a. Apakah *objectum litis* permohonan adalah mengenai keputusan perolehan penghitungan hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024?
 - b. Apakah *legal issue* yang dimohonkan PEMOHON pokoknya sekaitan dengan perbedaan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara tahap akhir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024?
 - c. Apakah kewenangan mengadili Mahkamah harus dilepaskan dari norma Pasal 158 UU 10/2016 perihal ambang batas?
- 6) Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut di atas, dalam perkara *a quo* yang menjadi *objectum litis* sebagaimana permohonan PEMOHON adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**vide: Bukti T-1**);
- 7) Bahwa sekalipun yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo* adalah Keputusan TERMOHON mengenai Penetapan Hasil Pemilihan, akan tetapi mencermati dalil yang diuraikan oleh PEMOHON dalam permohonannya hanya menguraikan, yaitu: *PERTAMA*, mengenai

penggunaan program pemerintah dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Calon Petahana. *KEDUA*, netralitas ASN. *KETIGA*, *money politics* dan *KEEMPAT*, dugaan pelanggaran penyelenggara pemilihan *in casu* TERMOHON berkaitan dengan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara.

- 8) Bahwa mengenai keempat substansi permohonan PEMOHON *a quo*, apabila dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana yang telah diberikan oleh UU 10/2016, maka seharusnya Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebab penyelesaian masalah dari keempat hal yang dipersoalkan dalam permohonan PEMOHON *a quo* adalah menjadi kewenangan lembaga lain, yaitu:

PERTAMA, mengenai dalil PEMOHON tentang penggunaan program pemerintah dan mutasi ASN oleh Pasangan Calon (Paslon) No. 1 selaku Calon Petahana merupakan ranah administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan otoritatif Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mekanisme pengeluaran rekomendasi yang berujung pada pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Pasal 138 UU 8/2015 *jo* Pasal 139 UU 1/2015 *jo* Pasal 34 Perbawaslu 9/2024 *jo* Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.

KEDUA, mengenai dalil PEMOHON tentang netralitas ASN sepenuhnya merupakan ranah tindak pidana pemilihan berdasarkan Pasal 188 UU 1/2015 *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016, olehnya itu menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016.

KETIGA, mengenai dalil PEMOHON tentang *money politics* merupakan rumpun hukum pidana yang dikualifisir sebagai bagian tindak pidana pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016, olehnya itu sepenuhnya menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016.

KEEMPAT, mengenai dalil PEMOHON tentang pelanggaran penyelenggara pemilihan *in casu* TERMOHON mengenai pelanggaran atas kegiatan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara yang penyelesaiannya melalui Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau melalui DKPP RI sebagaimana ketentuan Pasal 139 UU 1/2015 *Juncto* Pasal 137 ayat (1) UU 1/2015;

- 9) Bahwa mengenai pembagian wewenang yang mesti diadili oleh Mahkamah pun telah dipertegas oleh Mahkamah sendiri di dalam putusan-putusannya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan:

*Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang **kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing**, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panita pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); **(iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152)**, dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU*

10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Bahwa berikutnya pertimbangan *a quo* juga dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 205.

- 10) Bahwa perihal krusialnya kewenangan Mahkamah dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili perkara berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024 mestilah ditautkan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 mengenai ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.3 huruf b halaman 209, yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma

Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk disatu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

- 11) Bahwa selisih perolehan suara PEMOHON dengan peraih suara terbanyak *in casu* Paslon Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT) telah melebihi ambang batas atau di atas 2% (dua persen), olehnya itu Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
- 12) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena yang menjadi substansi dalam permohonan PEMOHON menjadi kewenangan lembaga lain, serta Mahkamah tidak dapat mengesampingkan syarat ambang batas, olehnya itu beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet vankerlijck on verklaard*).

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing in persona*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan

suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 dengan alasan:

1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, Pasal 4 PMK 3/2024, yang menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait*

Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

2) Bahwa TERMOHON berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024 adalah (**vide: Bukti T-2**):

| No. | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Partai Pengusul |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si | 1. PKB 2. GERINDRA |
| 2 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 1. GOLKAR 2. PKS 3. PBB |
| 3 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H AWAL JAYA BOLOMBO, S.H | 1. PAN 2. Partai Demokrat |
| 4 | Drs. H. BACHRUN, M.Si LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H | 1. PDIP 2. NASDEM |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M Drs. SYARIFUDDIN, M.M | 1. HANURA 2. PERINDO 3. PPP |

Yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-3**):

| Nomor Urut | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati |
|------------|---|
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si |

| | |
|---|---|
| | Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M. |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H, |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M |

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PEMOHON adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2024, dengan nomor urut 2.
- 4) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan: *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- 5) Bahwa berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 bertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dengan melampirkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/1790/Dukcapil.Ses, bertanggal 18 Desember 2024 perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 menyatakan bahwa jumlah penduduk tahun 2024 di Kabupaten Muna adalah 231.980 (dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh) jiwa (**vide: T-4**). Sehingga bila dilekatkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 maka perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* PIHAK TERKAIT (Paslon No. Urut 1 / Drs. H. BACHRUN, M.Si dan LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H., adalah

paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna (TERMOHON).

- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, yaitu sebagai berikut (**vide: Bukti T-1**):

| Nomor Urut | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Perolehan Suara |
|---------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H | 53.908 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si | 47.655 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M. | 11.563 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H, | 4.331 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M | 629 |
| Jumlah Seluruh Suara Sah | | 118.086 |

- 7) Bahwa bila merujuk pada Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 yang ditetapkan oleh TERMOHON di atas, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 118.086$ (total suara sah) = 2.361,7 suara atau dibulatkan 2.362 suara.
- 8) Bahwa perolehan suara PEMOHON adalah 47.655 suara, sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 53.908 suara, sehingga perbedaan

perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah 53.908 suara – 47.655 suara = 6.253 suara (5,29%) suara atau lebih dari 2.362 suara.

- 9) Bahwa meskipun PEMOHON tidak memenuhi syarat formil karena melebihi 2% dari ambang batas (*in casu* 5,29%), tetapi dalam praktiknya Mahkamah dalam beberapa putusannya justru “menunda” pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara “kasuistis” sebagaimana yang ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 pada paragraf 3.1 angka 4 halaman 155 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, **Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.***

- 10) Bahwa TERMOHON telah mengklaster beberapa putusan Mahkamah yang menunda pemberlakuan ambang batas *a quo* sebagai berikut:

| PERKARA TAHUN 2017 | | | |
|--------------------|--------------------|--|-------------|
| No. | Nomor Perkara | Pokok Substansi Perkara | Kata Kunci |
| 1. | 14/PHP.BUP-XV/2017 | Karena ada rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil | Rekomendasi |

| | | | |
|----|--------------------|---|-------------------------------------|
| | | pemungutan suara dan penetapan perolehan suara pada 18 Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Tolikara | |
| 2. | 42/PHP.BUP-XV/2017 | Karena dari 26 Distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya hanya 20 Distrik yang dihitung perolehan suaranya oleh TERMOHON (KPU Kab. Puncak Jaya sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh TERMOHON | Belum Selesai Penghitungan Suara |
| 3. | 50/PHP.BUP-XV/2017 | TERMOHON (KPU Kab. Intan Jaya) mengeluarkan Objek Permohonan (Keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai Penetapan Hasil Pemilihan) dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno | Force Majuere |
| 4. | 52/PHP.BUP-XV/2017 | Karena TERMOHON (KPU Kab. Kepulauan Yapen) dalam hasil rekapitulasi menyatakan PEMOHON dengan 0 suara karena PEMOHON sebelumnya telah ada rekomendasi dari Panwaslu | Rekomendasi yang sudah dikoreksi |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--|----------------------|
| | | <p>untuk dibatalkan sebagai pasangan calon dan tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON. Tetapi rekomendasi Panwaslu tersebut sudah koreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan menyatakan PEMOHON tidak dapat dibatalkan sebagai paslon</p> | |
| PERKARA TAHUN 2021 | | | |
| 5. | 84/PHP.BUP-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire tidak logis, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire justru lebih sedikit dibandingkan DPT yang ditetapkan (lihat para • Karena pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire tidak dilakukan dengan menggunakan pencoblosan langsung | Daftar Pemilih Tetap |

| | | | |
|----|----------------------|---|----------------------|
| 6. | 101/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena perara ini tidak terlepas dari Putusan MK 84/2021 | Daftar Pemilih Tetap |
| 7. | 132/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena PIHAK TERKAIT atas nama Yusak sebagai mantan narapidana yang belum selesai masa jeda 5 tahun pasca Putusan MK 56/2019. Seharusnya jeda 5 tahun Yusak selesai pada 26 Januari 2022, tetapi ditetapkan oleh TERMOHON KPU Boven Digoel pada September 2020. Oleh karenanya PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan PKPU 1/2020 sehingga di diskualifikasi. | Syarat Calon |
| 8. | 135/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena PIHAK TERKAIT (Orien & Thobias), khususnya Orien tidak lagi memenuhi syarat calon dikarenakan Orien berkewarganegaraan Amerika Serikat. | Syarat Calon |

| | | | |
|-----|----------------------|---|---|
| 9. | 145/PHP.BUP-XIX/2021 | <p>Karena ERDI DABI selaku PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, ERDI DABI melakukan tindak pidana berupa mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang dan akhirnya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara yang mana pasal yang digunakan dalam hal menuntut ERDI DABI ancamannya lebih dari 5 tahun berdasarkan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> | Syarat Calon |
| 10. | 39/PHP.BUP-XIX/2021 | <p>Karena yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan pemilih fiktif dan DPT tambahan yang digelembungkan namun MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tidak terbukti.</p> | Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih Fiktif |

| | | | |
|-----|---------------------|---|--|
| 11. | 46/PHP.BUP-XIX/2021 | <p>Karena pembagian sembako yang didalilkan PEMOHON tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh MAHKAMAH, karena mengenai pokok permohonan PEMOHON tersebut juga sudah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan dan sudah pula ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pelanggaran.</p> | Kewenangan Lembaga Lain |
| 12. | 59/PHP.BUP-XIX/2021 | <p>Karena ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias ke TERMOHON (KPU Kabupaten Nias) mengenai pembatalan / diskualifikasi Halirius & Firman (PIHAK TERKAIT) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias sudah menindaklanjutinya. Tetapi MAHKAMAH berpendapat</p> | Rekomendasi Bawaslu Kabupaten mengenai pembatalan / diskualifikasi |

| | | | |
|-----|----------------------|---|-------------------------|
| | | bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias tersebut disaat permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nias sedang diadili (menerima, memeriksa dan memutus) oleh MAHKAMAH. | |
| 13. | 100/PHP.BUP-XIX/2021 | Karena yang didalilkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM sebagai Calon Bupati dan Drs. MARTUA SITANGGANG (PIHAK TERKAIT) sebagai Calon Wakil Bupati berupa kepemilihan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan menurut hukum. | Syarat Calon |
| 14. | 97/PHP.BUP-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Karena pemungutan suara dilakukan dengan cara sistem ikat yang seharusnya dilakukan | Sistem Pemungutan Suara |

| | | | |
|-----|---------------------|---|-------------------------------|
| | | <p>dengan cara satu orang satu suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena ada perampasan kotak suara pada 29 TPS di Distrik Apalapsili | |
| 15. | 51/PHP.BUP-XIX/2021 | <p>Karena adanya rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya kepada TERMOHON (KPU Tasikmalaya) bahwa PIHAK TERKAIT terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan konsultasi ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikeluarkan saat perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sudah diajukan permohonannya di MAHKAMAH Konstitusi sehingga rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya</p> | Rekomendasi Bawaslu Kabupaten |

| | | | |
|-----|---------------------|---|---|
| | | tersbeut dikesampingkan oleh MAHKAMAH | |
| 16. | 21/PHP.KOT-XIX/2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Karena yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya adalah berkaitan dengan banyaknya pemilih pindahan yang memilih tetapi tidak membaha formilir pindahan (FORMULI MODE A5-KWK) • Karena adanya keterlibatan jajaran TERMOHON (KPPS) dan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dari tim pemenangan PIHAK TERKAIT yang bergabung dalam grub WA | DPT Pindahan & Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan |

- 11) Bahwa terhadap 16 (enam belas) putusan Mahkamah sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 10 di atas, maka secara garis besar Mahkamah secara praktik yang berlaku dapat menunda keberlakuan ambang batas yang dipersyaratkan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 hanya dalam 8 (delapan) keadaan, yakni:

1. Adanya rekomendasi dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Belum terselesainya penghitungan suara;
3. Mengenai Daftar Pemilih Tetap
4. Syarat calon
5. Ada pemilih fiktif
6. *Force Majeure*
7. Sistem pemungutan suara
8. Keterlibatan penyelenggara pemilihan

Secara *a contrario*, apabila permohonan PEMOHON dalam perselisihan hasil pemilihan tidak berkenaan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Mahkamah tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. *In casu a quo*, ternyata tidak satu pun yang termasuk keadaan yang pernah disimpangi oleh Mahkamah.

- 12) Bahwa jika mencermati keseluruhan dalil-dalil dalam permohonan PEMOHON, hanyalah didasarkan atas 4 (empat) hal yang substansial, yakni:
 1. Mengenai penggunaan program pemerintah dan mutasi ASN oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Calon Petahana
 2. Mengenai netralitas ASN
 3. Mengenai *money politics*
 4. Mengenai pelanggaran Termohon pada masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara.
- 13) Bahwa dari 4 (empat) hal yang menjadi substansi permohonan PEMOHON *a quo*, tidak satupun yang termasuk dalam 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah disimpangi oleh Mahkamah. Oleh karena itu, menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON bersifat umum-abstrak, sebab dalam *fundamentum petendi* maupun petitumnya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai selisih penghitungan yang benar menurut PEMOHON atas perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;
- 2) Bahwa dalil permohonan PEMOHON ilusionir, sebab pada permohonannya halaman 12 angka 3 mendalilkan keterlibatan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 tetapi tidak menjelaskan secara terperinci bentuk tindakan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara yang berdampak pada hasil;
- 3) Bahwa dalil permohonan PEMOHON ilusionir, sebab pada permohonannya halaman 12 angka 4 mendalilkan pemanfaatan program oleh PIHAK TERKAIT diluar jadwal kampanye dan pada masa tenang, akan tetapi PEMOHON tidak menguraikan *tempus* dan *locus* terjadinya hal yang dimaksudkan *a quo* sehingga berdampak pada hasil pemilihan.
- 4) Bahwa dalil permohonan PEMOHON kabur, sebab pada permohonannya halaman 30 huruf C angka 2 tabel V ke-3 mendalilkan adanya pemilih ganda atas nama LA ODE RONAL yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Lasunapa Kecamatan Duruka, akan tetapi PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dimana yang bersangkutan memberikan hak pilihnya sebanyak 2 kali.
- 5) Bahwa dalil permohonan PEMOHON kabur, sebab pada permohonannya halaman 30 huruf C angka 2 tabel V ke-3 mendalilkan adanya pemilih ganda atas nama WA ODE RAHMAT GUSNI, akan tetapi PEMOHON tidak menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai validitas pencarian nama-nama pemilih yang telah terdata di dalam DPT.

- 6) Bahwa dalil permohonan PEMOHON tidak jelas, sebab pada permohonannya halaman 30 huruf C angka 2 tabel V ke-3 mendalilkan adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK) atas nama LA ODE MILA, akan tetapi PEMOHON tidak menyertakan NIK sebagai validitas pencarian nama-nama pemilih yang telah terdata di dalam DPT.
- 7) Bahwa dalil permohonan PEMOHON sumir, sebab dalam permohonannya halaman 31 huruf C angka 2 tabel V ke-4 mendalilkan anggota KPPS membuka suara dan menumpahkan isinya ke lantai, akan tetapi PEMOHON tidak merinci apakah perbuatan *a quo* berdampak pada signifikansi hasil pemilihan.
- 8) Bahwa dalil permohonan PEMOHON fiktif, sebab dalam permohonannya halaman 33 huruf C angka 3 tabel VI mendalilkan adanya pemilih di TPS 01 Desa Bone Kainsetala mencoblos 2 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, sebab faktualnya peristiwa yang didalilkan *a quo* tidak pernah terjadi.
- 9) Bahwa dalil permohonan PEMOHON kabur, sebab dalam permohonannya halaman 34 huruf C angka 3 tabel VI mendalilkan PPK di Kecamatan Katobu tidak mencantumkan waktu kunjungan ke rumah pemilih yang berhalangan hadir sehingga dianggap bahwa PPK melakukan kunjungan pada waktu yang tidak diperbolehkan, akan tetapi PEMOHON lupa bahwa PPK tidak diberikan wewenang oleh UU 10/2016 atau PKPU maupun Juknis untuk melakukan kunjungan ke rumah pemilih, melainkan yang diberikan wewenang untuk itu adalah KPPS.
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut TERMOHON permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur sehingga beralasan menurut hukum agar Mahkamah menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**vide: Bukti T-2**), yakni:
 1. LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si dan PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si
 2. LA ODE KARDINI, S.E., M.Si dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T., I.P.M.
 3. Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H dan AWAL JAYA BOLOMBO, S.H.
 4. Drs. H. BACHRUN, M.Si dan LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H.
 5. LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M dan Drs. SYARIFUDDIN, M.M.

Yang selanjutnya telah ditetapkan nomor urut masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-3**), yakni:

| Nomor Urut | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati |
|------------|---|
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si |

| | |
|---|---|
| | Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M. |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H, |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M |

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**vide: Bukti T-1**), yakni:

| Nomor Urut | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Perolehan Suara |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H | 53.908 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si | 47.655 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M. | 11.563 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H, | 4.331 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M | 629 |
| Jumlah Seluruh Suara Sah | | 118.086 |

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON *a quo*, selisih perolehan suara sah PEMOHON dengan peserta peraih suara terbanyak in casu Drs. BACHRUN, M.Si dan LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H., (PIHAK TERKAIT) yaitu 53.908 suara – 47.655 suara = 6.253 suara.
5. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh PEMOHON mengandung kekaburan substantif, sebab tidak mengemukakan penghitungan suara yang benar sebagaimana versi PEMOHON. Padahal, ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 telah melimitasi objek yang diuji Mahkamah adalah berkaitan dengan

perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Hal itu pun telah dipertegas di dalam Lampiran I PMK 3/2024 pada halaman 50.

6. Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil permohonan PEMOHON, maka hanya ada 4 (empat) *legal issues* yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yakni:

- (1) Mengenai pelanggaran administrasi dan kampanye;
- (2) Mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa;
- (3) Mengenai *Money Politics*;
- (4) Mengenai dugaan Pelanggaran Kampanye yang dikualifikasi sebagai keberpihakan TERMOHON kepada PIHAK TERKAIT.

7. Bahwa terhadap keempat *legal issues* tersebut di atas, selanjutnya secara terperinci dan sistematis TERMOHON akan menguraikannya sebagai berikut:

A. PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN KAMPANYE

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya menguraikan beberapa pelanggaran administrasi dan kampanye yang selanjutnya akan diuraikan ke dalam subbab sebagai berikut:

1. Mengenai Mutasi ASN oleh PIHAK TERKAIT

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 6 angka 7.1 dan halaman 11 huruf A angka 1 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa PIHAK TERKAIT *in casu* Paslon Nomor Urut 1 selaku Petahana telah menyalahgunakan jabatannya untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 dengan cara melakukan mutasi sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 6 Juni 2024 dan 12 Juli 2024 tanpa mendapat izin dari Menteri terkait.
- 2) Bahwa TERMOHON pada tanggal 27 Desember 2024 telah meminta informasi dan dokumen pendukung terkait pelaksanaan mutasi pejabat lingkup Pemda Muna berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1402/PY.02.1/7403/2/2024 (**vide: Bukti T-5**);

- 3) Bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Muna telah membalas surat TERMOHON pada tanggal 27 Desember 2024 dengan Nomor 800.1.3/3234 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan mutasi pejabat lingkup Pemda Muna pada tanggal 6 Juni 2024 dan tanggal 12 Juli 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan telah lebih dulu mendapat pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (**vide: Bukti T-6**);

Surat balasan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna bertanggal 27 Desember 2024 *a quo* juga melampirkan beberapa berkas, diantaranya:

- a. Keputusan Bupati Muna Nomor 242 Tahun 2024 tentang Pengukuhan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 06 Juni 2024 serta lampiran daftar nama-nama pejabat yang dilantik (**vide: bukti T-7**)
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2597/SJ perihal Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, bertanggal 3 Juni 2024 serta lampiran daftar persetujuan nama-nama pejabat yang dilantik (**bukti T-8**).
- c. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 3433/R-AK.02.02/SD/K/2024 perihal Pertimbangan Teknis Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 14 Mei 2024 serta lampiran daftar pertimbangan teknis mutasi (**vide: bukti T-9**).
- d. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2265/OTDA perihal Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Muna, bertanggal 22 Maret 2024 beserta lampirannya **(vide: bukti T.-10)**.

- e. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 3895/R-AK.02.02/SD/K/2024 perihal Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Pemberhentian, Promosi, dan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 6 Juni 2024 beserta lampiran **(Vide: Bukti T.-11)**.
 - f. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4872/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, bertanggal 2 Juli 2024 beserta lampiran **(Vide: Bukti T.-12)**.
 - g. Keputusan Bupati Muna Nomor 345 Tahun 2024 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 12 Juli beserta lampiran daftar nama-nama pejabat yang dilantik dan Keputusan Bupati Nomor 242 Tahun 2024 tentang Pengukuhan, Pelantikan, Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 6 Juni 2024. **(vide: Bukti T-13)**.
- 4) Bahwa UU 10/2016 telah melarang Bupati atau Wakil Bupati untuk melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sebagai berikut:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan **kecuali mendapat persetujuan tertulis oleh Menteri**”.*

- 5) Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 *a quo* secara *a contrario* Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dibolehkan** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan **selama mendapatkan persetujuan tertulis oleh Menteri.** *In casu*, Menteri yang dimaksudkan adalah yang mengurus pemerintahan dalam negeri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 *a quo* bila ditautkan dengan Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Muna melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Nomor 800.1.3/3234, bertanggal 27 Desember 2024 beserta dengan lampirannya, **maka mutasi pejabat lingkup Pemda Muna yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2024 dan 12 Juli 2024 tidaklah menyimpangi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 karena telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 100.2.2.6/2597/SJ (vide: Bukti T-8) dan Surat Nomor 100.2.2.6/4872/OTDA (vide: Bukti T-12). Dengan demikian, dibenarkan menurut hukum.**
- 7) Bahwa sekalipun oleh PEMOHON menganggap bahwa mutasi yang terjadi di lingkup Pemda Kabupaten Muna sebagai suatu penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 *in casu* PIHAK TERKAIT sebagai salah satu cara memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 adalah tidak tepat jika PEMOHON mengajukannya kepada Mahkamah.

Sebab, berkaitan dengan larangan penggantian pejabat terqualifikasi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) *in casu* Bawaslu Kabupaten Muna dengan mekanisme mengeluarkan rekomendasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 138 UU 8/2015 *jo* Pasal 139 UU 1/2015 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 138 UU 8/2015

Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 139 UU 1/2015

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi.**
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

Selanjutnya dipertegas di dalam Pasal 34 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Perbawaslu 9/2024) sebagai berikut:

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.**
- (2) Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan*

atau Temua yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.*
 - (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.*
 - (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Formulir Laporan atau Temuan;*
 - b. Kajian; dan*
 - c. Bukti**
 - (6) Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi disampaikan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis sesuai dengan Formulir Model A.14.1.*
- 8) Bahwa sekalipun PEMOHON dalam perkara *a quo* mengajukan kepada Mahkamah, tidak menghapus kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna untuk menangani dalil PEMOHON mengenai penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Sebab, secara waktu masih memungkinkan bagi Bawaslu Kabupaten Muna untuk menangani dalil PEMOHON *a quo* selama masih dalam rentan waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024.
- 9) Bahwa pelanggaran atas penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari

Menteri juga diberikan sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016, sebagai berikut:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahan tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- 10) Bahwa oleh karena itu, maka berkenaan dengan dalil PEMOHON sepanjang mengenai terjadinya mutasi yang dilakukan oleh Petahana *in casu* Calon Bupati Muna Nomor Urut 1 Drs. BACHRUN, M.Si kurang dari 6 (enam bulan) sebelum tanggal penetapan pasangan calon pada tanggal 6 Juni 2024 dan 12 Juli 2024 secara hukum menjadi wewenang Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Muna.
- 11) Bahwa faktualnya, berkaitan dengan dalil PEMOHON sepanjang mengenai mutasi di Kabupaten Muna oleh Bupati Drs. H. Bachrun, M.Si, (PIHAK TERKAIT), TERMOHON tidak pernah mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Muna.
- 12) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, oleh karena telah terdapat persetujuan Menteri Dalam Negeri atas pergantian pejabat di Lingkup Kabupaten Muna, serta tidak terdapatnya rekomendasi atas peristiwa yang didalilkan PEMOHON *a quo*, maka dalil PEMOHON sepanjang mengenai pelanggaran mutasi oleh Drs. Bachrun, M.Si, (PIHAK TERKAIT) tidak terbukti secara hukum dan karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkannya.

2. Mengenai PIHAK TERKAIT Memanfaatkan Program Pembagian Bibit Jagung Pada Masa Kampanye

- 1) Bahwa PEMOHON dalam dalil permohonannya halaman 11 s.d 12 angka 5 huruf A ke-2 mendalilkan pada pokoknya bahwa PIHAK TERKAIT *in casu* Paslon Nomor Urut 1 memanfaatkan program pembagian bibit jagung pada masa kampanye bulan November 2024 di 7 (tujuh) kecamatan untuk kepentingan pencitraan. Adapun 7 (tujuh) kecamatan yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya *a quo* adalah:
 - a. Kecamatan Tongkuno
 - b. Kecamatan Kabawo
 - c. Kecamatan Kontukowuna
 - d. Kecamatan Watopute
 - e. Kecamatan Kabangka
 - f. Kecamatan Parigi
 - g. Kecamatan Bone

- 2) Bahwa berkaitan dengan dalil permohoan PEMOHON *a quo* adalah merupakan salah satu larangan dalam kampanye sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, yakni:

*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang **menggunakan** kewenangan, **program**, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

- 3) Bahwa oleh karena dalil permohonan PEMOHON *a quo* berkaitan dengan larangan dalam kampanye, maka secara hukum pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohoan PEMOHON *a quo* adalah Bawaslu Kabupaten Muna dengan mekanisme rekomendasi kepada TERMOHON. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 138 UU 8/2015 *jo* Pasal 139 UU 1/2015 *jo* Pasal 34 ayat (1) Perbawaslu 9/2024 *jo* Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 sebagai berikut:

Pasal 138 UU 8/2015

Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 139 UU 1/2015

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi.**
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

Pasal 34 ayat (1) Perbawaslu 9/2024

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- 4) Bahwa faktualnya, dalil pemohon PEMOHON sepanjang mengenai pembagian bibit jagung oleh calon Petahana (PIHAK TERKAIT), TERMOHON tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna.
- 5) Bahwa sekalipun PEMOHON “memaksa” Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili dalil permohonan PEMOHON berkaitan dengan penggunaan program bibit jagung oleh PIHAK TERKAIT dan dikualifisir sebagai bentuk pelanggaran pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka patut kiranya dipertimbangkan mengenai apakah 7 (tujuh) kecamatan yang didalilkan PEMOHON *a quo* menunjukkan adanya signifikansi atas perolehan suara atau tidak. Hal itu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.D-IX/2011 (Putusan MK 120/2011), bertanggal 19 Desember 2011 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang diajukan oleh Dr. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, M.M dan H. TONNY ULOLO, S.E., M.M sebagai Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Nomor Urut 2. Selengkapny kami kutip pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

Pertimbangan Mahkamah Paragraf 3.21.2 halaman 146

*Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK TERKAIT dalam kesimpulannya menyatakan, **PEMOHON yang merupakan petahana (incumbent) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang telah menyalahgunakan program pemerintah berupa pemberian bibit jagung secara masif kepada Masyarakat untuk kepentingan pemenangannya** (vide bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-21) dan telah mengerahkan pegawai negeri sipil dan menyalahgunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan pemenangannya (vide bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-24 dan keterangan saksi Ir. Hendry F.Juuna, M.M dan Jasin Mohamad, S.E., M.P.A);*

*Mahkamah menilai, dalil PEMOHON a quo **tidak menunjukkan adanya signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dapat mengubah kedudukan atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon.** Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON yaitu surat pernyataan yang tidak memenuhi bukti affidavit sebagaimana yang dipersyaratkan oleh MAHKAMAH dan foto/video rekaman kampanye tidak dapat meyakinkan MAHKAMAH bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif, melainkan hanya menunjukkan kejadian-kejadian yang sifatnya sporadic belaka. Dengan demikian, dalil PEMOHON a quo tidak terbukti secara hukum.*

- 6) Bahwa bercermin pada Putusan MK 120/2011 tersebut di atas, maka dalam perkara a quo pun PEMOHON mestilah dapat membuktikan perihal pembagian bibit jagung yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT di 7 (tujuh) Kecamatan sebagai suatu pelanggaran TSM yang menunjukkan adanya signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk PEMOHON sendiri;
- 7) Bahwa jika mencermati dalil PEMOHON hanya menyebutkan peristiwa pembagian bibit jagung oleh Petahana (PIHAK TERKAIT) di 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Kabawo, Kecamatan Kontu Kowuna, Kecamatan Watopute, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Bone. Tanpa menguraikan signifikansi perolehan suara;
Terlebih lagi, uraian dalil PEMOHON yang hanya menyebutkan 7 kecamatan peristiwa pembagian bibit jagung a quo tidak memenuhi syarat untuk dikualifisir sebagai suatu bentuk pelanggaran TSM, khususnya mengenai keadaan yang secara hukum dikualifisir ke dalam pelanggaran yang masif yang mesti melebihi dari sebagian daerah pemilihan (50+1) sebagaimana penjelasan Pasal 135A UU 10/2016 yaitu: yang dimaksud dengan masif adalah dampak pelanggaran yang

sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan **bukan hanya sebagian-sebagian.**

- 8) Bahwa faktualnya, Kabupaten Muna terdiri dari 22 Kecamatan (**vide: Lampiran Bukti T-1**), maka untuk memenuhi syarat agar suatu perbuatan Pasangan Calon terqualifikasi ke dalam pelanggaran yang masif berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU 10/2016 maka PEMOHON dalam fundamentum petendinya “wajib” menguraikan 11+1 Kecamatan yang dianggap terdapat pelanggaran yang signifikan terhadap perolehan suara.

In casu a quo, PEMOHON dalam permohonannya hanya menyebutkan 7 (tujuh) Kecamatan tanpa menguraikan signifikansi perolehan suara.

- 9) Bahwa setelah TERMOHON melakukan validasi atas 7 kecamatan yang diuraikan PEMOHON dalam permohonannya dengan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, ternyata PEMOHON menang di 2 kecamatan yaitu pada Kecamatan Tongkuno dan Kecamatan Parigi, yang dijelaskan ke dalam tabel berikut ini:

| KECAMATAN TONGKUNO | | |
|--------------------|---|-----------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 2.272 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 2.398 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 2.001 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 712 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 63 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-------|
| | TOTAL SUARA SAH | 7.446 |
| (vide: Bukti T-14) | | |

| KECAMATAN KABAWO | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 3.324 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 3.139 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 397 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 130 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 29 |
| | TOTAL SUARA SAH | 7.019 |
| (vide: Bukti T-15) | | |

| KECAMATAN KONTU KOWUNA | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 1.377 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 837 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 273 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 48 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 9 |
| | TOTAL SUARA SAH | 2.544 |

(vide: Bukti T-16)

| KECAMATAN WATOPUTE | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 4.317 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 2.948 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 207 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 100 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 26 |
| | TOTAL SUARA SAH | 7.598 |

(vide: Bukti T-17)

| KECAMATAN KABANGKA | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 3.148 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 2.410 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 156 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 29 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 16 |
| | TOTAL SUARA SAH | 5.759 |

(vide: Bukti T-18)

| KECAMATAN PARIGI | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 2.602 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 2.988 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 552 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 149 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 59 |
| | TOTAL SUARA SAH | 6.350 |

(vide: Bukti T-19)

| KECAMATAN BONE | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 1.397 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 1.367 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 265 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 182 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 6 |
| | TOTAL SUARA SAH | 3.217 |

(vide: Bukti T-20)

- 10) Bahwa jika mengikuti logika PEMOHON yang mendalilkan terjadinya pembagian bibit jagung di 7 (tujuh) Kecamatan sebagai kepentingan pencitraan, berdasarkan penalaran yang wajar apabila dikaitkan dengan signifikansi perolehan suara, maka seharusnya di 7 (tujuh) kecamatan yang didalilkan oleh PEMOHON *a quo* haruslah PEMOHON tidak memiliki kemenangan. Faktualnya, justru dari 7 kecamatan yang didalilkan, PEMOHON meraup kemenangan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tongkuno dan Kecamatan Parigi.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalil PEMOHON sepanjang mengenai pembagian bibit jagung oleh calon Petahana *in casu* PIHAK TERKAIT di 7 kecamatan sebagai bentuk pencitraan adalah tidak memenuhi syarat pelanggaran masif (50+1), serta PEMOHON tidak menguraikan signifikansi perolehan suara, serta berbanding terbalik dengan hasil perolehan suara di 2 kecamatan yang didalilkan, oleh karenanya beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

3. Mengenai Penyaluran Bantuan Pompanisasi Kepada Petani dan Pasar Murah oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara pada Masa Kampanye

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 12 angka 5 huruf A ke-3 mendalilkan yang pada pokoknya ada muatan politik untuk mengarahkan dukungan politik kepada PIHAK TERKAIT atas kunjungan kerja Pj Gubernur Sulawesi Tenggara ANDAP BUDHI REVIANTO di Kabupaten Muna dalam penyelenggaraan program saluran bantuan Pompanisasi kepada petani dan kegiatan Pasar Murah.
- 2) Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan PEMOHON *a quo* menjadi kabur karena PEMOHON tidak menguraikan secara detil dimana tempat diselenggarakannya saluran bantuan pompanisasi kepada petani dan kegiatan Pasar Murah. Uraian tentang tempat menjadi krusial guna menilai apakah terdapat signifikansi perolehan suara atas hal yang didalilkan PEMOHON.

Selain itu juga, perlu untuk diperiksa apakah kehadiran Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muna dalam kegiatan tersebut terdapat ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu. Hal ini menjadi penting, sebab yang diperiksa oleh Mahkamah adalah pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang berkonsekuensi terhadap hasil. Hal itu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 (Putusan MK 51/2021), bertanggal 19 Maret 2021 pada paragraf 3.9.2 halaman 336 sebagai berikut:

*Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak cukup mendapatkan keyakinan terkait adanya dugaan pembagian uang/money politic sebagaimana yang didalikan oleh PEMOHON, terlebih kalaupun ada pembagian uang Rp500.000, uang tersebut merupakan uang operasional yang diperuntukan untuk kegiatan RT Siaga yang diyakini oleh **MAHKAMAH tidak ada kaitannya dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.** Sementara itu, berkaitan dengan fakta hukum adanya pemberian uang Rp25.000/per orang untuk keluarga saksi dan tetangga saksi yang bernama Romiah, yang tidak didukung oleh fakta hukum lain, maka hal tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap adanya dugaan money politic, karena di samping hanya diterangkan oleh satu orang saksi juga **tidak ada bukti lain adanya keterkaitan dengan perolehan suara salah satu pasangan yang diberikan dari saksi tersebut.***

- 3) Bahwa berdasarkan penelusuran TERMOHON pada laman pemberitaan yang dimuat dalam Radar Sultra, bertanggal 17 Oktober 2024 tidak terdapat kegiatan yang menerangkan kehadiran Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, dan Forkopimda Kabupaten Muna adalah untuk mengajak masyarakat Kabupaten Muna mendukung pasangan calon tertentu (PIHAK TERKAIT). Dalam pemberitaan tersebut, justru Pj Gubernur Sulawesi

Tenggara memberikan pengarahan mengenai netralitas ASN di Kabupaten Muna (**vide: Bukti T-21**).

- 4) Bahwa selain itu, hal yang didalilkan oleh PEMOHON *a quo* (kunjungan Pj.Gubernur Sulawesi Tenggara disalahgunakan) adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna untuk melakukan pengawasan. Faktualnya, tidak terdapat temuan atau laporan maupun rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Muna berkaitan dengan kunjungan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara. Oleh karenanya sepanjang tidak ada temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna perihal penyimpangan yang dilakukan saat kunjungan Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, maka beralasan hukum bagi Mahkamah mengesampingkan dalil PEMOHON *a quo*.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021 pada paragraf 3.9 halaman 175-176 sebagai berikut:

*Hal lain, yang juga menjadi penilaian khusus dalam perkara a quo adalah terkait ada tidaknya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa tindakan walikota petahana yang juga menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang hadir dalam setiap acara pembagian bansos dan BLT **bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih PIHAK TERKAIT dalam rangka memenangkan Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020.** Dalam hal ini **sikap dan tindakan walikota petahana beserta jajarannya terhadap masyarakat saat membagikan bantuan sosial dan BLT sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan walikota dalam Pilkada.** Menurut MAHKAMAH, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, **tidak ada bukti yang meyakinkan MAHKAMAH bahwa walikota petahana (Ibnu Sina) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kota Banjarmasin atau setidaknya telah membiarkan para***

pejabatnya untuk ikut aktif dalam pemenangan diri dan pasangannya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, Bawaslu Kota Banjarmasin dalam keterangannya menyatakan tidak terdapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut **MAHKAMAH dalil PEMOHON tentang adanya penyalahgunaan bansos dan BLT sebagai bentuk pencitraan diri yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT adalah tidak beralasan menurut hukum.**

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat temuan atau laporan Bawaslu Kabupaten Muna ditambah lagi PEMOHON yang tidak menguraikan apakah terdapat signifikansi perolehan suara atau setidaknya menguraikan adanya ajakan untuk memilih paslon tertentu, maka demi hukum Mahkamah haruslah menolak dalil PEMOHON *a quo*.

4. Mengenai PIHAK TERKAIT Menghadiri Kegiatan Pramuka

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 12 angka 5 huruf A ke-4 dan halaman 14 angka 5 huruf A ke-4 kolom 5 mendalilkan yang pada pokoknya adalah Calon Petahana (PIHAK TERKAIT) memanfaatkan jabatannya, mengarahkan kebijakan dan anggaran daerah untuk setiap kampanyenya dan kampanye dilakukan diluar jadwal dan diwaktu masa tenang.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON *a quo* illisionir, sebab tidak menguraikan kapan dan dimana peristiwa yang dimaksudkan. Terlebih lagi, PEMOHON tidak menguraikan apakah terdapat signifikansi terhadap perolehan suara sebagaimana Mahkamah dalam beberapa pertimbangan putusannya acap kali menilainya (**vide: Putusan MK 21/2021, Putusan MK 51/2021**).

- 3) Bahwa pokok substansi permohonan PEMOHON *a quo* juga secara hukum adalah wewenang Bawaslu Kabupaten Muna dan TERMOHON tidak pernah mendapatkan rekomendasi atas peristiwa yang didalilkan.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum untuk Mahkamah menolak dalil PEMOHON *a quo*.

5. Mengenai Pemasangan Baliho PIHAK TERKAIT yang Memuat Program Kerja

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 6 angka 7.3 dan halaman 14 angka 5 huruf A ke-5 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa banyaknya baliho milik Drs. BACHRUN, M.Si., selaku Plt. Bupati Muna sekaligus Calon Bupati Muna Nomor Urut 1 yang memuat uraian program kerja untuk kepentingan pencitraan yang dilakukan pada masa kampanye dan sampai dengan pelaksanaan pemilihan baliho tersebut belum diturunkan atau ditertibkan oleh TERMOHON;
- 2) Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo* kabur sebab PEMOHON tidak menguraikan dimana tempat peristiwa yang didalilkan;
- 3) Bahwa melalui Jawaban ini, TERMOHON menyampaikan telah menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 874 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 24 September 2024 yakni dimulai dari tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 (**vide: Bukti T-22**);
- 4) Bahwa TERMOHON juga telah menetapkan lokasi-lokasi yang diperbolehkan dalam hal pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 yang telah ditentukan di 22 Kecamatan (**vide; Bukti T-23**);

- 5) Bahwa secara hukum, jenis Alat Peraga Kampanye (APK) yang diperbolehkan bila merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU 13/2024) yakni: a. reklame, b. spanduk dan/atau c. umbul-umbul;
- 6) Bahwa selanjutnya yang termasuk ke dalam jenis APK berupa reklame dijelaskan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Keputusan KPU 1363/2024) pada halaman 19 huruf c angka 1 sebagai berikut (**vide: Bukti T-24**):

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

1) Reklame dengan jenis:

a) Papan reklame elektronik (videotron), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota

b) Papan reklame (billboard), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; dan atau

c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota

2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;

3) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan,

- 7) Bahwa selanjutnya pertanyaan hukum yang timbul berkaitan dengan dalil PEMOHON adalah “apakah TERMOHON memiliki kewenangan untuk membersihkan/menurunkan/menertibkan APK *in casu* Baliho sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON?”

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, TERMOHON tidaklah dibebankan kewajiban untuk melakukan pembersihan/menurunkan/menertibkan APK. Kapasitas hukum TERMOHON hanyalah ditugaskan melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten dan pemerintah daerah. Dan sesungguhnya yang memiliki kewajiban untuk menurunkan APK termasuk Baliho adalah pasangan calon sendiri. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (6) *jo* Pasal 39 ayat (4) PKPU 13/2024 *jo* Keputusan KPU 1363/2024 halaman 28 huruf D angka 2. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (6) PKPU 13/2024

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:

- a. Pasangan Calon;*
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
- c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
- d. Pemerintah daerah*

Pasal 39 ayat (4) PKPU 13/2024

Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

Keputusan KPU 1363/2024 halaman 18 huruf D angka 2

Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

- 8) Bahwa sebagai tindaklanjut atas ketentuan Pasal 28 ayat (6) PKPU 13/2024, faktualnya TERMOHON telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut untuk dilakukan pembersihan APK termasuk Baliho, yakni:
- a. Pada tanggal 22 November 2024, TERMOHON telah bersurat kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna termasuk PEMOHON dengan Surat Nomor 1326/PL.02.4-Und/7403/4/2024 (**vide: Bukti T-25**);
 - b. Pada tanggal 22 November 2024, TERMOHON telah bersurat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna dengan Surat Nomor 1327/PL.02.4-Und/7403/4/2024 (**vide: Bukti T-26**);
 - c. Pada tanggal 22 November 2024, TERMOHON telah bersurat kepada Kapolres Muna dengan Surat Nomor 1328/PL.02.4-Und/7403/4/2024 (**vide: Bukti T-27**);
 - d. Pada tanggal 22 November 2024, TERMOHON telah bersurat kepada Dandim 1416 Muna dengan Surat Nomor 1329/PL.02.4-Und/7403/4/2024 (**vide: Bukti T-28**);
 - e. Pada tanggal 22 November 2024, TERMOHON telah bersurat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna dengan Surat Nomor 1330/PL.02.4-Und/7403/4/2024 (**vide: Bukti T-29**);
 - f. Pada tanggal 22 November 2024, TERMOHON telah bersurat kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna dengan Surat Nomor 1331/PL.02.4-Und/7403/4/2024 (**vide: Bukti T-30**).
- 9) Bahwa atas surat TERMOHON tersebut, pada tanggal 23 November 2024 bertempat di DJ Hotel Jln. Baypass Raha telah dilangsungkan rapat

koordinasi berkaitan dengan pembersihan APK dan *Liaison Officer* (LO) PEMOHON atas nama TAUFAN turut hadir sebagaimana Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Serentak Tahun 2024 (**vide: Bukti T-31**). Hal mana yang disepakati dalam rapat tersebut sebagaimana yang tercatat dalam Notulen Rapat (**vide: Bukti: T-32**) dan telah dimasukkan ke dalam Berita Acara Nomor 388.a/PL.02.4-BA/7403/2024 tentang Rapat Koordinasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Pada Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 November 2024 (**vide: Bukti T-33**) pada angka 2, 3, dan 4 yang memiliki tanggungjawab untuk membersihkan APK adalah tim pasangan calon , selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

2. Untuk pembersihan alat peraga kampanye pada titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam wilayah kabupaten Muna yang telah dipasang oleh Tim Kampanye Pasangan Calon akan dibersihkan oleh masing-masing Tim Kampanye.

3. Alat Peraga Kampanye yang belum diturunkan sampai dengan batas tanggal 23 November 2024 dapat dibersihkan oleh KPU Kabupaten Muna setelah berkoordinasi dengan pihak Bawaslu, Polres Muna, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

4. H-3 agar tidak terdapat lagi alat peraga Kampanye yang terpasang dan siap dibersihkan oleh Tim Pasangan Calon

10) Bahwa pasca rapat koordinasi pada tanggal 24 November 2024, TERMOHON bersurat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna dengan Nomor Surat 1348/PL.02.4-Und/7403/4/2024 Perihal Pembersihan Alat Peraga Kampanye yang akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 (**vide: Bukti T-34**);

11) Bahwa guna efektifitas pembersihan APK, pada tanggal 24 November 2024 TERMOHON juga telah bersurat kepada Kaporles Muna perihal Permintaan Personil dalam rangka pembersihan APK dengan Surat Nomor 1349/PL.02.4-SD/7403/2024 (**vide: Bukti T-35**). Atas surat TERMOHON tersebut, Kapolres Muna telah menugaskan 10 (sepuluh)

personilnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1009/XI/OPS.1.3/2024, bertanggal 24 November 2024 (**vide: Bukti T-36**).

Permintaan personil dalam rangka pembersihan APK juga TERMOHON sampaikan kepada Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Muna pada tanggal 24 November 2024 berdasarkan Surat Nomor 1350/PL.02.4-SD/7403/2024 (**vide: Bukti T-37**). Atas surat TERMOHON tersebut, Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Muna menugaskan 30 (tiga puluh) personilnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1179/SATPOL-PP/XI/2024, bertanggal 25 November 2024 (**vide: Bukti T-38**).

- 12) Bahwa pada tanggal 25 November 2024 telah dilakukan pembersihan APK diseluruh titik lokasi penempatan APK di 22 Kecamatan (**vide: Bukti T-39**).
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena kewenangan pembersihan APK adalah dititikberatkan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye, dan TERMOHON sendiri telah melakukan koordinasi berkenaan dengan pembersihan APK dengan pihak-pihak terkait, maka beralasan menurut hukum agar MAHKAMAH menolak dalil Permohonan *a quo* sepanjang berkaitan dengan TERMOHON tidak menurunkan/menertibkan Baliho Drs. BAHRUN, M.Si selaku Plt. Bupati Muna.

6. Mengenai PIHAK TERKAIT Penggunaan Speedboat Milik Pemda Untuk Kegiatan Kampanye

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 14 s.d 15 angka 5 huruf A ke-6 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa calon Petahana (PIHAK TERKAIT) memanfaatkan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Muna berupa penggunaan *speedboat* untuk berkampanye di 5 (lima) kecamatan, yakni:

- a. Kecamatan Maligano
- b. Kecamatan Pasi Kolaga
- c. Kecamatan Pasir Putih
- d. Kecamatan Batukara
- e. Kecamatan Wakorumba Selatan

Selain itu, PEMOHON mendalilkan jika penggunaan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Muna adalah berkaitan penggunaan rumah jabatan Wakil Bupati Muna sebagai tempat perhitungan cepat perolehan suara.

- 2) Bahwa dalil permohonan PEMOHON kabur, sebab tidak menguraikan apakah penggunaan speedboat mempengaruhi signifikansi perolehan suara pada 5 (lima) kecamatan yang disebutkan oleh PEMOHON dalam permohonannya;
- 3) Bahwa selain itu, dalil Permohonan *a quo* secara hukum adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna. Yang mana faktualnya TERMOHON tidak pernah mendapatkan rekomendasi atas peristiwa yang didalilkan oleh PEMOHON.
- 4) Bahwa sekalipun PEMOHON dalam dalil permohonannya tidak menguraikan signifikansi perolehan suara di 5 (lima) kecamatan yang disebutkan PEMOHON atas penggunaan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Muna oleh PIHAK TERKAIT. Faktualnya, PEMOHON meraup kemenangan pada 2 kecamatan yang didalilkan, yakni Kecamatan Maligano dan Kecamatan Batukara. Selengkapnya TERMOHON gambarkan berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KECAMAWAN-KWK-BUPATI dalam tabel dibawah ini:

| KECAMATAN MALIGANO | | |
|--------------------|--|-----------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 1.634 |

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 1.757 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 108 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 71 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 15 |
| | TOTAL SUARA SAH | 3.585 |
| (vide: Bukti T-40) | | |

| KECAMATAN PASI KOLAGA | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 1.895 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 1.062 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 132 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 217 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 31 |
| | TOTAL SUARA SAH | 2.337 |
| (vide: Bukti T-41) | | |

| KECAMATAN PASIR PUTIH | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. | 1.416 |

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| | LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 1.051 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 50 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 136 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 55 |
| | TOTAL SUARA SAH | 2.708 |
| (vide: Bukti T-42) | | |

| KECAMATAN BATUKARA | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 705 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 777 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 63 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 13 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 2 |
| | TOTAL SUARA SAH | 1.560 |
| (vide: Bukti T-43) | | |

| KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 1.332 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 1.188 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 112 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 44 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 2 |
| | TOTAL SUARA SAH | 2.678 |
| (vide: Bukti T-44) | | |

- 5) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI tersebut di atas, maka dari 5 (lima) kecamatan yang didalilkan oleh PEMOHON ternyata 2 (dua) kecamatan diantaranya yakni Kecamatan Maligano dan Kecamatan Batukara dimenangkan oleh PEMOHON.
- 6) Bahwa berdasarkan penalaran hukum yang wajar jika PEMOHON mendalilkan terjadinya penggunaan fasilitas Pemda Kabupaten Muna berdampak pada signifikansi perolehan suara, maka 5 (lima) kecamatan yang dalilkan oleh PEMOHON seharusnya tidak satu pun PEMOHON memperoleh suara atau setidaknya tidak meraih kemenangan. Hal ini penting mengingat signifikansi perolehan suara menjadi krusial diuraikan oleh PEMOHON atas penggunaan fasilitas Pemda oleh Calon Petahana sebagaimana Putusan MK 21/2021 dan Putusan MK 51/2021;
- 7) Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya penyalahgunaan fasilitas pemerintah pada masa kampanye sebagaimana dalil PEMOHON *a quo*, namun TERMOHON telah melakukan sosialisai kampanye bersama Bawaslu Kabupaten Muna melalui yang materi muatan sosialisasinya salah satunya adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

larangan penggunaan fasilitas pemerintah pada kegiatan kampanye **(vide: Bukti T-45 dan Bukti T-46)**.

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum untuk MAHKAMAH menolak dalil permohonan PEMOHON *a quo*.

7. Mengenai Penghitungan Cepat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Muna

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 14 angka 6 pointer ke-2 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Paslon No. 1 sebagai calon petahana menggunakan fasilitas Rumah Jabatan Wakil Bupati Muna sebagai tempat penghitungan cepat yang dihadiri pula oleh jajaran Pejabat Eselon termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, kabur sebab tidak menguraikan apakah peristiwa tersebut berdampak pada signifikansi perolehan suara.
- 3) Bahwa secara substantif, dalil Pemohon *a quo* adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna dan TERMOHON sama sekali tidak pernah mendapatkan rekomendasi atas peristiwa yang didalilkan.
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo* sepanjang mengenai penggunaan fasilitas Rumah Jabatan Wakil Bupati sebagai tempat penghitungan cepat yang dihadiri oleh sejumlah ASN Kabupaten Muna termasuk Sekda Kabupaten Muna.

8. Mengenai Pengarahan Terhadap Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kelurahan Wasolangka

- 1) Bahwa Permohon dalam permohonannya halaman 6 angka 7.2 dan halaman 15 angka 7 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pengarahan oleh Paslon Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT) terhadap Masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan Kelurahan Wasolangka;

- 2) Bahwa dalil permohonan PEMOHON *a quo* kabur, sebab tidak menguraikan apakah pengarahan Paslon Nomor Urut 1 terhadap penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wasolangka berdampak pada signifikansi perolehan suara;
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Parigi, khususnya di Desa/Kelurahan Wasolangka, ternyata PEMOHON yang memperoleh suara terbanyak bila dibandingkan dengan Paslon Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT), berikut penguraiannya berdasarkan tabel di bawah ini:

| KELURAHAN/DESA WASOLANKGA KECAMATAN PARIGI | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | | | |
| | | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | JUMLAH |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 99 | 102 | 106 | 307 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 131 | 152 | 136 | 419 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 52 | 31 | 32 | 115 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 11 | 11 | 8 | 30 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 2 | 8 | 11 | 21 |
| | TOTAL SUARA SAH | 295 | 304 | 293 | 892 |
| (vide: Bukti T-19) | | | | | |

- 4) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Parigi khususnya pada Kelurahan/Desa Wasolangka justru dari 3 TPS di Kelurahan/Desa Wasolangka tersebut, PEMOHON memperoleh suara terbanyak untuk semua TPS. Olehnya itu, sesungguhnya dalil PEMOHON sepanjang mengenai pengarahan terhadap penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wasolangka justru tidak didukung dengan perolehan suara;
- 5) Bahwa upaya TERMOHON berkaitan dengan menjaga netralitas penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Penyelenggara Desa telah dilakukan oleh TERMOHON dalam sosialisasi/rapat dalam beberapa kesempatan (**vide: Bukti T-45 dan Bukti T-46**);
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON mengenai pengarahan penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wasolangka, sebab justru di kelurahan/desa tersebut PEMOHON lah sebagai peraih suara terbanyak.

B. PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN KEPALA DESA

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya menguraikan beberapa pelanggaran administrasi dan kampanye dalam bentuk pelanggaran atas netralitas ASN dan KEPALA DESA yang selanjutnya akan diuraikan ke dalam subbab sebagai berikut:

1. Mengenai ASN Membentuk Tim Pemenangan Untuk Paslon Nomor Urut 1

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 16 s.d 18 angka 5 huruf B ke-1 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pembentukan tim pemenangan calon petahana (Paslon Nomor Urut 1)

dengan mengarahkan semua ASN serta tenaga honorer dilingkungan Pemda Kabupaten Muna secara berjenjang;

- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* secara wewenang adalah menjadi kewenangan Bawaslu in casu Bawaslu Kabupaten Muna, yang mana sampai dengan Jawaban ini diajukan, tidak satu pun terbit rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna ataupun putusan dari pengadilan yang substansinya memerintahkan TERMOHON untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT.
- 3) Bahwa khusus mengenai netralitas ASN di Kabupaten Muna, pada tanggal 27 September 2024 telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Muna Nomor 800.1/2050 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditanda tangani oleh Pjs Bupati Muna YUNI NURMALAWATI (**vide: Bukti T-47**) yang ditujukan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna
 - b. Staf Ahli Bupati Muna
 - c. Asisten Sekda Kabupaten Muna
 - d. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kab. Muna
 - e. Direktur RSUD dr. H. L.M. Baharuddin M.Kes
 - f. Kepala UPTD/UPTB di Kabupaten Muna
 - g. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
- 4) Bahwa hal yang sama kepada TERMOHON, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisai berkaitan dengan netralitas ASN (**vide: Bukti T-45 dan T-46**).
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh sebab tidak terdapat pelanggaran atas netralitas ASN yang mempengaruhi hasil, maka beralasan menurut hukum agar Mahkamah menolak dalil PEMOHON *a quo*.

2. Mengenai Kepala Desa Kontukowuna Memecat 4 Orang Perangkat Desa Karena Tidak Memilih Paslon Nomor Urut 1

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 18 angka 5 huruf B ke-2 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat arahan oleh sejumlah ASN di Pemda Kabupaten Muna untuk melakukan patungan dengan tujuan untuk membantu pembiayaan politik dan memenangkan Paslon Nomor Urut 1 dan uang tersebut digunakan untuk politik uang.
- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* kabur, sebab tidak mendetilkan siapa saja ASN yang dimaksudkan. Terlebih lagi PEMOHON tidak menguraikan dimana tempat terjadinya politik uang yang dimaksudkan guna dikaitkan dengan signifikansi perolehan suara.
- 3) Bahwa berkaitan dengan netralitas ASN, pada tanggal 27 September 2024 telah dikeluarkan Surat Bupati Muna Nomor 800.1/2050 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditanda tangani oleh Pjs Bupati Muna YUNI NURMALAWATI (**vide: Bukti T-47**).
- 4) Bahwa berkaitan dengan netralitas ASN, TERMOHON sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisai berkaitan dengan netralitas ASN (**vide: Bukti T-45 dan Bukti T-46**).
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum agar Mahkamah menolak dalil PEMOHON *a quo*.

3. Mengenai Ancaman dan Tekanan Kepada Masyarakat Untuk Memilih Paslon Nomor Urut 1

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 18 angka 5 huruf B ke-3 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa adanya pengarahan oleh Kepala Sekolah Dasar kepada guru-guru dilingkungan sekolahnya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.

- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* kabur, sebab tidak merinci siapa saja Kepala Sekolah Dasar yang dimaksudkan dan siapa saja guru-guru dilingkungan sekolah yang diarahkan tersebut. Terlebih lagi PEMOHON tidak menguraikan dimana tempat terjadinya pengarahannya tersebut guna dikaitkan dengan apakah terdapat signifikansi perolehan suara.
- 3) Bahwa mencermati substansi dalil PEMOHON *a quo* adalah menjadi wewenang Bawaslu Kabupaten Muna, yang mana faktualnya TERMOHON tidak pernah mendapatkan rekomendasi atas peristiwa yang didalilkan PEMOHON.
- 4) Bahwa berkaitan dengan netralitas ASN, pada tanggal 27 September 2024 telah dikeluarkan Surat Bupati Muna Nomor 800.1/2050 perihal Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditanda tangani oleh Pjs Bupati Muna YUNI NURMALAWATI (**vide: Bukti T-47**).
- 5) Bahwa berkaitan dengan netralitas ASN, TERMOHON sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan netralitas ASN (**vide: Bukti T-45 dan Bukti T-46**).
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum agar MAHKAMAH menolak dalil PEMOHON *a quo*.

4. Mengenai Paksaan Kepada Warga Kecamatan Wakorumba Selatan Untuk Menurunkan Baliho PEMOHON dan Ancaman Akan Memindahtugaskan Anak Yang Berstatus ASN

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 20 huruf B ke-4 poin 3.5 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa adanya pemaksaan kepada warga Kecamatan Wakorumba Selatan untuk menurunkan Baliho PEMOHON yang ada di halaman rumah warga dengan ancaman akan memindah tugaskan keluarga/anak yang seorang ASN.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON secara hukum adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna, yang mana faktualnya TERMOHON mendapatkan rekomendasi atau putusan pengadilan atas peristiwa yang didalilkan untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT.

- 3) Bahwa berkaitan dengan netralitas ASN, pada tanggal 27 September 2024 telah dikeluarkan Surat Bupati Muna Nomor 800.1/2050 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditanda tangani oleh Pjs Bupati Muna YUNI NURMALAWATI (**vide: Bukti T-47**).
- 4) Bahwa berkaitan dengan netralitas ASN, TERMOHON sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisai berkaitan dengan netralitas ASN (**vide: Bukti T-45 dan Bukti T-46**).
- 5) Bahwa selain itu, berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan WAKORUMBA SELATAN dari 5 Desa/Kelurahan yang terdapat di dalam Kecamatan Wakorumba Selatan, PEMOHON justru meraup kemenangan di Kelurahan/Desa Pure. Berikut perolehan suara di Kecamatan Wakorumba Selatan:

| KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 1.332 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 1.188 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 112 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 44 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 2 |
| | TOTAL SUARA SAH | 2.678 |
| (vide: Bukti T-44) | | |

Adapun pembagian perolehan suara masing-masing Paslon per-kelurahan/desa adalah sebagai berikut:

| |
|-------------------------------|
| KELURAHAN/DESA LABUNIA |
|-------------------------------|

| KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------|-------|--------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | | | |
| | | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | JUMLAH |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 143 | 167 | 103 | 413 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 140 | 129 | 144 | 413 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL SUARA SAH | 289 | 300 | 252 | 841 |
| (vide: Bukti T-44) | | | | | |

| KELURAHAN/DESA WAMBONA KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN | | | | |
|---|--|-----------------|-------|--------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | | |
| | | TPS 1 | TPS 2 | JUMLAH |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 208 | 164 | 372 |

| | | | | |
|---------------------------|--|-----|-----|-----|
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 161 | 166 | 327 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 19 | 12 | 31 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 6 | 12 | 18 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 0 | 2 | 2 |
| | TOTAL SUARA SAH | 394 | 356 | 750 |
| (vide: Bukti T-44) | | | | |

| KELURAHAN/DESA BAKEALU KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN | | | |
|---|--|------------------------|---------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | |
| | | TPS 1 | JUMLAH |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 116 | 116 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 62 | 62 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 4 | 4 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 10 | 10 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----|-----|
| | TOTAL SUARA SAH | 192 | 192 |
| (vide: Bukti T-44) | | | |

| KELURAHAN/DESA PURE KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN | | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | | |
| | | TPS 1 | TPS 2 | JUMLA H |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 100 | 112 | 212 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 147 | 110 | 257 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 5 | 24 | 29 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 4 | 6 | 10 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL SUARA SAH | 256 | 252 | 508 |
| (vide: Bukti T-44) | | | | |

| KELURAHAN/DESA WAKORUMBA KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | |
| | | TPS 1 | JUMLA H |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. | 219 | 219 |

| | | | |
|---------------------------|---|-----|-----|
| | LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | | |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 129 | 129 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 36 | 36 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 3 | 3 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 0 | 0 |
| | TOTAL SUARA SAH | 387 | 387 |
| (vide: Bukti T-44) | | | |

- 6) Bahwa berdasarkan uraian diatas, hal mana tidak terbukti adanya relevansi atas keberadaan baliho *a quo* dengan singnifikansi hasil, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil permohonan PEMOHON *aquo*.

C. PELANGGARAN MONEY POLITICS SEBAGAI PELANGGARAN TSM

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya menguraikan beberapa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam bentuk *money politics* yang selanjutnya akan diuraikan ke dalam subbab sebagai berikut:

1. Mengenai Politik Uang (*Money Politics*) di Kecamatan Tongkuno Selatan

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 18 angka 5 huruf B ke-4 poin 3.1 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi bagi-bagi uang di Desa Labasa senilai Rp.200.000,- per orang untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 atas perintah dari Kepala Desa Labasa.
- 2) Bahwa mengenai dalil PEMOHON *a quo* adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna untuk penanganan tindak pidana *money politics* tersebut, yang mana faktualnya sampai pada jawaban ini diajukan tidak terdapat temuan pelanggaran atas tindak pidana *money politics* dimaksud;

- 3) Bahwa berkaitan dengan *money politics*, TERMOHON sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisasi sebagai bentuk edukasi kepada Masyarakat Kabupaten Muna berkaitan dengan bahaya *money politics* (**vide: Bukti T-48**).

2. Mengenai *Money Politics* di Kecamatan Tongkuno

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 18 angka 5 huruf C ke-4 poin 3.2 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi bagi-bagi uang di Desa Lakologou senilai Rp.200.000,- per orang untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh mantan istri Kepala Desa Lakologou.
- 2) Bahwa berkaitan dengan *money politics*, TERMOHON sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisai kepada Masyarakat Kabupaten Muna berkaitan dengan bahaya *money politics* (**vide: Bukti T-48**)
- 3) Bahwa sekaitan dengan dalil PEMOHON *a quo*, hingga kini tidak ada satupun hasil temuan Bawaslu Kabupaten Muna perihal terjadinya peristiwa politik uang sebagaimana sangkaan PEMOHON dalam dalilnya;
- 4) Bahwa penting untuk menguraikan dalil PEMOHON *a quo* bertentangan dengan kenyataan atas perolehan hasil suara di Desa Lakologuo, Kecamatan Tongkuno yang dimenangkan PEMOHON, hal ini berdasarkan Formulir MODEL C.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kelurahan/Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno adalah sebagai berikut:

| KELURAHAN/DESA LAKOLOGUO | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| KECAMATAN TONGKUNO | | |
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| | | |

| | | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | JUMLAH |
|---------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 82 | 63 | 62 | 207 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 96 | 156 | 114 | 368 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 35 | 31 | 31 | 97 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 19 | 16 | 13 | 48 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 8 | 5 | 6 | 19 |
| | TOTAL SUARA SAH | 240 | 271 | 226 | 737 |
| (vide: Bukti T-14) | | | | | |

- 5) Bahwa karena tidak terdapat temuan/rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna yang mendukung dalil PEMOHON *a quo*, ditambah dengan kenyataan pada Desa Lakologou tersebut PEMOHONlah yang memenangkan perolehan suara di Kelurahan/Desa Lakologou. Kecamatan Tongkuno, maka beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkan dalil *a quo*.

3. Mengenai Money Politics di Kecamatan Parigi

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 19 angka 5 huruf B ke-4 poin 3.3 telah terjadi bagi-bagi uang di Desa Wakumoro senilai Rp.200.000,- perorang oleh masyarakat atas perintah Camat Parigi untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.

- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna, akan tetapi sampai pada jawaban ini diajukan tidak terdapat temuan pelanggaran tindak pidana atasnya sebagaimana dalil PEMOHON *a quo*;
- 3) Bahwa berkaitan dengan *money politics*, sesungguhnya TERMOHON sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisai kepada Masyarakat Kabupaten Muna berkaitan dengan bahaya *money politics* (**vide: Bukti T-48**).
- 4) Bahwa begitupula halnya jika dalil PEMOHON disesuaikan dengan perolehan suara di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi justru dimenangkan oleh PEMOHON. Artinya tudingan adanya jual beli suara *a quo* tidak relevan dengan perolehan hasil suara. Hal ini dapat dilihat dalam tabel perolehan suara berbasis Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kelurahan/Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi adalah sebagai berikut:

| KELURAHAN/DESA WAKUMORO | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|
| KECAMATAN PARIGI | | | | |
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | | |
| | | TPS 1 | TPS 2 | JUMLAH |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 97 | 62 | 159 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 97 | 91 | 188 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 9 | 3 | 12 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 1 | 2 | 3 |

| | | | | |
|---------------------------|---|-----|-----|-----|
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 1 | 0 | 1 |
| | TOTAL SUARA SAH | 205 | 158 | 363 |
| (vide: Bukti T-19) | | | | |

- 5) Bahwa dengan kenyataan tidak adanya peristiwa praktek politik uang sebagai temuan/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna di Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi ditambah lagi yang memenangkan perolehan suara pada TPS wilayah dimaksud adalah PEMOHON, maka dalil *a quo* menjadi beralasan bagi Mahkamah untuk dikesampingkan.

4. Mengenai *Money Politics* di Kecamatan Kontu Kowuna

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 19 angka 5 huruf B ke-4 poin 3.4 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi bagi-bagi uang di Desa Kontu Kowuna senilai Rp.200.000,- per orang atas perintah Kepala Desa Kontu Kowuna;
- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* adalah dalil yang fiktif. Alasan Termohon menyatakan fiktif sebab sampai saat ini tidak ada temuan dari Bawaslu Kabupaten Muna ataupun putusan pengadilan yang menyatakan adanya kejadian politik uang dimaksud;
- 3) Bahwa berkaitan dengan *money politics*, TERMOHON sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisai kepada Masyarakat Kabupaten Muna berkaitan dengan bahaya *money politics* **(vide: Bukti T-48)**.
- 4) Bahwa karena ketiadaan peristiwa *money politics* dimaksud sebagaimana tidak adanya temuan Bawaslu Kabupaten Muna, maka dalil *a quo* haruslah dipandang sebagai suatu dalil yang tidak pernah terjadi, maka beralasan bagi MAHKAMAH mengesampingkan dalil PEMOHON dimaksud.

5. Mengenai *Money Politics* di Kecamatan Maligano

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 20 angka 5 huruf B ke-4 poin 3.6 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi bagi-bagi uang Kowuna senilai Rp.200.000,- perorang di Desa Pohorua oleh seorang warga yang uangnya bersumber dari Kepala Desa Pohorua dan Kepala Sekolah Dasar Batukara dengan tujuan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;
- 2) Bahwa sesungguhnya dalil PEMOHON *a quo* sekaitan dengan *money politics* sangat mudah membuktikannya sebab penanganan atas pelanggaran politik uang merupakan ranah wewenang Bawaslu Kabupaten Muna, dan hingga saat ini tidak ada peristiwa politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabupten Muna sehubungan dengan dalil PEMOHON *a quo*;
- 3) Bahwa berkaitan dengan *money politics*, TERMOHON sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisai kepada Masyarakat Kabupaten Muna berkaitan dengan bahaya *money politics* (**vide: Bukti T-48**).
- 4) Bahwa berdasarkan Formulir D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI perolehan suara masing-masing Paslon di Kelurahan/Desa Pohorua, Kecamatan Maligano justru menunjukkan peraih suara terbanyak pada TPS wilayah dimaksud adalah PEMOHON. Sehingga dalil politik uang oleh PEMOHON *a quo* menjadi tidak relevan dengan hasil pemungutan suara. Secara rinci perolehan hasil pemilihan di Desa/Kelurahan Pohorua dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

| KELURAHAN/DESA POHORUA KECAMATAN MALIGANO | | | | |
|--|--|-----------------|----------|--------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | | |
| | | TPS 1 | TPS 2 | JUMLAH |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 118 | 115 | 233 |

| | | | | |
|---------------------------|--|-----|-----|-----|
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 103 | 138 | 241 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 2 | 1 | 3 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 1 | 2 | 2 |
| | TOTAL SUARA SAH | 229 | 260 | 489 |
| (vide: Bukti T-40) | | | | |

- 5) Bahwa dengan demikian karena tidak adanya bukti Politik Uang sebagaimana dalil *a quo*, maka sepatutnya MAHKAMAH menolak dalil tersebut;

6. Mengenai *Money Politics* di Kecamatan Napabalano

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 21 angka 5 huruf B ke-4 poin 3.7 pada pokoknya telah terjadi bagi-bagi uang senilai Rp.200.000,- per orang di Kelurahan Tampo, Kelurahan Napabalano, dan Desa Langkumapo yang dilakukan oleh pengurus Partai NasDem, Lurah Napabalano, dan oleh anggota KPPS untuk mempengaruhi pemilih memilih Paslon Nomor Urut 1;
- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* kabur sebab tidak menjelaskan secara detil siapakah subjek pelaku dimaksud. Apalagi perihal politik uang yang didalilkan tidak terdapat keadaan dimaksud sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna, padahal penanganan atas tindakan politik uang penanganannya menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Muna;
- 3) Bahwa berkaitan dengan *money politics*, TERMOHON sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisai kepada

masyarakat Kabupaten Muna berkaitan dengan bahaya *money politics* (**vide: Bukti T-48**).

- 4) Bahwa sesungguhnya jika memeriksa hasil perolehan suara pada TPS di Kecamatan Napabalano maka akan ditemukan beberapa Desa yang dimenangkan oleh PEMOHON. Hal ini menunjukkan dalil PEMOHON sekaitan politik uang di Kecamatan Napabalano menjadi tidak relevan. Bukti kemenangan PEMOHON pada TPS 6 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

| KELURAHAN/DESA NAPABALANO KECAMATAN NAPABALANO | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | | | | | | JUMLAH |
| | | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 165 | 186 | 180 | 188 | 241 | 161 | 1.121 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 134 | 166 | 162 | 147 | 157 | 165 | 931 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 87 | 64 | 50 | 69 | 9 | 38 | 317 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | 37 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | TOTAL SUARA SAH | 392 | 424 | 402 | 409 | 416 | 366 | 2.409 |
| (vide: Bukti T-49) | | | | | | | | |

- 5) Bahwa dengan ketiadaan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Muna perihal politik uang di wilayah sebagaimana dalil PEMOHON *a quo*, maka menjadi beralasan bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil *a quo*;

7. Mengenai *Money Politics* di Kecamatan Katobu

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 21 angka 5 huruf B ke-4 poin 3.8 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi bagi-bagi uang senilai Rp.200.000,- per orang dan bagi-bagi beras 5 Kg kepada warga di Kecamatan Katobu yang dilakukan oleh seorang Camat untuk mempengaruhi pemilih memilih Paslon Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* secara otoritatif adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna, hal mana hingga jawaban ini diajukan tak ada satu pun peristiwa politik uang sebagaimana dalil PEMOHON yang ditemukan dan tertangani oleh Bawaslu Kabupaten Muna;
- 3) Bahwa khusus berkaitan dengan *money politics*, TERMOHON telah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Kabupaten Muna berkaitan dengan bahaya *money politics* **(vide: Bukti T-48)**.
- 4) Bahwa dengan demikian karena peristiwa politik uang sebagaimana dalil PEMOHON *a quo* tidak ada sebagaimana ketiadaan kasus dimaksud yang tertangani oleh Bawaslu Kabupaten Muna, maka dalil PEMOHON haruslah ditolak.

8. Mengenai *Money Politics* di Kecamatan Kontunaga

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 21 s.d 22 angka 5 huruf B ke-4 poin 3.9 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ada pengalokasian uang sebesar Rp. 77.000.000.- oleh seorang Camat kepada team satgas Paslon Nomor Urut 1 untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di Kecamatan Kontunaga untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;
- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* tidak didukung dengan kenyataan adanya. Hal ini terukur dengan tidak adanya temuan Bawaslu Kabupaten Muna perihal peristiwa politik uang sebagaimana dalil PEMOHON *a quo*;
- 3) Bahwa berkaitan dengan *money politics*, TERMOHON sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisai kepada masyarakat Kabupaten Muna berkaitan dengan bahaya *money politics* (**vide: Bukti T-48**).
- 4) Bahwa dengan demikian karena peristiwa politik uang sebagaimana dalil PEMOHON *a quo* tidak ada sebagaimana ketiadaan kasus dimaksud yang tertangani oleh Bawaslu Kabupaten Muna, maka dalil PEMOHON haruslah ditolak.

9. Mengenai *Money Politics* di Kecamatan Batukara

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 20 angka 5 huruf B ke-4 poin 3.6 yang pada pokoknya bahwa terjadi pembagian untuk sebesar Rp. 200.000,- per orang di Desa Bone-Bone, Kecamatan Maligano untuk mempengaruhi pemilih memilih Paslon Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* kabur, sebab pada Kecamatan Maligano tidak terdapat Desa Bone-Bone. Melainkan keberadaan Desa Bone-Bone berada pada Kecamatan Batukara.
- 3) Bahwa karena dalil politik uang yang didalilkan tidak jelas *locus* kejadiannya, maka menjadi tidak relevan bagi MAHKAMAH untuk mengadili dalil *a quo*.

D. MENGENAI PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMILIHAN *IN CASU* TERMOHON

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya menguraikan beberapa pelanggaran administrasi dan kampanye yang selanjutnya akan diuraikan ke dalam subbab sebagai berikut:

1. Mengenai TERMOHON Secara Terang-Terangan Mendukung Paslon Nomor Urut 1

1.1. Mencetak Buku Visi-Misi

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 25 huruf C angka 1 poin 1.1 mendalilkan yang pada pokoknya TERMOHON saat mencetak buku visi-misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna pada halaman pertama visi-misi Paslon Nomor Urut 1 terdapat logo Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang menurut PEMOHON, seharusnya TERMOHON tidak mencetak dan tidak membagikan buku visi-misi tersebut karena terdapat logo Pemda Kabupaten Muna.
- 2) Bahwa PEMOHON telah melaporkan peristiwa yang didalilkan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Muna dan diteruskan ke DKPP. Namun atas laporan PEMOHON oleh DKPP telah menyatakan gugur pada verifikasi administrasi (**vide: Bukti T-50**).
- 3) Bahwa faktualnya, desain visi-misi untuk setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap Operator Sistem Pencalonan (SILON) Paslon melalui aplikasi SILON Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sikap TERMOHON hanya melakukan pengunduhan atas file visi-misi yang telah di upload tersebut dan tidak melakukan perubahan ataupun pengurangan atas seluruh file visi-misi yang di upload oleh masing-masing Operator SILON masing-masing Paslon, sehingga originalitas akan file visi-misi tiap Paslon tersebut masih terjaga.

4) Bahwa buku visi misi Pihak Terkait yang memuat logo Kabupaten Muna dalam pandangan TERMOHON bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, sebab jika kita memeriksa Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) dokumen administrasi pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan *a quo* juga memuat logo Pemerintah Kabupaten. Hal ini misalnya dapat dilihat pada gambar Surat Suara, Daftar Pasangan Calon, Formulir Model C Hasil dibawah ini:



Speciment Daftar Pasangan Calon

(vide: Bukti T-52)

**BERTAKA, SERTIFIKAT, DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGKUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024**

**MODEL
C.HASIL-KUK-
SURATI**
Halaman 1 dari 4

Formulir Model C-Hasil

Provinsi : **SULAWESI TENGGARA** Kecamatan / Distrik :
Kabupaten : **MUNA** Kelurahan / Desa :
Nomor TPS :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

| URAIAN | LAKI-LAKI (L) | PEREMPUAN (P) | JUMLAH (L+P) |
|---|---------------|---------------|--------------|
| A. DATA PEMILIH | | | |
| Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-Kartu Daftar Pemilih) | | | |
| B. PENGGUNA HAK PILIH | | | |
| 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | | |
| 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindah (DPPH) | | | |
| 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTK) | | | |
| 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3) | | | |

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

| URAIAN | JUMLAH |
|---|--------|
| 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS | |
| 2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih | |
| 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos | |
| 4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan | |

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

| URAIAN | LAKI-LAKI (L) | PEREMPUAN (P) | JUMLAH (L+P) |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | | | |

IV. NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGKUTAN SUARA

| KEJUA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

| 1. | 2. | 3. |
|----|----|----|
| | | |
| | | |

(vide: Bukti T-53)

Provinsi : [NAMA PROVINSI] Kecamatan / Distrik : **NAMA KECAMATAN**
Kabupaten / Kota : **NAMA KABUPATEN/KOTA** Kelurahan / Desa : **NAMA KELURAHAN / DESA**
Nomor TPS : **27 (DUA PULUH TUJUH)**

**MODEL
C.HASIL-KUK-
GUBERNUR**
Halaman 3 dari 3

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1 + IV.2) **SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN** **1 9 8**

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

| URAIAN | JUMLAH |
|--|-----------|
| Jumlah Suara Tidak Sah (S-TS) | 60 |
| Jumlah Suara Sah (S-S) | 30 |
| Jumlah Suara Tidak Sah (S-TS + S-S) | 90 |

C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (VA + VB) **DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN** **2 8 8**

DITETAPKAN DI : **NAMA TEMPAT PELAKSANAAN** TANGGAL : **27** BULAN : **11** TAHUN : **2024**

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGKUTAN SUARA

| 1. KEJUA | 2. ANGGOTA | 3. ANGGOTA | 4. ANGGOTA | 5. ANGGOTA | 6. ANGGOTA | 7. ANGGOTA |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| NAMA KPPS | NAMA KPPS | NAMA KPPS | NAMA KPPS | NAMA KPPS | NAMA KPPS | NAMA KPPS |

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

| 1. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR | 2. NAMA CALON GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR |
|---|---|
| NAMA SAKSI PASLON | NAMA SAKSI PASLON |

(vide: Lampiran Keputusan KPU 1774/2024)

- 5) Bahwa sesungguhnya dalil permohonan PEMOHON *a quo* adalah dalil yang sifatnya glosarium, seolah lambang Kabupaten Muna adalah personifikasi dari PIHAK TERKAIT. Logika PEMOHON demikian adalah keliru adanya, sebab logo Kabupaten Muna adalah simbol yang mewakili daerah Kabupaten Muna sebagai wilayah yang sedang menyelenggarakan pemilihan *a quo*;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum untuk Mahkamah menolak dalil Permohonan *a quo*.

1.2 Mengenai Pemasangan Baliho dan Spanduk “AJAKAN MEMILIH”

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 26 huruf C angka 1 poin 1.2 mendalilkan yang pada pokoknya adalah TERMOHON mencetak Baliho yang berisi tulisan “UNTUK MEMILIH I” yang diasumsikan oleh PEMOHON bahwa tulisan tersebut sebagai seruan kepada Masyarakat Kabupaten Muna untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 dan atas Baliho tersebut telah dilakukan pemasangan atas Baliho tersebut diseluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Muna pada tanggal 24 Desember 2024;
- 2) Bahwa memang benar TERMOHON telah mencetak baliho dan spanduk berupa seruan untuk datang ke TPS pada Rabu, 27 November 2024. Akan tetapi, dalam seruan tersebut tidak ada narasi untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON;
- 3) Bahwa melalui jawaban ini kami sampaikan, pada tanggal 18 November 2024, TERMOHON telah menerima desain Baliho dan spanduk “AYO DATANG KE TPS” pada Pemilihan Serentak 27 November 2024 dari CV. IRDA UTAMA KENDARI yang dikirim kepada TERMOHON. Berikut desain Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS”:



- 4) Bahwa setelah TERMOHON berkontrak dengan CV. IRDA UTAMA, maka disepakati bahwa CV. IRDA UTAMA untuk mencetak Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS” pada Pemilihan Serentak Rabu, 27 November 2024 dengan detail jumlah yang dicetak, yaitu Baliho 66 (enam puluh enam) buah dan Spanduk 450 (empat ratus lima puluh) buah.
- 5) Bahwa pada tanggal 22 November 2024 seluruh Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS” pada Pemilihan Serentak Rabu, 27 November 2024 yang dicetak oleh CV. IRDA UTAMA telah selesai dan telah diserahkan kepada TERMOHON. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2024, TERMOHON langsung mendistribusikan seluruh Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS” menyerahkan kepada PPK dan PPS melalui PPK untuk dipasang di wilayah kerja masing-masing PPK dan PPS, dengan ketentuan:
 - a. Baliho dipasang di wilayah kerja PPK dengan jumlah 3 buah per kecamatan;
 - b. Spanduk dipasang di wilayah kerja PPS dengan jumlah 20 buah per desa/kelurahan.

Bahwa pemasangan Baliho dan Spanduk “AYO KE TPS” tersebut dilakukan pada tanggal 23 s.d 24 November 2024.
- 6) Bahwa pada tanggal 24 November 2024, TERMOHON melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel DJ Raha yang dihadiri oleh Liaison Office (LO) masing-masing Paslon Bupati dan Wakil

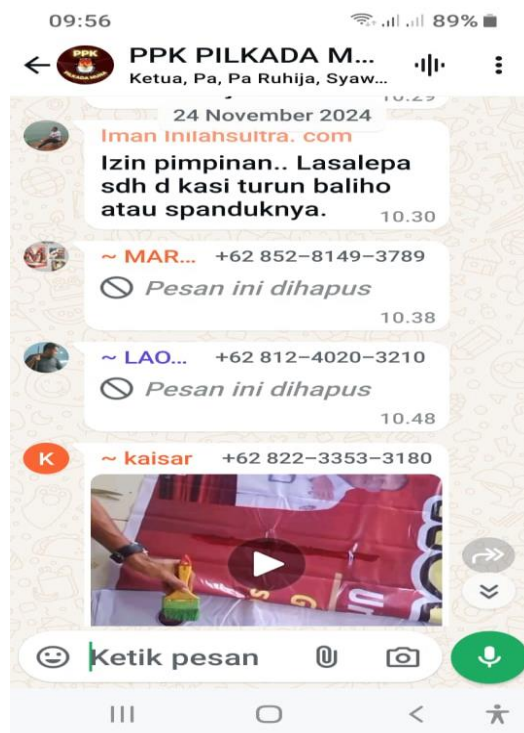
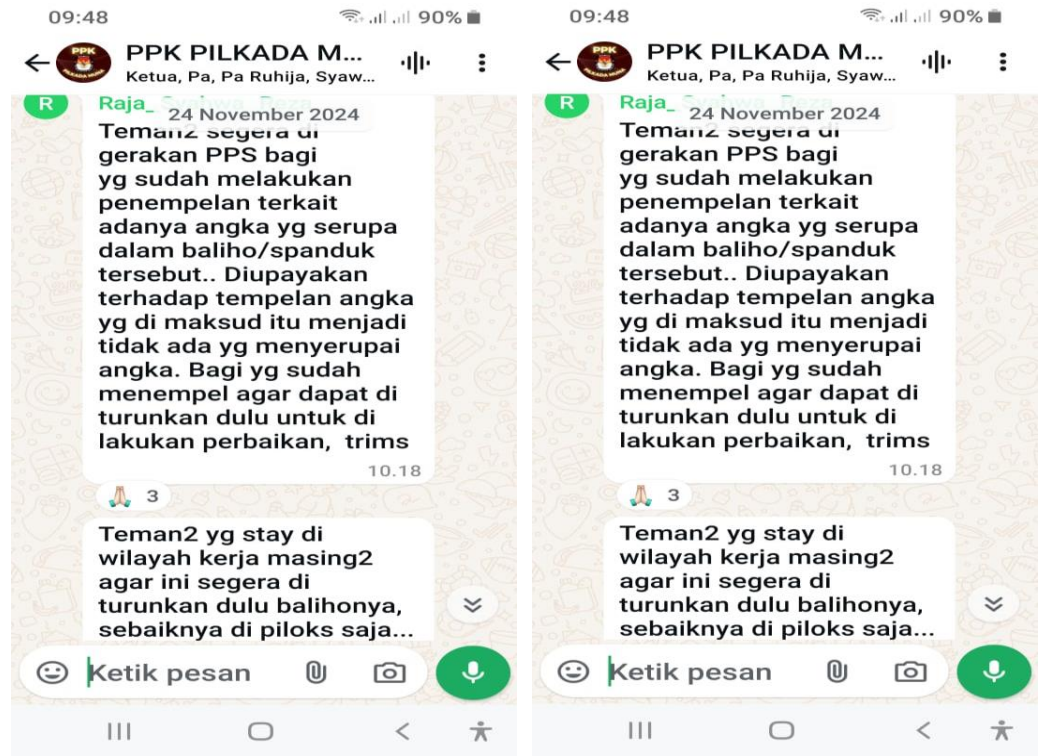
Bupati Muna. Termasuk yang hadir pada saat itu adalah LO PEMOHON atas nama MUHAMMAD RAYU WELENDO.

- 7) Bahwa dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 tersebut LO PEMOHON atas nama MUHAMMAD RAYU WELENDO menyampaikan keberatan atas Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS” pada Pemilihan Serentak Rabu, 27 November 2024 yang telah terpasang pada beberapa kecamatan dan desa karena tulisan didalam Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS” tersebut khususnya pada kalimat setelah “UNTUK MEMILIH” terdapat garis vertikal berwarna putih yang menyerupai angka 1. Sehingga saat itu LO PEMOHON mengasumsikan bahwa Baliho dan Spanduk yang telah terpasang tersebut adalah AJAKAN MEMILIH untuk Paslon Nomor Urut 1.

Berikut ini hal yang dipersoalkan oleh PEMOHON atas Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS”:



- 8) Bahwa atas keberatan LO PEMOHON tersebut seketika itu terjadi kesepakatan antara TERMOHON dengan Tim Paslon Nomor Urut 2 (PEMOHON), sehingga TERMOHON langsung memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk menurunkan Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS”, melalui grup-grup WhatsApp PPK dan telah dilakukan, yakni:



(vide: Bukti T-54)

- 9) Bahwa perintah TERMOHON untuk segera menurunkan seluruh Baliho dan Spanduk "AYO DATANG KE TPS" yang telah terpasang akibat adanya keberatan oleh Saksi PEMOHON,

masing-masing Ketua PPK se-Kecamatan di Kabupaten Muna telah memberikan pernyataan telah menurunkan Baliho dan Spanduk tersebut pada tanggal 24 November 2024, sebagai berikut:

- a. Ketua PKK Kecamatan Bone atas nama WA ODE NURLANSI, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 11.30 WITA (**vide: Bukti T-55**)
- b. Ketua PKK Kecamatan Kabangka atas nama LA ODE BAIDAR, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.14 WITA (**vide: Bukti T-56**)
- c. Ketua PKK Kecamatan Kabawo atas nama MUHAMMAD WAHYUDI, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.20 WITA (**vide: Bukti T-57**)
- d. Ketua PKK Kecamatan Batalaiworu atas nama ARDIN, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.30 WITA (**vide: Bukti T-58**)
- e. Ketua PKK Kecamatan Batukara atas nama LA ODE MUHAMMAD SAFRI, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.25 WITA (**vide: Bukti T-59**)
- f. Ketua PKK Kecamatan Duruka atas nama SYAWAL DANUWIJAYA HUTA, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.30 WITA (**vide: Bukti T-60**)
- g. Ketua PKK Kecamatan Kontunaga atas nama LA SANUSI, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.00 WITA (**vide: Bukti T-61**)
- h. Ketua PKK Kecamatan Lasalepa atas nama LA IMAN SUPA, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.00 WITA (**vide: Bukti T-62**)
- i. Ketua PKK Kecamatan Lohia atas nama SUPRIK LA NIA, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.14 WITA (**vide: Bukti T-63**)
- j. Ketua PKK Kecamatan Maligano atas nama ASRUNT, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.20 WITA (**vide: Bukti T-64**)

- k. Ketua PKK Kecamatan Napabalano atas nama LA HARUDIN, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 08.30 WITA (**vide: Bukti T-65**)
 - l. Ketua PKK Kecamatan Parigi atas nama LA ODE RAHMAN, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 08.30 WITA (**vide: Bukti T-66**)
 - m. Ketua PKK Kecamatan Pasir Putih atas nama LA RUHIJA, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 09.00 WITA (**vide: Bukti T-67**)
 - n. Ketua PKK Kecamatan Wakorumba Selatan atas nama MUHAMMAD GUSRIL VIRISI, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.00 WITA (**vide: Bukti T-68**)
 - o. Ketua PKK Kecamatan Kontukowuna atas nama NORFAN JAYA, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.00 WITA (**vide: Bukti T-69**)
 - p. Ketua PKK Kecamatan Watopute atas nama LA ODE MIRFAN ZAELAND, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 09.30 WITA (**vide: Bukti T-70**)
 - q. Ketua PKK Kecamatan Tongkuno Selatan atas nama MUHAMAD ALAMSYAH HULU, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.14 WITA (**vide: Bukti T-71**)
 - r. Ketua PKK Kecamatan Tongkuno atas nama ILHAM KARIZAL, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.00 WITA (**vide: Bukti T-72**)
 - s. Ketua PKK Kecamatan Towea atas nama SARIF, menurunkan Baliho dan Spanduk pada Jam 10.00 WITA (**vide: Bukti T-73**)
- 10) Bahwa berkaitan dengan terdapatnya garis vertikal berwarna putih pada ujung kalimat “UNTUK MEMILIH” yang diasumsikan PEMOHON sebagai ajakan memilih untuk Paslon Nomor Urut 1 adalah murni kesalahan percetakan yang dilakukan oleh CV. IRDA UTAMA. Karena sesungguhnya garis vertikal berwarna putih yang terdapat pada ujung kalimat “UNTUK MEMILIH” adalah gambar kotak segi empat yang dimaksudkan bahwa kalimat “UNTUK

MEMILIH” itu berada di dalam kotak segi empat yang dimaksudkan. Hal itu sebagaimana telah dinyatakan klarifikasi pada tanggal 26 November 2024 oleh CV. IRDA UTAMA (**vide: Bukti T-74**);

- 11) Bahwa kesalahan percetakan atas Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS” yang terdapat garis vertikal warna putih pada ujung kalimat “UNTUK MEMILIH” menyerupai angka 1 tersebut juga terjadi di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni:



- 12) Bahwa berdasarkan kronologi kejadian tersebut, maka sesungguhnya TERMOHON tidak terbukti melakukan keberpihakan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 dengan cara mencetak Baliho dan Spanduk dengan bertuliskan “UNTUK MEMILIH” yang terdapat garis vertikal berwarna putih yang menyerupai angka 1 sebagaimana yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya. Sebab, berkaitan dengan terdapatnya garis lurus vertikal berwarna putih dalam Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS” tersebut adalah kesalahan percetakan yang dilakukan oleh CV. IRDA UTAMA yang mana seharusnya garis lurus berwarna putih vertikal itu harusnya berbentuk kota persegi yang didalamnya berisi tulisan “UNTUK MEMILIH”. Akan tetapi, karena garis melintangnya yang menghubungkan garis vertikal tersebut tertutupi oleh latar merah sehingga tidak nampak. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kolaka Utara.

- 13) Bahwa selain atas keadaan yang sebenarnya terjadi tersebut di atas, juga tidak ada temuan ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna berkaitan dengan Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS” yang telah dicetak dan terpasang mulai tanggal 23 s.d 24 November 2024.
- 14) Bahwa selain itu juga, sikap profesionalitas TERMOHON atas keberatan PEMOHON *a quo* telah ditunjukkan dengan cara langsung menurunkan Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS” atas adanya kesalahan percetakan tersebut pada hari yang sama setelah keberatan yang diajukan oleh LO PEMOHON, yakni pada tanggal 24 November 2024.
- 15) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti TERMOHON melakukan keberpihakan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 1 olehnya itu beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohon *a quo*.

1.3 Mengenai Tidak Menertibkan Baliho Paslon Nomor Urut 1 Sampai Dengan Selesaiannya Pemilihan

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 26 huruf C angka 1 poin 1.3 mendalilkan yang pada pokoknya adalah TERMOHON tidak menertibkan Baliho Paslon Nomor Urut 1 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan.
- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* adalah berulang, dan telah TERMOHON uraikan pada halaman 35 angka 5 mengenai Pemasangan Baliho PIHAK TERKAIT yang Memuat Program Kerja dan telah terperinci telah TERMOHON jelaskan dari poin 1) s.d 13). Yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban untuk menurunkan APK dibebankan kepada masing-masing Paslon dan bukan kepada TERMOHON. Tugas yang diberikan kepada TERMOHON adalah melakukan koordinasi kepada Bawaslu, Polres, Dandim, Kesbangpol dan telah dilakukan oleh TERMOHON.

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena dalil PEMOHON *a quo* adalah berulang dan telah dijawab secara komprehensif oleh TERMOHON sebelumnya, dengan demikian terhadap dalil PEMOHON mestilah di tolak.

1.4 Mengenai Perekrutan PPK dan KPPS yang lebih banyak bersumber dari ASN dan Honorer di Lingkup Pemda Kabupaten Muna.

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 26 s.d 27 huruf C angka 1 poin 1.4 mendalilkan yang pada pokoknya adalah TERMOHON melakukan perekrutan anggota PPS dan KPPS mayoritas dari kalangan ASN dan tenaga honorer di Lingkup Pemda Kabupaten Muna.
- 2) Bahwa sesungguhnya dalil PEMOHON tidak relevan untuk diadili oleh Mahkamah, sebab PEMOHON sendiri dalam dalilnya pada halaman 26 s.d 27 mengakui bahwa berkaitan dengan perekrutan PPS dan KPPS dari kalangan ASN dan honorer dikalangan Pemda Kabupaten Muna bukanlah yang yang menyimpang. Hal itu dapat dilihat dalam dalil PEMOHON halaman 26 s.d 26 pada poin 1.4, yang kami kutip sebagai berikut:

*Bahwa TERMOHON melakukan perekrutan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPP) banyak dari kalangan Aparatur Sipil Negara dan tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. **Kendati secara normatif tidak ada yang salah dengan TERMOHON,** namun mengingat Calon Nomor Urut 1 adalah calon petahana, untuk menjaga netralitas dan independensi penyelenggaraan Pemilihan, seharusnya TERMOHON membatasi atau tidak boleh menerima anggota PPS dan anggota KPPS dari kalangan ASN dan Honorer dari Lingkungan Pemda Muna...*

3) Bahwa secara hukum pelibatan ASN sebagai anggota Badan Adhoc Penyelenggara baik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 diperbolehkan sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU 7/2017) menyebutkan:

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, **Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS;
- b. Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
- c. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundangundangan Pemilu;
- d. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- e. Kelancaran transportasi pengiriman logistik;
- f. Pemantauan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu; dan
- g. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

4) Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 434 UU 7/2017, dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya, KPU RI telah berkirin surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tanggal 18 November 2022 dengan Nomor Surat 1164/PP.04-SD/2022 Perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 hal mana dalam Surat KPU RI tersebut salah satu diantaranya meminta agar Kemendagri dapat memberikan izin bagi ASN di Lingkup Pemerintah Daerah untuk mendaftarkan diri sebagai PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih (**vide: Bukti T-75**);

- 5) Bahwa atas surat KPU RI tersebut, Kemendagri pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Surat Nomor 900.1.9/9095/SJ Perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada angka 3 surat tersebut telah memberikan izin kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memberikan dukungan pemberian izin bagi ASN di lingkup Pemerintah Daerah (**vide: Bukti T-76**). Selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*...bersama ini, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota **agar memberikan dukungan** sebagai berikut:*

3. Pemberian izin bagi ASN di Pemerintah Daerah untuk mendaftar sebagai PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih,
khususnya dalam hal ketidakterediaan pendaftar dari Masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas yang berada di daerah tertinggal, terluas dan terdepan.

- 6) Bahwa pada masa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, perlakuan yang sama pula diterapkan dalam hal Pembentukan Badan *Ad Hoc* yang melibatkan ASN lingkup Pemda. Sebagaimana KPU RI pada tanggal 21 April 2024 melalui Surat Nomor 613/SDM.12-SD/04/2024 Perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (**vide: Bukti T-77**);
- 7) Bahwa selain telah mendapatkan izin dari Mendagri sebagai Kementerian yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian, apabila melihat persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pun tidak mempersyaratkan wajibnya seseorang yang berstatus ASN untuk mengundurkan diri. Selengkapnya mengenai

syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS telah diatur secara *expressive verbis* di dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU 8/2022) yakni sebagai berikut:

Syarat untuk mejadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;*
 - b. Barusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
- 8) Bahwa selanjutnya ASN ataupun Non-ASN yang bekerja dilingkup Pemda Kabupaten/Kota atau Kelurahan/Desa diperbolehkan menjadi anggota PPK dan KPPS dapat dilihat di dalam Pasal 58 dan Pasal 69 PKPU 8/2022 sebagai berikut:

Pasal 58 PKPU 8/2022

- (1) Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang **berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota**
- (2) Sarana dan prasarana kesekretariatan PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 69 PKPU 8/2022

- (1) Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang **berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.**
- (2) Sarana dan prasarana kesekretariatan PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

- 9) Bahwa secara teknis ASN maupun non-ASN (honorar) lingkup Pemda/Kelurahan/Desa diperbolehkan menjadi anggota PPK, PPS dan KPP juga diatur di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Keputusan KPU 67/2023) halaman 41 untuk PPK dan halaman 45 untuk PPS, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Keputusan KPU 67/2023, halaman 41

- a. Sekretariat PPK dipimpin oleh seorang sekretaris PPK yang berasal dari aparatur sipil negara pemerintah daerah dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK yang berasal dari aparatur sipil negara/non-aparatur sipil negara.

Bahkan salah satu persyaratan untuk menjadi Sekretariat PPK atau staf PPK yang berasal dari ASN maupun Non-ASN mesti melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai ASN atau keputusan pengangkatan, kontrak kerja atau sebutan lain bagi non-ASN (vide: Keputusan KPU 67/2024, halaman 43 angka 3.

Keputusan KPU 67/2023, halaman 45

a. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris PPS dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bahkan salah satu persyaratan untuk menjadi Sekretariat PPS atau staf PPS yang berasal dari ASN maupun Non-ASN mesti melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai ASN atau keputusan pengangkatan, kontrak kerja atau sebutan lain bagi non-ASN (vide: Keputusan KPU 67/2024, halaman 46 angka 3.

10) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka secara hukum pengangkatan anggota PPK, PPS, maupun KPPS yang berasal dari ASN ataupun Non-ASN (honorar) dari lingkup Pemda dibenarkan secara hukum. Olehnya itu, beralasan bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

1.5 Mengenai Kecurangan yang Terjadi di Beberapa TPS yang dilakukan oleh Anggota KPPS pada Beberapa Kecamatan dan Banyak Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 27 s.d 28 huruf C angka 2 tabel V mendalilkan yang pada pokoknya adalah KPPS di beberapa Kecamatan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terjadi di 7 kecamatan yakni:

| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | TPS | BENTUK TINDAKAN |
|----|-----------|--------------------|-----|-----------------|
|----|-----------|--------------------|-----|-----------------|

| | | | | |
|---|------------|------------|-----|--|
| 1 | LASALEPA | LABONE | 003 | KPPS membatasi pemilih yang terdaftar dalam DPT atas nama WA ODE NIA untuk memilih |
| 2 | NAPABALANO | TAMPO | 001 | <ul style="list-style-type: none"> • KPPS membiarkan ODGJ atas nama LA DUMA menggunakan hak pilihnya • KPPS memberikan kesempatan kepada 3 orang pemilih yang tidak terdata di DPT atas nama JULIANTI, MUJAHIT dan HASTIERNI |
| | | | 003 | KPPS mencoblos kertas suara untuk pemilih atas nama LA FIIDI dengan alasan sakit |
| | | NAPABALANO | 005 | KPPS memberikan kesempatan pemilih atasn nama DWI YANTI untuk menggunakan hak pilihnya |
| | | PENTIRO | 001 | KPPS membiarkan pemilih memilih lebih dari 1 kali melalui jalur DPK atas nama SITI RAHMAWATI ODE dan SAHABUL HIJI |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-----|---|
| 3 | LOHIA | KONDONGIA | 2 | Ada pemilih ganda atas nama LA ODE RONAL |
| | | | 3 | Ada pemilih ganda atas nama LA ODE RONAL dan WA ODE RAHMAT GUSTI |
| | | LOHIA | 1 | Pemilih memilih tetapi tidak terdata dalam DPT atas nama LA ODE MILA dan WA UCI |
| | | | 2 | Adanya ketidakcocokan antara C1-Plano, C1-Salinan Daftar Hadir dengan Surat Suara Sah |
| 4 | TOWEA | LAKARAMA | 002 | Kekeliruan memasukkan sampul C Hasil Salinan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati |
| | | BONTU-BONTU | 003 | Kekeliruan memasukkan sampul C Hasil Salinan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati |
| 5 | BATALAIWORU | LAIWORU | 006 | KPPS membuka kotak suara dan menumpahkannya ke lantai |
| 6 | TONGKUNO | OEMPU | 1 | Kesalahan penulisan C-HASIL terkait jumlah sisa surat suara |

Terhadap kesalahan KPPS di 7 kecamatan tersebut di atas TERMOHON membantahnya, dengan penguraian sebagai berikut:

a. **Mengenai peristiwa di Kecamatan Lasalepa, Desa Labone, TPS 003 KPPS membatasi pemilih yang terdaftar dalam DPT atas nama WA ODE NIA untuk memilih**

- 1) Bahwa berdasarkan data pemilih terdapat 2 (dua) orang yang bernama WA ODE NIA di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Yang membedakan diantara keduanya adalah dari segi umur. WA ODE NIA umur 57 tahun dan WA ODE NIA umur 41 tahun.
- 2) Bahwa WA ODE NIA umur 57 tahun terdata sebagai pemilih DPT pada TPS 002 Desa Labone, Kecamatan Lasalepa (**vide: bukti T-78**), Sedangkan WA ODE NIA umur 41 tahun terdata sebagai pemilih di DPT pada TPS 003 Desa Labone, Kecamatan Lasalepa (**vide: bukti T-79**).
- 3) Bahwa WA ODE NIA umur 57 pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024 yang seharusnya menyalurkan hak pilihnya pada TPS 002, ternyata mendatangi TPS 003. Hal itu diketahui oleh anggota KPPS 4 berdasarkan Tanda Terima Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN yang disetorkan saat hendak akan memilih (**vide: bukti T-80**). Sehingga saat itu oleh anggota KPPS 4 menyampaikan kepada WA ODE NIA umur 57 tahun bahwa berdasarkan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN yang dimilikinya salah mendatangi TPS, seharusnya ia mendatangi TPS 002 bukan pada TPS 003.
- 4) Bahwa WA ODE NIA umur 41 yang terdaftar pada TPS 003 pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024 datang ke TPS 003 tempat ia terdaftar sebagai DPT Pemilih. Kemudian WA ODE NIA umur 41 menyetorkan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada anggota KPPS yang bertugas dan menunggu antrian untuk dipanggil namanya guna menyalurkan hak pilihnya (**vide: Bukti T-81**). Akan tetapi, dikarenakan nama WA ODE NIA umur 41 tahun lama

terpanggil karena belum tiba gilirannya, sehingga ia meninggalkan TPS 003.

Dan saat giliran nama WA ODE NIA umur 41 tahun telah tiba untuk menyalurkan hak pilihnya, Ketua KPPS memanggil nama WA ODE NIA umur 41 tahun sampai dengan 3 (tiga) kali pemanggilan. Namun, WA ODE NIA umur 41 tahun tidak kunjung hadir. Justru, WA ODE NIA umur 57 tahun yang terdaftar di TPS 002 datang kembali ke TPS 003 karena mendengar nama WA ODE NIA yang dipanggil oleh Ketua KPPS. Sehingga WA ODE NIA umur 57 tahun menganggap nama WA ODE NIA yang diserukan oleh Ketua KPPS tersebut adalah dirinya, sehingga ia langsung menanda tangani Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK pada nama WA ODE NIA umur 41 tahun. Lalu, anggota KPPS memberikan 2 (dua) lembar surat suara pemilihan, yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- 5) Bahwa pada sekira Pukul 12.00 WITA, WA ODE NIA umur 41 tahun mengeluh kepada anggota KPPS karena namanya belum juga dipanggil-panggil untuk menyalurkan hak pilihnya. Atas keluhan tersebut, anggota KPPS mengidentifikasi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK ternyata nama WA ODE NIA sudah ditanda tangani.
- 6) Bahwa setelah diketahui bahwa telah terdapat tanda tangan di atas nama WA ODE NIA umur 41 tahun padahal ia belum menyalurkan hak pilihnya, maka anggota KPPS menyampaikan kepada WA ODE NIA umur 41 tahun tersebut untuk menunggu sambil anggota KPPS mengidentifikasi terkait tanda tangan di Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK tersebut. Akan tetapi, WA ODE NIA umur 41 tahun memilih untuk pulang ke rumahnya.

- 7) Bahwa atas kejadian tersebut, PPK Kecamatan Lasalepa dan PPS sudah berkoordinasi dengan pihak Panwascam untuk menyamakan persepsi tentang peristiwa tersebut agar bisa diselesaikan ditingkat TPS.
- 8) Bahwa selanjutnya oleh Panwascam menyampaikan bahwa selama WA ODE NIA umur 57 tahun tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS 002, maka dituangkan dalam kejadian khusus. Atas arahan Panwascam tersebut, anggota KPPS di TPS 003 langsung membuat kejadian khusus (**vide: Bukti T-82**).

Sementara pada pengadministrasian Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 003 Desa Labone tempat WA ODE NIA umur 57 tahun menyalurkan hak pilihnya dimasukkan ke dalam kategori pemilih DPT sehingga jumlah pemilih DPT pada TPS 003 Desa Labone adalah 434. Untuk itu, pada kolom Pemilih DPK tidak isi sehingga berjumlah 0. Hal itu sebagaimana dapat dilihat pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 003 Desa Labone, Kecamatan Lasalepa sebagai berikut (**vide: Bukti T-83**):

MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI

BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

pada hari ini tanggal 09 Februari 2024 di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, yang dihadiri oleh Saksi dan Ketua Pemantau Kelurahan/Desa (Pengawas TPS) bertempat di:

Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan / Distrik : LASALEPA
 Kabupaten : MUNA Kelurahan / Desa : LABONE
 Nomor TPS : 003 / 103

Penghitungan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membaca Kwart Penghitungan Suara, membaca kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan penghitungan dan penghitungan suara, memeriksa dan membandingkan surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih, dimulai pada pukul 07.00 s.d. 07.00 waktu setempat.

Hasil Penghitungan Suara dimulai pada 07.00 s.d. 07.00 waktu setempat di hari yang sama (setelaha). Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

| URAIAN | LAKELAKI (L) | PEREMPUAN (P) | JUMLAH (L+P) |
|---|--------------|---------------|--------------|
| A. DATA PEMILIH | | | |
| Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih) | 277 | 295 | 572 |
| B. PENGGUNA HAK PILIH | | | |
| 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 195 | 239 | 434 |
| 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) | X | X | X |
| 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) | X | X | X |
| 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3) | 195 | 239 | 434 |

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

| URAIAN | JUMLAH |
|---|--------|
| 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS | 597 |
| 2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih | 434 |
| 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos | X |
| 4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan | 163 |

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

| URAIAN | LAKELAKI (L) | PEREMPUAN (P) | JUMLAH (L+P) |
|---|--------------|---------------|--------------|
| Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | X | X | X |


REDA DAN TANDA TANGAN SELURUH PEMERINTESKARA PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketua KPPS: *[Signature]*
 2. Anggota KPPS: *[Signature]*
 3. Anggota KPPS: *[Signature]*
 4. Anggota KPPS: *[Signature]*
 5. Anggota KPPS: *[Signature]*
 6. Anggota KPPS: *[Signature]*
 7. Anggota KPPS: *[Signature]*

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PEMILIHAN (ALIM BUKTI DAN WAKIL BUPATI)

1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*
 6. *[Signature]*
 7. *[Signature]*

- 9) Bahwa pada tingkat kecamatan, telah dilakukan perbaikan atas kesepakatan bersama antara PPK dan Panwascam Kecamatan Lasalepa serta Saksi Paslon, yang mana peristiwa WA ODE NIA umur 57 tahun yang memilih di TPS 003 Desa Labone tersebut seharusnya dicatatkan pada pemilih tambahan (DPK) sehingga yang semula pencatatan pada pemilih DPK di Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI adalah 0 pada tingkat kecamatan diubah menjadi 1 pada kolom pemilih DPK dengan jenis kelamin perempuan. Serta terhadap pencatatan jumlah pemilih tetap pada TPS 003 Desa Labone yang sebelumnya dicatatkan berjumlah 434 pada tingkat kecamatan menjadi 433. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-KWK-BUPATI sebagai berikut berikut (**vide: Bukati T-84**):


 Kecamatan : LASALEPA
 Kabupaten / Kota : MUNA
 Provinsi : SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN MODEL
 D. HASIL-KECAMATAN-KWK-BUPATI/Wakilera Halaman
 1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
 KELURAHAN/.....: LABONE

| NO. | URAIAN | BUNCAH | | | |
|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| | | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | JUMLAH AKHIR |
| 1 | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |

- 10) Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON membatasi pemilih tidak berkesesuaian dengan fakta tersebut di atas. Terlebih lagi, Saksi PEMOHON pada TPS 003 Desa Labone, Kecamatan Lasalepa telah menyetujui atas seluruh hasil dan pencatatan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 003 Desa Labone, hal itu terukur dengan diberikannya tanda tangan oleh Saksi PEMOHON pada Formulir MODEL C.HASIL-

KWK di TPS 003 Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, sebagai berikut (**vide: Bukti: T-83**).

| NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ketua [Signature] | 2. Anggota [Signature] | 3. Anggota [Signature] | 4. Anggota [Signature] | 5. Anggota [Signature] | 6. Anggota [Signature] | 7. Anggota [Signature] |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PUPUK DAN WAKEL SUPAKI | | | | | | |
| 1. [Signature] | 2. [Signature] | 3. [Signature] | 4. [Signature] | 5. [Signature] | 6. [Signature] | 7. [Signature] |

11) Bahwa berdasarkan uraian kronologis peristiwa tersebut di atas, maka tidak benar TERMOHON menghalangi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 003, Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, karena masalah WA ODE NIA telah terselesaikan ditingkat KPPS dan PPK. Terlebih lagi Saksi PEMOHON telah menyetujui hasil di TPS a quo dengan membubuhkan tanda tangannya. Olehnya itu, maka terhadap dalil PEMOHON a quo mestilah ditolak oleh Mahkamah.

b. Mengenai Peristiwa di Kecamatan Napabalano, Kelurahan Tampo, TPS 001 KPPS membiarkan ODGJ atas nama LA DUMA No. DPT 190 menggunakan hak pilihnya

- 1) Bahwa saat dilakukan ceklik oleh KPSS di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano. Pemilih atas nama LA DUMA tidak sedang dalam keadaan sakit termasuk tidak dalam keadaan gangguan kejiwaan. Sehingga pemilih atas nama LA DUMA telah dimasukkan ke dalam DPT dengan Nomor 190 dan terdaftar di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano.
- 2) Bahwa saat hari pemilihan tanggal 27 November 2024, pihak keluarga pemilih atas nama LA DUMA meminta kepada KPPS di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano agar petugas KPSS dapat melayani di rumah

- LA DUMA untuk menyalurkan hak pilihnya karena pemilih atas nama LA DUMA sedang sakit akibat kecelakaan.
- 3) Bahwa oleh karena adanya permintaan dari keluarga pemilih LA DUMA, maka seketika itu Ketua KPPS 001 Kelurahan Tampo atas nama RISMANTO memerintahkan kepada KPPS 4 atas nama RIKO JAYA SAPUTRA dan KPPS 6 atas nama SUMARDIN didampingi oleh PTPS atas nama ANDRI PASIPARI, Saksi Paslon atas nama ASBIN dan PAM TPS atas nama MUHTARI. Termasuk pemilih LA DUMA juga didampingi oleh keluarganya atas nama NURLIN.
 - 4) Bahwa saat petugas KPPS tersebut mendatangi kediaman pemilih LA DUMA turut membawa kelengkapan TPS berupa:
 - a. Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Alat coblos;
 - c. Kantung plastik hitam yang digunakan untuk menyimpan surat suara yang dicoblos oleh LA DUMA;
 - d. Tinta hitam;
 - e. Formulir Catatan Kejadian Khusus
 - 5) Bahwa peristiwa LA DUMA yang menyalurkan hak pilihnya di kediamannya tersebut telah dituangkan ke dalam Formulir Mode C. Kejadian Khusus tanggal 27 November 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS atas nama RISMANTO (**vide: Bukti T-85**);
 - 6) Bahwa saat prosesi penyaluran hak pilih atas nama LA DUMA tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi PEMOHON. Juga tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS. Begitu pun pada tingkat kecamatan, tidak terdapat keberatan dari Saksi PEMOHON dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan.
 - 7) Bahwa pada saat proses rekapitulasi pada tingkat Kabupaten oleh TERMOHON, Saksi PEMOHON atas nama

LA NURUHI mengajukan keberatan karena adanya pemilih ODGJ yang menyalurkan hak pilihnya dan dibiarkan oleh KPPS sebagaimana telah dicatat dalam FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muna (**vide: T-86**).

- 8) Bahwa apabila dalil PEMOHON *a quo* sepanjang mengenai disalurkan hak pilih oleh LA DUMA yang coba “diframing” oleh PEMOHON sebagai suatu bentuk kesalahan TERMOHON melalui anggota KPPS di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, maka apabila dikaitkan dengan perolehan suara sebagaimana yang tertera di dalam Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, justru PEMOHON meraih perolehan suara terbanyak dengan total 167 suara, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini (**vide: Bukti T-87**):

Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kabupaten / Kota : NAPABALANO Kecamatan / Desa : TAMBO Nomor TPS : 001 SATU

MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

| NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON | RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH | AMPLAI TERBACA | JUMLAH SUARA SAH |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|
| 1 Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | | 141 | 141 |
| 2 LA ODE M. RAJUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | | 167 | 167 |
| 3 LA ODE KARDINI S.E., M.Si. Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M. | | 70 | 70 |

Handwritten text at the bottom of the form: SERATUS EMPAT PULUH SATU, SERATUS ENAM PULUH TUJUH, TUJUH PULUH.

Signature section at the bottom with a circled signature.

Terlebih lagi, Saksi PEMOHON telah menyetujui hasil dan pencatatan pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI tersebut (**vide: Bukti T-87**).

- 9) Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas adalah tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa KPPS di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano telah membiarkan pemilih atas nama LA DUMA yang terdata di DPT dengan Nomor 190 sebagai ODGJ, sebab faktualnya pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024 pemilih LA DUMA benar sakit tetapi diakibatkan karena kecelakaan. Terlebih lagi, penyaluran hak pilih LA DUMA berjalan lancar dan tidak ada keberatan ataupun rekomendasi.

Selain itu, tidak terdapat satu pun keterangan dari dokter baik dokter umum ataupun dokter kejiwaan yang menerangkan secara medis bahwa pemilih atas nama LA DUMA dalam keadaan gangguan jiwa (ODGJ) seperti yang didalilkan oleh PEMOHON.

- 10) Bahwa secara yuridis, syarat seorang Warga Negara Indonesia untuk didaftar sebagai Pemilih salah satunya adalah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 135/2015), bertanggal 13 Oktober 2016.

Dalam putusannya tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “terganggu jiwa/ingatannya” didalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 tersebut mestilah dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.

11) Bahwa berdasarkan Putusan MK 135/2015 tersebut di atas, apabila dilekatkan dengan fakta atas keadaan pemilih atas nama LA DUMA, maka tidak ada satupun keterangan dari dokter yang memiliki keahlian dibidang kesehatan jiwa yang menerangkan pemilih atas nama LA DUMA dalam keadaan gangguan ingatan permanen.

Terlebih lagi, apabila PEMOHON dalam dalilnya *a quo* “memaksa” TERMOHON untuk turut menvalidasi kesehatan pemilih *in casu* LA DUMA, maka TERMOHON telah keluar dari tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan. Hal itu pun telah ditegaskan di dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK 135/2015 halaman 74 paragraf 3.17.1, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama, UU Kesehatan maupun UU Kesehatan Jiwa tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengetahui atau setidaknya kriteria untuk menilai apakah seorang warga negara sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Andaipun UU 18/2014 merumuskan kriteria tertentu, atau bahwa kriteria demikian dapat merujuk pada kriteria kesehatan jiwa menurut ilmu kedokteran, psikologi, dan/atau psikiatri, **penentuan apakah seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Dibutuhkan keahlian (profesi) tertentu untuk dapat dengan tepat menilai seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya.** Bahkan Pasal 73 UU Kesehatan Jiwa juncto Pasal 150 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikologi klinis.*

Penyelenggara pemilihan umum tentu bukan lembaga yang tepat untuk melaksanakan tugas demikian karena lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak didesain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan. *Ketiadaan pedoman serta lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai calon pemilih.*

- 12) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

c. Mengenai Pemilih atas nama JULIANTI, MUJAHID dan HASTIERNI menyalurkan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Tampo padahal tidak masuk dalam DPT

Ad.1 Pemilih Atas Nama JULIANTI


- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam Permohonannya bahwa Pemilih atas nama JULIANTI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403xxxxxxxxxx terdata di DPT Online Kabupaten Konawe Kepulauan. Tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna melalui jalur Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- 2) Bahwa benar pemilih atas nama JULIANTI dengan NIK 7403xxxxxxxxxx menyalurkan hak pilihnya di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano melalui jalur DPK (**vide: Bukti T-88**). Juga benar bahwa pemilih atas nama JULIANTI pada DPT Online terdapat di Kabupaten Konawe Kepulauan (**vide: bukti T-89**);
- 3) Bahwa alasan mengapa KPPS TPS 001 memperbolehkan pemilih atas nama JULIANTI menyalurkan hak pilihnya karena yang bersangkutan saat datang menyalurkan hak

pilihnya membawa KTP-el asli. Dan Alamat yang tertera pada KTP-EI yang ditunjukkan tersebut beralamat di area sekitar TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagaimana gambar berikut (**vide: Bukti T-90**):

- 4) Bahwa atas fakta pemilih JULIANTI menyalurkan hak pilihnya di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano tersebut telah pula dicatat pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada tanggal 27 November 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS atas nama RISMANTO (**vide: Bukti T-91**);
- 5) Bahwa selanjutnya pemilih JULIANTI juga telah mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana yang tertera dalam FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN sebagai berikut (**vide: Bukti T-88**):

Lembar 1 dari 2


**FORMULIR
DI MEJA KPPS 5**



Nomor TPS :
Desa / Kelurahan ^{*)} :
Kecamatan / Distrik ^{*)} :
Kabupaten / Kota ^{*)} : **MUNA**
Provinsi : **SULAWESI TENGGARA**



**DAFTAR HADIR
PEMILIH TAMBAHAN**
(Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk)
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**MODEL
C.DAFTAR HADIR PEMILIH
TAMBAHAN-KWK**



https://eksdptonline.kpu.go.id/

Keterangan
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom Jenis Kelamin yang menggunakan Hak Pilih
a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L
b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih / Anggota KPPS dalam menandatangani daftar hadir

| NO | NIK | NAMA PEMILIH | JENIS KELAMIN ^{**)} | | JENIS DISABILITAS | TANDA TANGAN PEMILIH | |
|----|---------------------------|--------------|------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|
| | | | L | P | | 1 | 2 |
| 1 | 740306100406003 ARNONG | ARNONG | ✓ | | | 1 |  |
| 2 | 748306480503001 | JULIANTI | | ✓ | | 2 |  |
| 3 | | | | | | 3 | |
| 4 | | | | | | 4 | |

- 6) Bahwa merujuk pada FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN tersebut di atas, terdapat 2 (dua) orang yang terqualifikasi ke dalam Daftar Pemilih Tambahan, yakni atas nama ARNONG dan JULIANTI dengan kualifikasi jenis pemilih 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Hal itu juga berkesesuaian dengan data yang tertera pada FORMULIR MODEL C.HASIL pada TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano sebagai berikut (**vide: Bukti T-87**):

**SERTA ACARA, SERTIFIKAT, DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANGGARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : RABU Desa : DUA PULUH TUJUH Kecamatan : NOVEMBER Kabupaten : DUA RIBU DUA PULUH EMPAT
Kecamatan : SELAMU TENGGARA Kecamatan : NAPABALANO Kabupaten : TAMPLO
Desa : SUSA Desa : 001 Kecamatan : 1 Kabupaten : 001 Kecamatan : 1 Kabupaten : 001

1. **DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

| UMURAN | LAKILAKI (L) | PEREMPUAN (P) | Jumlah (L+P) |
|--|--------------|---------------|--------------|
| A. DATA PEMILIH | | | |
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (terdapat dalam Model A sebagai Daftar Pemilih) | | | |
| | 2 | 4 | 9 |
| B. PENGGUNA HAK PILIH | | | |
| 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | | |
| | 1 | 8 | 3 |
| 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) | | | |
| | 1 | 8 | 3 |
| 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) | | | |
| | 1 | 8 | 3 |
| 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3) | | | |
| | 1 | 8 | 3 |

II. **DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

| UMURAN | LAKILAKI (L) | PEREMPUAN (P) | Jumlah (L+P) |
|---|--------------|---------------|--------------|
| 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS | | | |
| | 5 | 0 | 5 |
| 2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih | | | |
| | 1 | 8 | 3 |
| 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau karena alasan lainnya | | | |
| | 1 | 1 | 5 |
| 4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan | | | |
| | 1 | 1 | 5 |

III. **DATA PEMILIH DISABILITAS**

| UMURAN | LAKILAKI (L) | PEREMPUAN (P) | Jumlah (L+P) |
|---|--------------|---------------|--------------|
| Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan Hak Pilih | | | |
| | 1 | 1 | 2 |

- 7) Bahwa oleh karena keadaan faktual yang terjadi pemilih atas nama JULIANTI yang dapat menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001 Kelurahan Tampo, Kecamatan Tampo karena memiliki KTP-El asli yang berdomisili di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, maka hal tersebut dibenarkan secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat UU 10/2016 *juncto* Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015, Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU 17/2024), sebagai berikut:

Pasal 61 UU 10/2016

- (1) ***Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.***
- (2) ***Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat***

pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan **dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.**
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015

Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan; dan
- c. **Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.**

Pasal 1 angka 22 PKPU 17/2024

Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun

memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

- 8) Bahwa berdasarkan penjelasan hukum tersebut di atas, maka beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

Ad.2 Pemilih Atas Nama MUJAHID

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam Permohonannya bahwa Pemilih atas nama MUJAHID dengan NIK 7471xxxxxxxxxx terdata di DPT Online Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna melalui jalur Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* tidak jelas, sebab faktualnya tidak terdapat pemilih atas nama MUJAHID menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano. Sebab, sebagaimana FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN pada TPS 001 hanya ada 2 (dua) orang sebagai pemilih jalur DPK, yakni ARNONG dengan NIK: 7403xxxxxxxxxx dan JULIANTI dengan NIK: 7403xxxxxxxxxx (**vide: Bukti T-88**).
- 3) Bahwa meskipun dalil PEMOHON sepanjang mengenai pemilih atas nama MUJAHID tidak jelas uraiannya. Tetapi setelah TERMOHON melakukan validasi data pemilih pada Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, terungkap nama pemilih atas nama MUJAHID dengan NIK 7471xxxxxxxxxx benar menyalurkan hak pilihnya yakni pada TPS 002.
- 4) Bahwa benar pemilih atas nama MUJAHID saat hendak menyalurkan hak pilihnya pada TPS 002, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano dilakukan pengecekan pada DPT Online, yang bersangkutan terdata ke dalam DPT

Kota Kendari (**vide: Bukti T-92**). Akan tetapi, pemilih atas nama MUJAHID menunjukkan kepada petugas KPPS TPS 002 berupa KTP-el yang menunjukkan alamat domisi di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano. Sehingga anggota KPPS TPS 002 mempersilahkan yang bersangkutan menyalurkan hak pilihnya. KTP-el pemilih dapat dilihat pada **Bukti T-93**.

- 5) Bahwa atas fakta pemilih atas nama MUJAHID yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 002, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano tersebut telah pula dicatat pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS pada tanggal 27 November 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS atas nama NURLIN (**vide: Bukti T-94**);
- 6) Bahwa selanjutnya pemilih MUJAHID juga telah mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana yang tertera dalam FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sebagai berikut (**vide: Bukti T-95**):

FORMULIR
DI MEJA KPPS 5



**DAFTAR HADIR
PEMILIH TAMBAHAN**
(Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk)
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Lembar 1 dari 2

MODEL
C.DAFTAR HADIR PEMILIH
TAMBAHAN-KWK



<https://ekspertiseleksi.kpu.go.id/>

Nomor TPS : 002
Desa / Kelurahan *) : TAMPO
Kecamatan / Distrik *) : NAPABALANO
Kabupaten / Kota *) : MUNA
Provinsi : SULAWESI TENGGARA

Keterangan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom Jenis Kelamin yang menggunakan Hak Pilih
 - a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L
 - b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P
- Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih / Anggota KPPS dalam menandatangani daftar hadir

| NO | NIK | NAMA PEMILIH | JENIS KELAMIN **) | | JENIS DISABILITAS | TANDA TANGAN PEMILIH | |
|----|------------------|--------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|
| | | | L | P | | 7 | 8 |
| 1 | 740306480990001 | DEWI KARTIKA | | P | | 1 | |
| 2 | 7403064401990001 | SIPARWATI | | P | | 2 | |
| 3 | 7406174707990001 | FATMA | | P | | 3 | |
| 4 | 7403066217960201 | HASTI ERNI | | P | | 4 | |
| 5 | 7471090101890010 | MUJAHID | L | | | 5 | |

- 7) Bahwa merujuk pada FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK tersebut, kiranya terdapat 5 (lima) orang yang terqualifikasi ke dalam Daftar Pemilih Tambahan, yakni atas nama DEWI KARTIKA,

SIDAWATI, FATMA, HASTI ERNI, dan MUJAHID dengan kualifikasi jenis pemilih 1 (satu) laki-laki dan 4 (empat) perempuan. Hal itu juga berkesesuaian dengan data yang tertera pada FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 002 (**vide: bukti T-96**), Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano sebagai berikut:

| I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN (P) | | Jumlah (J) | |
|--|--|-----------|---|---------------|---|------------|---|
| A. DATA PEMILIH | | | | | | | |
| Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Berada di dalam Model A Kubik Daftar Pemilih) | | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| | | 4 | 8 | 5 | | | |
| B. PENGGUNA HAK PILIH | | | | | | | |
| 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | | | | | | |
| | | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| | | 3 | 5 | 8 | | | |
| 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Perubahan (DPP) | | | | | | | |
| | | X | X | X | X | X | X |
| | | X | X | X | X | X | X |
| 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPT) | | | | | | | |
| | | X | X | 1 | X | X | 4 |
| | | X | X | X | X | X | 5 |
| 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3) | | | | | | | |
| | | 1 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| | | 3 | 5 | 3 | | | |
| II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA | | | | | | | |
| 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS | | | | | | | |
| | | 4 | 9 | 8 | | | |
| 2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih | | | | | | | |
| | | 3 | 6 | 3 | | | |
| 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau kertas sobek | | | | | | | |
| | | X | X | X | | | |
| 4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan | | | | | | | |
| | | 1 | 3 | 5 | | | |
| III. DATA PEMILIH DISABILITAS | | | | | | | |
| Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | | | | | | | |
| | | X | X | 3 | X | X | 2 |
| | | X | X | X | X | X | 5 |

- 8) Bahwa oleh karena keadaan faktual yang terjadi pemilih atas nama MUJAHID yang dapat menyalurkan hak pilihnya pada TPS 002 Kelurahan Tampo, Kecamatan Tampo karena memiliki KTP-El asli yang berdomisili di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano dibenarkan secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat UU 10/2016 *juncto* Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015, Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 22 PKPU 17/2024, maka beralasan bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

Ad.3 Pemilih Atas Nama HASTI ERNI

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mendalilkan pemilih atas nama HASTI ERNI dengan NIK

- 7471xxxxxxxxxxx yang terdaftar di TPS 3 Kelurahan Tampo, tetapi menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Tampo.
- 2) Bahwa dalil PEMOHON kabur, sebab faktualnya tidak terdapat nama pemilih atas nama HASTIERNI di TPS 3 Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalao sebagaimana MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP (**vide: Bukti T-97**). Serta tidak terdapat nama HASTI ERNI di TPS 001 Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano sebagaimana MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP (**vide: Bukti T-98**).
 - 3) Bahwa setelah TERMOHON melakukan verifikasi atas nama HASTIERNI dengan NIK: 7471xxxxxxxxxxx, ternyata yang bersangkutan terdaftar di TPS 003 Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano sebagaimana Formulir MODEL A.KabKo Daftar Pemilih (**vide: Bukti T-99**).
 - 4) Bahwa faktualnya saat pemilih atas nama HASTIERNI datang ke TPS 003 Kelurahan Napabalano yang bersangkutan diarahkan ke TPS 002 Kelurahan Tampo atas konfirmasi PPK Kecamatan Napabalano dengan alasan bahwa jarak TPS 002 Kelurahan Tampo dengan rumah pemilih sangat dekat. Hal itu telah dicatatkan di dalam FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS TPS 002 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano, bertanggal 27 November 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS atas nama NURLIN (**vide: bukti T-100**);
 - 5) Bahwa selain itu, pemilih atas nama HASTI ERNI berdasarkan KTP-el yang dimilikinya berdomilisi di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano sehingga diarahkan untuk menyalurkan hak pilihnya ke TPS 002 Kelurahan Tampo (**vide: bukti T-101**). Olehnya itu, pemilih atas nama HASTI ERNI dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002 sebagaimana FORMULIR

MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN (**vide: Bukti T-95**), sebagai berikut:

FORMULIR
DI MEJA KPPS 5



Lembar 1 dari 2

**DAFTAR HADIR
PEMILIH TAMBAHAN**
(Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk)
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

**MODEL
C.DAFTAR HADIR PEMILIH
TAMBAHAN-KWK**



Nomor TPS : 002
Desa / Kelurahan : TAMPO
Kecamatan / Distrik : NAPABALANO
Kabupaten / Kota : MUNA
Provinsi : SULAWESI TENGGARA

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
**) Wajib diberi tanda (✓) pada kolom Jenis Kelamin yang menggunakan Hak Pilih
a. Pemilih Laki-Laki berikan tanda (✓) pada kolom L
b. Pemilih Perempuan berikan tanda (✓) pada kolom P
Mengisi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih / Anggota KPPS dalam menandatangani daftar hadir

| NO | NIK | NAMA PEMILIH | JENIS KELAMIN TM | | JENIS DISABILITAS | TANDA TANGAN PEMILIH | |
|----|------------------|--------------|-----------------------------|---|-------------------|----------------------|---|
| | | | L | P | | 7 | 8 |
| 1 | 740306480990001 | DEWI KARTIKA | | P | | 1 |  |
| 2 | 740306440190001 | SIRARWATI | | P | | 2 |  |
| 3 | 740617470790001 | FATMA | | P | | 3 |  |
| 4 | 7403066212960201 | HASTI ERNI | | P | | 4 |  |
| 5 | 7471090101890010 | MUJAHID | L | | | 5 |  |
| 6 | | | | | | 6 | |













- 6) Bahwa hal yang didalilkan oleh PEMOHON *a quo* sebenarnya telah diselesaikan pada saat pleno tingkat kecamatan dengan memperlihatkan Daftar Pemilih Tetap di TPS 003 Kelurahan Napabalano, dimana pemilih atas nama HESTI ERNI tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS 003 tersebut (**vide: Bukti T-97**).
- 7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum untuk Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

d. Mengenai KPPS TPS 003 Kelurahan Tampo mencoblos surat suara untuk pemilih atas nama LA FIIDI

- 1) Bahwa PEMOHON dalam dalil huruf C angka 2 tabel V ke-2 Halaman 29 menyatakan terdapat pemilih atas nama LA FIIDI yang terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 003 Kelurahan Tampo dengan Nomor DPT 156 diwakilkan memilih oleh anggota KPPS dengan alasan sakit. Padahal yang bersangkutan saat penghitungan suara ikut hadir di TPS.
- 2) Bahwa terhadap dalil *a quo*, TERMOHON membenarkan sebagian, hal mana TERMOHON telah melakukan klarifikasi kepada KPPS atas nama LIDYA dan membenarkan peristiwa tersebut terbatas pada petugas KPPS mewakilkan penyaluran

hak pilih atas nama LA FIIDI karena atas kesepakatan PTPS dan Saksi. Namun demikian, terhadap dalil pemohon mengenai ikutnya LA FIIDI dalam penghitungan suara di TPS, TERMOHON membantahnya.

- 3) Bahwa meskipun terjadi keadaan *a quo*, secara hukum berdasar ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus pada TPS 003, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano karena tidak melebihi dari satu orang yang mencoblos tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal mana ketegasan perlunya minimal 2 (dua) orang untuk diperintahkan untuk dilakukan PSU dapat ditemukan pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, halaman 203, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016, halaman 246 s.d 247.
- 4) Bahwa terhadap peristiwa yang didalilkan PEMOHON *a quo*, faktualnya tidak terdapat rekomendasi dari Panwas TPS maupun Panwascam. Sebaliknya, justru Saksi PEMOHON ikut menyetujui proses dan hasil pemungutan suara dengan membubuhkan tanda tangannya pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 003, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini (**vide: Bukti T-102**):

| NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGSARA PEMUNGUTAN SUARA | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|
| KETUA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA |
| 1.  DAWAN | 2.  DARHINTI | 3.  WAJDE ALMIN | 4.  L. MI | 5.  L. MI | 6.  KAMAR | 7.  SUKIYATI |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAHIB/PALANGAN CALON BUNUT DAN WAJDE BUNUT | | | | | | |
| 1.  MASE OKA PUTRA | 2.  NANI DAMSIDI | 3.  SAHUL AHWAD | | | | |
| 4.  | 5.  | | | | | |

- e. Mengenai pemilih atas nama DWI YANI tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena membawa Kartu Keluarga di TPS 005 Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam Permohonannya pemilih atas nama DWI YANI dengan NIK 7403xxxxxxxxxxx telah memiliki C.PEMBERITAHUAN dan telah terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 005 Kelurahan Napabalano dengan Nomor DPT 353 (Vide: dalil permohonan huruf C angka 2 tabel V ke-2 halaman 29);
- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* tidaklah berkesesuaian dengan fakta yang terjadi. Sebab, pemilih atas nama DWI YANI dengan NIK 7403xxxxxxxxxxx saat datang ke TPS 005 Kelurahan Napabalano hanya membawa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN tanpa membawa dokumen pendukungnya. Sehingga anggota KPPS menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk mengambil dokumen lain yang dapat menunjukan foto, nama, dan tanggal lahir. Akan tetapi pemilih atas nama DWI YANI tidak datang kembali ke TPS;
- 3) Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dokumen pendukung dari Formulir C.PEMBERITAHUAN yang wajib dibawa saat hendak menyalurkan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 telah TERMOHON sampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (MODEL C.PEMBERITAHUAN) yakni wajib membawa KTP-el atau Dokumen Kependudukan lainnya berupa Biodata Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Disdukcapil, sebagai berikut gambar di bawah ini (**vide: Bukti T-103**):

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara _____ untuk memberikan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 27 November 2024
 Waktu Pemungutan Suara : Pukul 07:00 s.d. 13:00 *waktu setempat*
 Saran Waktu Kehadiran Pemilih : 07:00 s.d. 08:00 08:00 s.d. 09:00 09:00 s.d. 10:00
 10:00 s.d. 11:00 11:00 s.d. 12:00 12:00 s.d. 13:00
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : _____
 Alamat TPS : _____

Catatan untuk Pemilih:

1. Boleh membawa KTP-el atau Dokumen Kependudukan lainnya berupa Biodata Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Disdukcapil.
2. Apabila pemilih hadir tidak sesuai dengan saran waktu kehadiran pemilih, Pemilih tetap dilayani sepanjang hadir pada saat waktu pemungutan suara.

Tata cara pemungutan suara:
 Calon satu kali pada:
 - nomor urut, foto, dan/ atau nama Pasangan Calon;
 - dalam kuang tidak bersumber (ditutupi) dengan 1 (satu) pasangan calon

Peringatan: Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, apabila dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 173B UU No. 10 Tahun 2016)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 HETUA _____

Yang menyerahkan _____ Yang Menerima _____
 (.....)

Nama Pemilih _____
 No. DPT _____
 Diterima Tgl _____

4) Bahwa tindakan anggota KPPS TPS 005 Kelurahan Napabalano yang meminta dokumen lain sebagai dokumen pendukung MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada DWI YANI telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada angka 3 Pelaksanaan Pemberian Suara (untuk selanjutnya disebut Keputusan KPU 1774/2024) halaman 31, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

3. Pelaksanaan Pemberian Suara

a. Pemilih hadir di TPS menunjukkan:

1) Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dala Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa.

*b. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) **tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:***

1) fotokopi KTP-el

2) foto KTP-el

3) KTP-el berbentuk digital; atau

4) dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

5) Bahwa selanjutnya perlu adanya dokumen pendukung terhadap FORMULIR MODEL C. PEMBERITAHUAN telah dipertegas melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, bertanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara pada angka 5, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka terkait dengan mekanisme pemberian suara oleh Pemilih di TPS, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. **Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk** sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum MAHKAMAH Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4, **Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:**

1) Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id; **dan**

2) KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dengan cara **meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas lainnya yang memuat ketiga unsur tersebut.**

6) Bahwa merujuk pada PKPU 17/2024 dan Keputusan KPU 1774/2024 tersebut tidak satupun menyebutkan bahwa Kartu Keluarga dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dari

Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN. Alasan yuridis mengapa Kartu Keluarga tidak lagi diperbolehkan menjadi dokumen pendukung dari Formulir C.PEMBERITAHUAN adalah karena pada Kartu Keluarga tidak terdapat foto sebagai validasi bahwa informasi yang terdapat pada Kartu Keluarga tersebut adalah orang yang benar. Hal itu sebagaimana pertimbangan MAHKAMAH pada Putusannya Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 pada paragraf 3.3 halaman 255, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas **penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;** Bahwa terhadap perkara a quo, adanya fakta hukum **penggunaan KK sebagai identitas pemilih bagi yang tidak membawa KTP-el serta tidak dapat menunjukkan Suket** dikarenakan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 8 Desember 2020 **adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.** Karena, **jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut.** Tindakan*

Bawaslu yang “mengatur” dibenarkannya penggunaan KK merupakan tindakan yang telah melampaui kewenangannya karena pengaturan dalam Surat Edaran tersebut telah menyentuh aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang merupakan ranah kewenangan KPU untuk mengaturnya. Oleh karenanya, Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, khususnya Huruf E Angka/Butir 12 harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan identitas pemilih.

7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dibenarkan menurut hukum tindakan anggota KPPS di TPS 005 Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano yang tidak menerima Kartu Keluarga sebagai dokumen pendukung lainnya atas Formulir C.PEMBERITAHUAN milik pemilih atas nama DWI YANI dan meminta dokumen lain selain Kartu Keluarga. Olehnya itu, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohon *a quo*.

f. Mengenai Pemilih atas nama SITTI RAHMAWATI ODE dan SAHABUL HIJRI menyalurkan hak pilih di TPS 001 Desa Pentiro Kecamatan Napabalano padahal tidak masuk dalam DPT

1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam Permohonannya bahwa adanya pemilih atas nama SITTI RAHMAWATI ODE dengan NIK: 8205xxxxxxxxxxx yang terdaftar di DPT Online Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara tetapi menyalurkan hak pilihnya di TPS 001, Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano.

Begitupun dengan pemilih atas nama SAHABUL HIJRI dengan NIK 7403xxxxxxxxxxx yang terdaftar di DPT Online Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah tetapi menyalurkan hak pilihnya di TPS 001, Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano (Vide: dalil permohonan huruf C angka 2 tabel V ke-2 halaman 29 s.d 30).

- 2) Bahwa benar pemilih atas nama SITTI RAHMAWATI ODE dan SAHABUL HIJI menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001, Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano. Sebab, pemilih SITTI RAHMAWATI ODE telah memiliki KTP-el yang berdomisili di Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano (**vide: Bukti T-104**), Begitupula dengan pemilih SAHABUL HIJRI juga telah memiliki KTP-el yang berdomisili di Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano (**vide: Bukti T-105**).
- 3) Bahwa oleh karena pemilih atas nama SITTI RAHMAWATI ODE dengan NIK: 8205xxxxxxxxxxx dan SAHABUL HIJI dengan NIK: 7403xxxxxxxxxxx telah memiliki KTP-el yang berdomisili di Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano dan karena keduanya belum terdata pada pemilih DPT Kecamatan Napabalano, maka pemilih atas nama SITTI RAHMAWATI ODE dan SAHABUL HIJRI menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001, Desa Pentiro dengan jalur Pemilih Tambahan (Daftar Pemilih Khusus/DPK). Hal itu sebagaimana Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN yang menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) pemilih tambahan dengan jenis kelamin 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, yakni sebagai berikut: (**vide: Bukti T-106**);
- 4) Bahwa data yang tertera pada Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN juga berkesesuaian dengan Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI (**vide: bukti T-107**), sebagai berikut:

REPUBLIK INDONESIA
KEPADA RAJA, BERTAMBAH DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PENGUNTAH SUARA
 DAerah PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUNIA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 TAHUN 2024

Kabupaten: MUNIA Kecamatan: NAPABALANO Desa: PENTIRO
 Kecamatan: NAPABALANO Desa: PENTIRO
 Kecamatan: NAPABALANO Desa: PENTIRO

Penghitungan dan Penghitungan Suara dilakukan oleh Komisi KPU dengan bantuan komputer. Hasil Penghitungan Suara, termasuk hasil akhir, akan diumumkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Munia melalui media massa dan elektronik. Hasil Penghitungan Suara akan diumumkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Munia melalui media massa dan elektronik.

1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

| URSAH | LAKI-LAKI (L) | PEREMPUAN (P) | JUMLAH (J) |
|--|---------------|---------------|------------|
| A. DATA PEMILIH | | | |
| Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (berdasarkan dalam Model A-Rakib Daftar Pemilih) | 210 | 222 | 432 |
| B. PENGGUNA HAK PILIH | | | |
| 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 149 | 191 | 340 |
| 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pendukung (DPP) | X | X | X |
| 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTT) | X | X | X |
| 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (S.L + S.P + S.S) | 150 | 192 | 342 |

2. DATA PENGGUNAAN SUARA SUARA

| URSAH | JUMLAH |
|--|--------|
| 1. Jumlah surat suara yang dibagikan, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS | 443 |
| 2. Jumlah surat suara yang dibagikan oleh pemilih | 342 |
| 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau belum valid | X |
| 4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak dibagikan/terpakai, termasuk surat suara cadangan | 101 |

3. DATA PEMILIH DISABILITAS

| URSAH | LAKI-LAKI (L) | PEREMPUAN (P) | JUMLAH (J) |
|---|---------------|---------------|------------|
| Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | X | X | X |

5) Bahwa diberikannya kesempatan kepada pemilih atas nama SITTU RAHMAWATI ODE menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001, Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano karena memiliki KTP-EI asli dibenarkan secara hukum karena berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 61 UU 10/2016, Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 1 angka 22 PKPU 17/2024, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 61 UU 10/2016

- (1) ***Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.***
- (2) ***Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.***

- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan **dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.**
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015

Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan;*
dan
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.***

Pasal 1 angka 22 PKPU 17/2024

Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

g. Mengenai Pemilih atas nama LA ODE RONAL dan WA ODE RAHMAT GUSTI yang memilih lebih dari 1 (satu) kali

Ad.1 Pemilih Atas Nama LA ODE RONAL

1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya huruf C angka 2 tabel V ke-3 halaman 30 mendalilkan jika Pemilih atas nama LA ODE RONAL terdeteksi sebagai pemilih ganda, karena yang bersangkutan terdaftar di DPT Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka dan terdaftar di DPT Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano. Sehingga ia memilih 2 (dua) kali.

2) Bahwa tidak benar dalil Pemoho *a quo* yang menyatakan ada pemilih atas nama LA ODE RONAL terdeteksi sebagai pemilih ganda. Adapun keadaan faktual yang benar adalah pemilih atas nama LA ODE RONAL terdaftar di DPT TPS 001, Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano berdasarkan Formulir MODEL A-Daftar Pemilih (**vide: Bukti T-108**). Akan tetapi, yang bersangkutan tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS 001, Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano berdasarkan Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide: bukti T-109**), sebagai berikut:

| NO | NIK | NAMA PEMILIH | JENIS KELAKUP | | JENIS DISABILITAS | TANDA TANGAN PEMILIH | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------------|----------------------|---|
| | | | L | P | | 7 | 8 |
| 164 | 7403111***** | LA ODE MUHAMMAD IGROM | L | | | 164 | |
| 165 | 74030601***** | LA ODE MUNI | L | | | 165 | |
| 166 | 74030630***** | LA ODE NDOLOMA | L | | | 166 | |
| 167 | 74030612***** | LA ODE NDOSABA | L | | | 167 | |
| 168 | 74030601***** | LA ODE NUFE | L | | | 168 | |
| 169 | 74030601***** | LA ODE RIANGKAPO | L | | | 169 | |
| 170 | 74031301***** | LA ODE RONAL | L | | | 170 | |
| 171 | 74030601***** | LA ODE SABARA | L | | | 171 | |
| 172 | 74030608***** | LA ODE SAFAR | L | | | 172 | |
| 173 | 74030631***** | LA ODE SENE | L | | | 173 | |
| 174 | 74030601***** | LA ODE SODILE | L | | | 174 | |
| 175 | 74030602***** | LA ODE SULWAN | L | | | 175 | |
| 176 | 74030601***** | LA ODE TANGKAYE | L | | | 176 | |
| 177 | 74030631***** | LA ODE TEI | L | | | 177 | |
| 178 | 74030627***** | LA ODE TONI | L | | | 178 | |
| 179 | 74030601***** | LA ODE UFA | L | | | 179 | |
| 180 | 74030625***** | LA ODE YAHYA ASHADIN SAMPAGA | L | | | 180 | |
| JUMLAH PEMILIH YANG HADIR PER HALAMAN | | | 14 | 0 | | | |

- 3) Bahwa pemilih atas nama LA ODE RONAL menyalurkan hak menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Desa Kondongia Kecamatan Lohia sebagai Pemilih Tambahan karena yang bersangkutan telah memiliki KPT-el yang berdomisili di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia (**vide: Bukti T-110**).
- 4) Bahwa oleh karena pemilih atas nama LA ODE RONAL telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili ditempat baru *in casu* Kelurahan Kondongia, Kecamatan Lohia, maka hal tersebut dibenarkan secara hukum berdasarkan Keputusan KPU 1774 pada BAB II huruf B angka 3 huruf p yang secara teknis pengadministrasiannya terhadap pemilih yang pindah domisili dan telah mendapatkan KPT-el pada domisili di tempat baru tetapi tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (FORMULIR MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH) maka dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2374/PL.02.6-SD/06/2024, bertanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada huruf C angka 4 huruf a) halaman 6, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut (**vide: Bukti T-111**):
- 4. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih), maka:*
- a) Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru.*
- 5) Bahwa karena kepada pemilih LA ODE RONAL diberikan kesempatan memilih dengan model pemilih pindahan yang berkesesuaian dengan regulasi pemilihan, maka secara hukum beralasan hukum bagi MAHKAMAH menolak dalil permohonan aquo.

Ad.2 Pemilih Atas Nama WA ODE RAHMAT GUSTI

- 6) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya huruf C angka 2 Tabel V ke-3 Halaman 30 mendalilkan jika Pemilih atas nama WA ODE RAHMAT GUSNI terindikasi sebagai pemilih ganda karena KTP berdomisili di Desa Kondongia namun terdaftar di DPT Desa Kombungo;
- 7) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* kabur, sebab tidak menyebutkan NIK pemilih WA ODE RAHMAT GUSTI. Terlebih lagi PEMOHON tidak menjelaskan lebih lanjut dimana indikasi pemilih gandanya. PEMOHON hanya menyebutkan lokasi di TPS 3 tanpa menjelaskan lebih detail apakah peristiwa tersebut terjadi di TPS 3 di Desa Kondongia atau TPS 3 di Desa Kombungo.
- 8) Bahwa perlu TERMOHON memberikan penjelasan bahwa Desa Kondongia berada di Kecamatan Lohia dan terdapat 3 (tiga) TPS. Sedangkan Desa Kombungo berada di Kecamatan Lasalepa dan terdapat 2 (dua) TPS.
- 9) Bahwa keadaan faktual yang terjadi adalah terdapat keberatan oleh saksi PEMOHON di TPS 3 Desa Kondongia, Kecamatan Lohia karena pemilih atas nama WA ODE RAHMA GUSTI terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Kombungo, Kecamatan Lasalepa. Sehingga, saksi PEMOHON “menduga” bahwa pemilih atas nama WA ODE RAHMA GUSTI memilih satu kali di TPS 3 Desa Kondongia dan juga memilih di TPS 1 Desa Kombungo;
- 10) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* ilusionir, sebab keadaan faktualnya pemilih atas nama WA ODE RAHMA GUSTI hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Kondongia, Kecamatan Lohia karena yang bersangkutan telah berdomisili di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia (**vide: Bukti T-112**).
- 11) Bahwa oleh karena pemilih atas nama WA ODE RAHMA GUSTI memiliki KTP-el yang berdomisili di TPS 3 Desa Kondongia, Kecamatan Lohia maka secara hukum telah

dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU 10/2016, Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015, Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024;

- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum untuk MAHKAMAH menolak dalil PEMOHON *a quo*.

h. Mengenai Pemilih Atas Nama LA ODE MILA Dan WA UCI

Ad.1 Pemilih Atas Nama LA ODE MILA

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan bahwa pemilih atas nama LA ODE MILA memilih menggunakan KTP di TPS 01 Desa Lohia, tetapi tidak terdata di dalam DPT Kecamatan Lohia (Vide: dalil permohonan huruf C angka 2 tabel V ke-3 halaman 30).
- 2) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* kabur, sebab tidak menyebutkan NIK LA ODE MILA sebagai validasi data kependudukan yang komprehensif.
- 3) Bahwa jika yang dipersalahkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan penggunaan KTP-el sebagai syarat menyalurkan hak pilih, hal itu dibenarkan secara hukum bila merujuk kepada ketentuan norma Pasal 61 UU 10/2016, Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015, Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 61 UU 10/2016

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*

- (3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- (4) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015

Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan;*
 - dan*
 - c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- 4) Bahwa keadaan faktualnya, pemilih atas nama LA ODE MILA memiliki KTP-el yang berdomisili di Desa Lohia, Kecamatan Lohia (**vide: Bukti T-113**). Oleh karenanya yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya melalui TPS 1 Desa Lohia.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

Ad.2 Pemilih Atas Nama WA UCI

- 6) Bahwa PEMOHON mendalilkan bahwa pemilih atas nama WA UCI dilakukan verifikasi oleh PEMOHON terdata di DPT Kelurahan Wasolangka. Akan tetapi setelah PEMOHON kembali melakukan verifikasi diperoleh data bahwa pemilih WA UCI terdaftar di DPT Khusus (**vide: dalil permohonan huruf C angka 2 tabel V ke-3 halaman 30**).
- 7) Bahwa dalil PEMOHON *a quo* kabur, sebab tidak menyebutkan NIK dari pemilih WA UCI. Terlebih lagi, PEMOHON menyebutkan “DPT Khusus”. Hal mana istilah DPT Khusus baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepada daerah tidak dikenal istilah tersebut.
- Pada pemilihan aquo, istilah menggunakan kata “khusus: dalam penyelenggaraan pemilihan adalah berkaitan dengan “TPS Lokasi Khusus”. Pengistilah tersebut dapat ditemukan didalam Pasal 57 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024). Selanjutnya di dalam Pasal 77 PKPU 17/2024, Keputusan KPU 1774 pada Bab II tentang Pemungutan Suara di TPS Lokasi Khusus;
- 8) Bahwa jika hal yang menjadi substansi dalam dalil PEMOHON *a quo* adalah berkaitan dengan penggunaan KTP-el sebagai syarat menyalurkan hak pilih, hal itu dibenarkan secara hukum dengan merujuk kepada ketentuan norma Pasal 61 UU 10/2016, Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015, Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024.
- 9) Bahwa keadaan faktualnya, pemilih atas nama WA UCI memiliki KTP-el yang berdomisili di Desa Lohia, Kecamatan Lohia (**vide: Bukti T-114**). Oleh karenanya yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya melalui TPS 1 Desa Lohia.

10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

i. Mengenai Perbedaan Data Pada C.Hasil, C.Hasil Salinan Daftar Hadir dengan Jumlah Surat Suara Sah di TPS 002 Desa Lohia

- 1) Bahwa PEMOHON dalam dalil permohonannya huruf C angka 2 tabel V ke-3 halaman 30 s.d halaman 31) menyatakan adanya perbedaan antara jumlah surat suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 002, Desa Lohia, Kecamatan Lohia.
- 2) Bahwa dalil permohonan PEMOHON *a quo* benar terjadi, namun atas kekeliruan pencatatan tingkat TPS 002 Desa Lohia, telah dilakukan perbaikan pada saat pleno perhitungan suara tingkat Kecamatan Lohia. Perbaikannya yaitu perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 yang sebelumnya 152 menjadi 153, dan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 yang sebelumnya 100 menjadi 99. Perbaikan *a quo* telah dicatatkan dalam formulir D.Kejadian Khusus Kecamatan.
- 3) Bahwa tindakan perbaikan perolehan suara dari masing-masing paslon tersebut pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Lohia terjadi setelah dilakukannya pembukaan kotak suara lalu dilakukan penghitungan kembali perolehan suara pada TPS 002 Desa, dan selanjutnya dibuatlah perbaikan pada D.Hasil Kecamatan Lohia
- 4) Bahwa penghitungan ulang tersebut terjadi karena pada mulanya KPPS di TPS 002 Desa Lohia menghitung jumlah pemilih dari DPT yang menyalurkan hak pilihnya adalah 303. Sedangkan jumlah pemilih dari DPK sebanyak 7 orang;
- 5) Bahwa faktualnya yang terjadi adalah Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna di TPS 002 Desa Lohia berjumlah 311 surat suara. Olehnya itu, tidak terdapat kesesuaian jumlah dari penjumlahan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yaitu $303 + 7 = 310$. Ternyata, anggota KPPS di TPS 002 tersebut tidak

menghitung satu surat suara sebagai suara sah. Sehingga anggota KPPS TPS 002 menuliskan jumlah surat suara digunakan sebanyak 310. Hal itu sebagaimana Formuli C. Hasil TPS 002 Desa Lohia (**vide: bukti T-115**), sebagai berikut:

| I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH | | Jumlah | | |
|--|--|-----------|-------------|---------|
| | | LAKSISASI | PERSEKUTUAN | AMALIAH |
| A. DATA PEMILIH | | | | |
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | 1 | 9 | 2 |
| 2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan | | 2 | 3 | 0 |
| 3. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan | | 4 | 2 | 2 |
| B. DATA PENGGUNA HAK PILIH | | | | |
| 1. Jumlah Pemilih yang memberikan suara sah | | 1 | 1 | 6 |
| 2. Jumlah Pemilih yang memberikan suara tidak sah | | X | X | X |
| 3. Jumlah Pemilih yang memberikan suara sah dan suara tidak sah | | X | X | 5 |
| 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (S.1 + S.2 + S.3) | | 1 | 2 | 1 |
| 5. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara sah | | 1 | 8 | 9 |
| 6. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara tidak sah | | 3 | 1 | 0 |
| 7. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara sah dan suara tidak sah | | 4 | 3 | 2 |
| 8. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara sah dan suara tidak sah (S.1 + S.2 + S.3) | | 1 | 2 | 2 |
| 9. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara sah dan suara tidak sah (S.1 + S.2 + S.3 + S.4) | | 4 | 3 | 2 |
| 10. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara sah dan suara tidak sah (S.1 + S.2 + S.3 + S.4 + S.5) | | 3 | 1 | 0 |
| 11. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara sah dan suara tidak sah (S.1 + S.2 + S.3 + S.4 + S.5 + S.6) | | X | X | X |
| 12. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara sah dan suara tidak sah (S.1 + S.2 + S.3 + S.4 + S.5 + S.6 + S.7) | | 1 | 2 | 2 |
| 13. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara sah dan suara tidak sah (S.1 + S.2 + S.3 + S.4 + S.5 + S.6 + S.7 + S.8) | | X | X | X |
| 14. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara sah dan suara tidak sah (S.1 + S.2 + S.3 + S.4 + S.5 + S.6 + S.7 + S.8 + S.9) | | X | X | X |
| 15. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang memberikan suara sah dan suara tidak sah (S.1 + S.2 + S.3 + S.4 + S.5 + S.6 + S.7 + S.8 + S.9 + S.10) | | X | X | X |

- 6) Bahwa saat Pleno Kecamatan setelah dilakukan scoursing/jeda beberapa kali. Kala itu Panwas Kecamatan Lohia membawa daftar hadir pemilih DPT dari TPS 002 Desa Lohia. Setelah dilakukan pengecekan pada Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, ternyata pemilih DPT yang menyalurkan hak pilihnya berjumlah 304 pemilih bukan 303 pemilih. Sehingga terdapat kekurangan 1 (satu) pemilih yang tidak terhitung belum diberikan. Sehingga apabila dijumlahkan antara Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Pemilih Tambahan maka diperoleh kesesuaian hasil dengan jumlah surat suara yang terpakai $(304 + 7) = 311$ surat suara.
- 7) Bahwa oleh karena terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak terhitung, maka surat suaranya pun tidak diketahui diperuntukkan kepada Paslon Nomor Urut berapa. Sehingga saat Pleno tingkat Kecamatan, PPK atas nama SUPRIK LA NIA bersama dengan Panwas Kecamatan beserta saksi menyetujui untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 002 Desa Lohia guna

memastikan 1 (satu) surat suara yang belum terhitung tersebut diperuntukkan kepada Paslon Nomor Urut yang mana.

- 8) Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang, terjadi perbaikan angka perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2, yang dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

| TPS 002 DESA LOHIA KECAMATAN LOHIA | | Perolehan Suara | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Sebelum Pleno PPK | Saat Pleno PPK |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 151 | 153 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 100 | 99 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 36 | 36 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 13 | 13 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 1 | 1 |
| (vide: Bukti T-115 dan Bukti T-116) | | | |

- 9) Bahwa atas perubahan perolehan suara milik PEMOHON *a quo*, terdapat keberatan oleh Saksi PEMOHON sehingga tidak menyetujui hasil penghitungan ulang tersebut. Akan tetapi, demi memastikan kembali validitas hasil penghitungan ulang yang pertama, maka disetujui bersama oleh Panwas Kecamatan dan saksi Paslon untuk dilakukan penghitungan ulang untuk yang

kedua kalinya dengan syarat saksi PEMOHON untuk duduk lebih dekat dengan surat suara sehingga lebih mudah memastikan hasil coblosan pada surat suara.

- 10) Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara untuk yang kedua kalinya perolehan suara yang diperoleh masing-masing Paslon tidak ada perubahan saat penghitungan yang pertama.
- 11) Bahwa terhadap perubahan dari Formulir C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 002 Desa Lohia yang sebelumnya jumlah pemilih DPT berjumlah 303 dan jumlah surat suara 310. Telah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati sebagai berikut (**vide: Bukti T-116**):

Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi

LOHIA
MUNA
SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota Hakaman
1 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELUARAHAAN/.....% LOHIA

| NO. | URAIAN | PILIHAN | | | JUMLAH AKHIR |
|-----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | |
| I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | | | |
| A | DATA PEMILIH | | | | |
| | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK PR JML | 208 213 421 | 192 230 422 | 198 240 438 |
| B | PENGGUNA HAK PILIH | | | | |
| | 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK PR JML | 141 186 327 | 117 187 304 | 120 178 298 |
| | 2. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LA PR JML | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | 3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK PR JML | 1 2 3 | 3 7 10 | 1 1 2 |
| | 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) | LK PR JML | 142 188 330 | 120 194 314 | 121 179 299 |

| NO. | URAIAN | BENCAN | | | JUMLAH AKHIR |
|-----|--|---------|---------|---------|--------------|
| | | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | |
| I | DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA | | | | |
| 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT | 3 | 4 | 5 | 124 |
| 2 | Jumlah surat suara yang digunakan | 452 | 433 | 449 | 1334 |
| 3 | Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (akarena rusak atau ketiru coblos) | 330 | 311 | 308 | 950 |
| 4 | Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ditak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan | 102 | 122 | 140 | 364 |

| NO. | URAIAN | BENCAN | | | JUMLAH AKHIR |
|-----|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | |
| I | DATA PEMILIH DISABILITAS | | | | |
| | Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | LK PR JML | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 |

| NAMA DAN TANDA TANGAN PEMILIH KECAMATAN | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Drs. H. RAHARUN, M.Si. - LA ODE ASRAFILAH, S.P., M.H. | 2. LA ODE M. RAJIN TUMADA, S.P., M.Si. - PURNAMA RAMADHAN, S.P., M.Si. | 3. LA ODE KARDINI, S.E., M.Si. - Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M. | 4. Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. - ARIAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 5. LA ODE HUSUNA RINJA, JHON, S.E., M.M. - Drs. SYARIFUDIN, M.M. |

- 12) Bahwa saat pleno tingkat Kabupaten, Saksi PEMOHON atas nama MUH. ANDRI YONO RIDWAN telah mengajukan keberatan saksi dan telah dicatatkan di dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (**vide: Bukti T-117**).

13) Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, sesungguhnya tidak benar jika terdapat campur tangan penyelenggara pemilihan *in casu* PPK Kecamatan Lohia ataupun KPPS di TPS 002 untuk mengurangi perolehan suara PEMOHON *a quo*, dan atas kekeliruan pengadministrasian hasil pemilihan di TPS 002 Desa Lohia telah diperbaiki pada penghitungan tingkat Kecamatan Lohia. Terlebih lagi, Saksi PEMOHON saat penghitungan suara di TPS 002, Desa Lohia telah menyetujui seluruh pencatatan dengan membubuhkan tanda tangannya (**vide: Bukti T-115**). Olehnya itu, beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH menyatakan menolak dalil PEMOHON *a quo*.

j. Mengenai Kekeliruan Memasukkan Sampul C.Hasil Salinan Bupati dan Wakil Bupati ke dalam Kota Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 002 Desa Lakarama, Kecamatan Towea

- 1) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya huruf C angka 2 tabel V ke-4 halaman 31 mengungkapkan adanya kesalahan memasukkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Bupati dan Wakil Bupati oleh KPPS 002 Desa Lakarama yang dimasukkan ke dalam kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) Bahwa benar telah terjadi kesalahan memasukkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Bupati dan Wakil Bupati oleh KPPS 002 Desa Lakarama yang dimasukkan ke dalam kota suara Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dalil PEMOHON *a quo*. Namun demikian, Saksi PEMOHON telah menyetujui seluruh hasil yang dicatatkan karena telah membubuhkan tanda tangannya sebagai berikut (**vide: Bukti T-118**):

| NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| KEPALA SEKSIAN <i>[Signature]</i> | ANGGOTA RUMAH YATIMAWATI <i>[Signature]</i> | ANGGOTA WACANI <i>[Signature]</i> | ANGGOTA HARMITA <i>[Signature]</i> | ANGGOTA SPIRANRYU <i>[Signature]</i> | ANGGOTA IKHSAR <i>[Signature]</i> | ANGGOTA SALWATI <i>[Signature]</i> |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PEMOHON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | | | | | | |
| 1. DR. H. BACINDA, M.Si LA. DISE. KEDIRI, S.P., M.A. <i>[Signature]</i> | 2. LA. DISE. M. RAJAN PURNAGA, S.P. PONDOK BANGUNAN, S.P. <i>[Signature]</i> | 3. LA. DISE. KARDIN, S.P., M.Si DR. H. HOER RAHUL, S.P., M.A., S.H. <i>[Signature]</i> | 4. DR. ARDI. RAMBIA, S.P., M.Si KAWA. JOTA BILUNDI, S.P. <i>[Signature]</i> | 5. LA. DISE. NUSURA BINGLA RION, S.P. DR. YUSRIYANTO, M.A. <i>[Signature]</i> | 6. | 7. |

- 3) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 29 November 2024 saat dilakukannya pleno kecamatan di Sekretariat PPK Kecamatan Towea, Ketua PPS Desa Lakarama atas nama LA ODE HARIADIL saat akan membacakan C.Hasil Sainan KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk TPS 002 Desa Lakarama yang diambil dari dalam kotak suara, ditemukan keadaan KPPS TPS 002 Desa Lakarama salah memasukkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati dan Wakil Bupati, yang seharusnya dimasukkan ke dalam kotak suara Bupati dan Wakil Bupati ternyata oleh KPPS TPS 002 Desa Lakarama memasukkannya ke dalam kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sesungguhnya tidak terdapat perubahan atas signifikansi perolehan suara milik PEMOHON, sebab fakta yang terjadi adalah hanya kesalahan pengisian formulir yang tidak pada kotak yang seharusnya. Dan itu telah dilakukan perbaikan pada tingkat kecamatan. Olehnya itu, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

k. Mengenai Kekeliruan Memasukkan Sampul C.Hasil Salinan Bupati dan Wakil Bupati ke dalam Kota Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 003 Desa Bhontu-Bhontu, Kecamatan Towea

- 1) Bahwa benar telah terjadi kesalahan memasukkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Bupati dan Wakil Bupati oleh KPPS 003 Desa Bhontu-Bhontu yang dimasukkan ke dalam kota suara Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dalil PEMOHON huruf C angka 2 tabel V ke-4 halaman 31;
- 2) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 29 November 2024 saat dilakukannya pleno kecamatan di Sekretariat PPK Kecamatan Towea, Ketua PPS Desa Bhontu-Bhontu atas nama RAHMAT GUNAWAN akan membacakan

C.Hasil Salinan KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk TPS 003 Desa Bhontu-Bhontu. Ternyata oleh KPPS TPS 003 Desa Bhontu-Bhontu salah memasukkan Model C. Hasil Salinan KWK Bupati dan Wakil Bupati, yang seharusnya dimasukkan ke dalam kotak suara Bupati dan Wakil Bupati ternyata oleh KPPS memasukkannya ke dalam kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur;

- 3) Bahwa pada saat pleno kecamatan tersebut, C.Hasil Salinan KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah dikembalikan ke kotak yang seharusnya. Hal mana tersebut turut disaksikan oleh Panwascam Towea dan juga saksi pasangan calon.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sesungguhnya dalil PEMOHON *a quo* tidak terdapat perubahan atas signifikansi perolehan suara milik PEMOHON, justru PEMOHON lah peraih suara terbanyak pada TPS 003, Desa Bhontu-Bhontu, Kecamatan Towea, dengan total 238 suara dan PIHAK TERKAIT 147 suara (**vide: Bukti T-119**).
- 5) Bahwa oleh sebab fakta yang terjadi adalah hanya kesalahan pengisian formulir yang tidak pada kotak yang seharusnya dan itu telah dilakukan perbaikan pada tingkat kecamatan sehingga tidak berdampak pada perolehan suara. Olehnya itu, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

I. Mengenai Anggota KPPS TPS 006 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Laiworu Menumpahkan Isi Kota Suara ke Lantai

- 1) Bahwa benar adanya surat suara yang diletakkan di lantai pada saat hendak akan melakukan penghitungan suara di TPS 006 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, sebagaimana dalil permohonan PEMOHON huruf C angka 2 tabel V ke-4 halaman 31;

- 2) Bahwa peristiwa itu terjadi dilatari adanya pemilih yang salah memasukkan surat suara ke kotak suara. Seharusnya surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dimasukkan ke dalam kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Akan tetapi pemilih tersebut justru memasukkannya ke dalam kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Bahwa oleh karena adanya peristiwa tersebut, maka sebelum dilakukan penghitungan suara oleh Ketua KPPS TPS 006 Kelurahan Laiworu, Ketua KPPS menyampaikan lebih dulu kepada saksi pasangan calon dan pengawas TPS 005 bahwa terdapat surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimasukkan ke dalam kotak surat suara Bupati dan Wakil Bupati untuk digabungkan bersama-sama dengan surat suara gubernur.
- 4) Bahwa karena pada saat itu surat suara gubernur telah lebih dulu dikeluarkan dari kotak suaranya, maka tumpukkan kertas suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berada diatas meja KPPS. Sehingga saat Ketua KPPS 006 hendak mengambil 1 (satu) surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur yang berada di dalam kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Ketua KPPS 006 saat membuka kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengeluarkan surat suara dengan menaruhnya di atas lantai, sebab saat itu tumpukkan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah menumpuk di atas meja, sehingga tidak terdapat space (ruang) kosong untuk meletakkan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati saat dikeluarkan dari kotaknya untuk mengambil surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang salah dimasukkan ke kotak suaranya.
- 5) Bahwa merupakan kesepakatan bersama dengan saksi pasangan calon dan Pengawas TPS agar surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur yang salah dimasukkan ke dalam kotak suara Bupati dan Wakil Bupati agar digabungkan kembali ke surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur;

- 6) Bahwa tindakan Ketua KPPS 006 yang meletakkan isi kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di atas lantai tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi pasangan calon. Tidak terdapat kejadian khusus serta tidak terdapat rekomendasi Pengawas TPS.
- 7) Bahwa tindakan meletakkan surat suara di atas lantai oleh Ketua KPPS 006 tersebut tidak mengubah perolehan suara terhadap masing-masing paslon. Bahkan bila melihat pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 006 Kelurahan Laiworu, Saksi PEMOHON membubuhkan tanda tangannya (**vide: Bukti T-120**)

| NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KETUA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA |
| 1. LA DARU | 2. LA DARU | 3. MURTIATI | 4. ENA ANIKAH | 5. WIDATI | 6. LA TALU | 7. FITRIANI |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | | | | | | |
| 1. SU (SUKSES) S.D. | 2. SU (SUKSES) S.D. | 3. SU (SUKSES) S.D. | 4. SU (SUKSES) S.D. | 5. SU (SUKSES) S.D. | 6. SU (SUKSES) S.D. | 7. SU (SUKSES) S.D. |
| DEWI CAHYA | DEWI CAHYA | DEWI CAHYA | DEWI CAHYA | DEWI CAHYA | DEWI CAHYA | DEWI CAHYA |
| 8. SU (SUKSES) S.D. | 9. SU (SUKSES) S.D. | 10. SU (SUKSES) S.D. | 11. SU (SUKSES) S.D. | 12. SU (SUKSES) S.D. | 13. SU (SUKSES) S.D. | 14. SU (SUKSES) S.D. |
| DEWI CAHYA | DEWI CAHYA | DEWI CAHYA | DEWI CAHYA | DEWI CAHYA | DEWI CAHYA | DEWI CAHYA |

- 8) Bahwa oleh karena yang dipersalahkan oleh PEMOHON *a quo* adalah berkaitan dengan teknis pemungutan yang tidak berdampak atas signifikansi perolehan suara milik PEMOHON pada TPS 006 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, maka beralasan menurut hukum agar Mahkamah menolak dalil PEMOHON *a quo*.

m. Mengenai Kesalahan Pengisian Formulir C.Hasil pada Kolom Jumlah Sisa Suara yang Tidak Digunakan yang terjadi di TPS 1, Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno

- 1) Bahwa memang benar terjadi kekeliruan penulisan pada Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno terkait kolom jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos yang dilakukan oleh anggota KPPS

sebagaimana dalil PEMOHON huruf C angka 2 tabel V ke-4 halaman 31 s.d halaman 32.

- 2) Bahwa kekeliruan *a quo* terjadi pada pengisian Formulir Model C.Hasil-KWK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur. Bukan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kekeliruannya terletak pada kesalahan penulisan pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR di TPS 001 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno adalah pada kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya ditulis 237 tetapi ditulis 228 (**vide: Bukti T-121**). Sehingga berbeda dengan pencatatan surat suara yang tidak digunakan pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati yang dicatatkan berjumlah 237 (**vide: Bukti T-121**).
- 3) Bahwa terhadap kesalahan penulisan pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur tersebut tidak dicatatkan ke dalam kejadian khusus dan tidak pula tidak terdapat keberatan oleh saksi Paslon maupun panwas TPS. Terlebih lagi, Saksi PEMOHON sebenarnya telah menyetujui hasil pencatatan pada TPS 001, Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno karena telah membubuhkan tanda tangannya (**vide: Bukti T-121**).
- 4) Bahwa pada proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tongkuno, telah dilakukan penghitungan kembali atas sisa surat suara pada TPS 001, Desa Oempu yang tidak digunakan, dan proses penghitungannya disaksikan oleh Panwascam Tongkuno dan disaksikan oleh Saksi Paslon PEMOHON. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat jumlah surat suara yang tidak digunakan, ternyata berjumlah 237.
- 5) Bahwa saat penghitungan sisa surat suara yang tidak digunakan terdapat 40 surat suara dari 237 surat suara yang tidak diberi tanda silang. Sehingga saksi Paslon PEMOHON mengajukan keberatan atas tidak diberikannya tanda silang pada 40 sisa surat suara yang tidak digunakan tersebut.

- 6) Bahwa PPK Kecamatan Tongkuno telah menyampaikan kepada Saksi PEMOHON jika kejadian tersebut adalah murni kesalahan KPPS yang tidak memberikan tanda silang. Serta kesalahan tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing paslon. Selanjutnya keberatan Saksi PEMOHON tersebut telah dicatat pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kecamatan Tongkuno (**vide: Bukti T-122**).
- 7) Bahwa kesalahan penulisan terhadap jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Formulir D.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

| No. | URAIAN | JUMLAH | | | | JUMLAH AKHIR |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|--------------|
| | | TPS 001 | TPS 002 | TPS 003 | TPS 004 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT | 963 | 913 | 991 | 954 | 2.211 |
| 2 | Jumlah surat suara yang diproses | 326 | 281 | 307 | 307 | 1.191 |
| 3 | Jumlah surat suara di lingkungan desa/petemuan (ruang atau kelurahan/RT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah surat suara yang tidak digunakan (tidak terpasang, termasuk sisa surat suara cadangan) | 237 | 262 | 274 | 247 | 1.000 |

(vide: Bukti T-14)

- 8) Bahwa kesalahan petugas KPPS 001 yang tidak membubuhkan tanda tangan pada 40 surat suara adalah persoalan teknis yang tidak berdampak pada signifikansi perolehan suara, khususnya pada tingkat kecamatan sebagaimana yang tertuang di dalam Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI, dimana PEMOHON-lah yang justru memperoleh suara terbanyak sebagai berikut:

| KECAMATAN TONGKUNO | | |
|--------------------|--|-----------------|
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 2.272 |

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 2.398 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M | 2.001 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H. | 712 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M. | 63 |
| | TOTAL SUARA SAH | 7.446 |
| (vide: Bukti T-14) | | |

- 9) Bahwa atas kesalahan penulisan oleh KPPS 001 Desa Oempu pada jumlah surat suara yang tidak terpakai di Formulir Model C.Hasil serta tidak memberikan tangan silang pada 40 surat suara yang tidak terpakai tersebut telah menunjukkan tindakan tidak professional dan tidak berkesesuaian dengan Pasal 38 PKPU 17/2024 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 38 PKPU 17/2024

- (1) *Ketua KPPS memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:*
- a. *Surat Suara yang tidak digunakan;*
 - b. *Surat Suara cadangan yang tidak digunakan;*
 - c. *Surat Suara yang rusak; dan/atau*
 - d. *Surat Suara yang keliru dicoblos.*
- (2) *Dalam memberi tanda silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS.*

10) Bahwa oleh karena hal yang dipermasalahkan oleh PEMOHON tidak berdampak pada signifikansi perolehan suara, terlebih lagi berdasarkan Formulir MODEL D.KECAMATAN-KWK-BUPATI justru PEMOHONlah yang memiliki perolehan suara terbanyak dan telah dilakukan perbaikan atasnya, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

n. Mengenai Pada Beberapa Kejadian Khusus Terlihat Tidak Profesionalnya TERMOHON Dalam Melakukan Proses Rekapitulasi

Ad.1 Mengenai Peristiwa di Kecamatan Bone

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 33 huruf C angka 3 tabel VI mendalilkan yang pada pokoknya bahwa adanya seorang pemilih yang mencoblos 2 surat suara di TPS 001 Desa Bone Kaesintala, Kecamatan Bone.
- 2) Bahwa benar terdapat seorang pemilih di TPS 001 Desa Bone Kainsitala yang mencoblos 2 (dua) lembar surat suara yang sama, yaitu surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur. Dimana pemilih tersebut tidak memperhatikan gambar dari paslon yang tertera pada surat suara, melainkan hanya melihat dari nomor urut paslon. Selanjutnya, karena mencoblos pada 2 (dua) surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur lalu satu diantara surat suara yang telah dicoblos tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Bahwa terhadap kejadian tersebut telah diselesaikan ditingkat TPS sehingga telah dicatatkan di dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (**vide: Bukti T-123**);
- 4) Bahwa atas peristiwa pemilih yang mencoblos 2 (dua) surat suara gubernur dan wakil gubernur dan salah satu surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi di TPS, tidak terdapat rekomendasi Panwas TPS.

- 5) Bahwa saat proses rekapitulasi di tingkat PPK juga tidak terdapat keberatan dari saksi paslon, tidak terdapat rekomendasi Panwascam. Melainkan saat dilakukannya pleno kecamatan, Panwas Kecamatan meminta untuk dicatatkan kejadian khusus di TPS 001 Desa Bone Kaisintala tetapi PPK berpendapat bahwa karena sebelumnya tidak ada cacatan kejadian khusus di TPS dan kalau pun terdapat kejadian khusus, menurut PPK telah diselesaikan ditingkat TPS. Karena faktualnya juga tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi paslon di TPS. Hal itu dapat dilihat dengan terdapatnya tanda tangan Saksi PEMOHON pada Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, sebagai berikut (**vide: Bukti T-124**):

| NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELANGGARA PEMERINTAHAN SUKSES | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ketua S.D.N.G.T.M. | 2. Anggota A.S.T.M. | 3. Anggota M.A.R.I.K.A.P.A.D.I.A | 4. Anggota S.I.L.V.A.N.O.R.I.T.A.M. | 5. Anggota N.A.Z.R.I.S.D.A.S.T.R.A | 6. Anggota H.A.S.W.I.S | 7. Anggota P.H.T. |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASLON DAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | | | | | | |
| 1. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE ADIRAPIL S.H. M.M. | 2. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE R.A.H.M.A.T.U.L.L.H. | 3. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE S.A.L.A.M. | 4. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE S.A.L.A.M. | 5. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE S.A.L.A.M. | 6. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE S.A.L.A.M. | 7. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE S.A.L.A.M. |

Selanjutnya, Saksi PEMOHON juga memberikan tanda tangan pada Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-KWK-BUPATI sebagai berikut (**vide: Bukti T-20**):

| NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ketua W.A.S.I.L. | 2. Anggota M.A.R.I.K.A.P.A.D.I.A | 3. Anggota M.I.K.A.R.A.T. | 4. Anggota Y.A.S.I.D.D.A.S.H. | 5. Anggota A.W.A.M. |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI | | | | |
| 1. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE ADIRAPIL S.H. M.M. | 2. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE R.A.H.M.A.T.U.L.L.H. | 3. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE S.T. H.T. I.P.M. | 4. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE B.O.L.O.M.B.O. | 5. Ds. H. DAKUEN M.S. LA CODE S.T. H.T. I.P.M. |

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sesungguhnya peristiwa yang didalilkan PEMOHON *a quo* telah terselesaikan di tingkat TPS dan PPK, hal itu dapat terlihat pada terdapatnya tanda tangan Saksi PEMOHON. Terlebih lagi, peraih suara terbanyak pada TPS 001, Desa Bhone Kainsetala adalah

PEMOHON sendiri. Olehnya itu, dalil PEMOHON mestilah ditolak.

Ad.2 Mengenai Peristiwa di Kecamatan Katobu

- 7) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 34 huruf C angka 3 tabel VI mendalilkan yang pada pokoknya bahwa PPK Kecamatan Katobu tidak mencantumkan waktu kunjungan ke rumah pemilih yang berhalangan hadir;
- 8) Bahwa terhadap dalil PEMOHON *a quo* kabur. Sebab, secara kewenangan PPK tidak diembani tugas untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah pemilih yang berhalangan hadir menyalurkan hak pilihnya ke TPS. Kewenangan PPK telah diatur secara *expressive verbis* di dalam Pasal 17 UU 1/2015 jo Pasal 8 PKPU 8/2022 sebagai berikut:

Pasal 17 UU 1/2015 jo Pasal 8 PKPU 8/2022

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

- a. *membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;*
- b. *membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;*
- c. *melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
- d. *menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;*
- e. *mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;*
- f. *melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;*


- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;*
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;*
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;*
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;*
 - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;*
 - m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;*
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 9) Bahwa sesungguhnya yang memiliki tugas dan wewenang untuk mendatangi rumah pemilih karena tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS adalah KPPS bukan PPK. Hal itu sebagaimana diatur didalam Keputusan KPU 1774 pada BAB II angka 5 huruf b angka 1) halaman 50, yang selengkapnya kami kutp sebagai berikut:
- KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan*

Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

o. Mengenai salah penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan Tongkuno

- 1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 34 huruf C angka 3 tabel VI mendalilkan yang pada pokoknya bahwa telah dilakukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan Tongkuno pada DPK yang semula 46 orang untuk laki-laki dan 62 orang untuk perempuan dengan total 108 orang pemilih. Begitupun terhadap DPK telah terjadi kesalahan penulisan;
- 2) Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan terdapat Formulir Mode D.Hasil Kecamatan Tongkuno pada kolom Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya, akan tetapi telah dilakukan perbaikan pada Formulir D.Hasil Kabupaten;

Formulir Model D.Hasil-KWK-Kecamatan



Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi

TONGKUNO
MUNA
SULAWESI TENGGARA


MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KWK-Desa/Wilayah HALAMAN
2 - 1

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

| NO. | URAIAN | JUMLAH | |
|-----------------------------|---|--------|--------|
| | | 1 | 2 |
| 1 | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | 3 | 4 |
| A DATA PEMILIH | | | |
| | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 5.512 |
| | | PK | 5.928 |
| | | JML | 11.440 |
| B PENGGUNA HAK PILIH | | | |
| 1. | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 3.158 |
| | | PK | 4.318 |
| | | JML | 7.486 |
| 2. | Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 5 |
| | | PK | 8 |
| | | JML | 14 |
| 3. | Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 48 |
| | | PK | 87 |
| | | JML | 135 |
| 4. | Jumlah Pengguna Hak Pilih (A.1+A.2+A.3) | LK | 3.200 |
| | | PK | 4.383 |
| | | JML | 7.603 |

(vide: Bukti T-14)


Formulir Model D.Hasil-KABKO-KWK-Bupati

|  Kabupaten / Kota : MUNA Provinsi : SULAWESI TENGGARA | | MODEL D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota Halaman 2-1 Lembar 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-----|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---|--------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|---|----|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|----|-----|---|---|---|----|----|---|----|---|---|---|---|---|----|--|---|-----|--|----|---|----|---|----|----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|----|-----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="17">RINCIAN</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">I</td> <td>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap</td> <td>LK</td><td>4.140</td><td>2.378</td><td>1.683</td><td>4.260</td><td>4.916</td><td>8.620</td><td>4.362</td><td>5.323</td><td>4.578</td><td>3.010</td><td>3.586</td><td>4.630</td><td>4.319</td><td>2.052</td><td>5.512</td><td>63.369</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td>4.350</td><td>2.474</td><td>1.829</td><td>4.252</td><td>5.426</td><td>10.014</td><td>4.783</td><td>5.727</td><td>4.972</td><td>3.255</td><td>3.745</td><td>5.071</td><td>4.653</td><td>2.241</td><td>5.928</td><td>68.720</td><td>132.089</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">A</td> <td rowspan="3">DATA PEMILIH</td> <td>LK</td><td>4.140</td><td>2.378</td><td>1.683</td><td>4.260</td><td>4.916</td><td>8.620</td><td>4.362</td><td>5.323</td><td>4.578</td><td>3.010</td><td>3.586</td><td>4.630</td><td>4.319</td><td>2.052</td><td>5.512</td><td>63.369</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td>4.350</td><td>2.474</td><td>1.829</td><td>4.252</td><td>5.426</td><td>10.014</td><td>4.783</td><td>5.727</td><td>4.972</td><td>3.255</td><td>3.745</td><td>5.071</td><td>4.653</td><td>2.241</td><td>5.928</td><td>68.720</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td>8.490</td><td>4.852</td><td>3.512</td><td>8.512</td><td>10.342</td><td>18.634</td><td>9.145</td><td>11.050</td><td>9.950</td><td>6.265</td><td>7.331</td><td>9.701</td><td>8.972</td><td>4.293</td><td>11.440</td><td>132.089</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">B</td> <td rowspan="3">PENGGUNA HAK PILIH</td> <td>LK</td><td>2.964</td><td>1.693</td><td>1.223</td><td>3.145</td><td>3.541</td><td>6.364</td><td>3.326</td><td>3.976</td><td>3.505</td><td>2.211</td><td>2.713</td><td>3.187</td><td>2.808</td><td>1.403</td><td>3.168</td><td>45.227</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td>3.583</td><td>1.944</td><td>1.510</td><td>3.640</td><td>4.368</td><td>8.147</td><td>4.098</td><td>4.829</td><td>4.211</td><td>2.640</td><td>3.141</td><td>3.971</td><td>3.669</td><td>1.849</td><td>4.318</td><td>55.918</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td>6.547</td><td>3.637</td><td>2.733</td><td>6.785</td><td>7.909</td><td>14.511</td><td>7.424</td><td>8.805</td><td>7.716</td><td>4.851</td><td>5.854</td><td>7.158</td><td>6.477</td><td>3.252</td><td>7.486</td><td>101.145</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya</td> <td>LK</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>49</td><td>7</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>12</td><td></td><td>3</td><td>95</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td><td>17</td><td>8</td><td>7</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td><td></td><td>6</td><td>68</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td>6</td><td>1</td><td>6</td><td>55</td><td>24</td><td>9</td><td>11</td><td>2</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>20</td><td></td><td>9</td><td>163</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya</td> <td>LK</td><td>9</td><td>21</td><td>5</td><td>12</td><td>45</td><td>98</td><td>20</td><td>29</td><td>9</td><td>7</td><td>8</td><td>26</td><td>27</td><td>10</td><td>47</td><td>381</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td>13</td><td>18</td><td>7</td><td>9</td><td>33</td><td>94</td><td>13</td><td>32</td><td>2</td><td>5</td><td>7</td><td>20</td><td>29</td><td>15</td><td>64</td><td>361</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td>22</td><td>39</td><td>12</td><td>21</td><td>78</td><td>192</td><td>33</td><td>61</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>46</td><td>56</td><td>31</td><td>113</td><td>742</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya</td> <td>LK</td><td>2.977</td><td>1.715</td><td>1.230</td><td>3.206</td><td>3.593</td><td>6.463</td><td>3.350</td><td>4.006</td><td>3.517</td><td>2.221</td><td>2.723</td><td>3.215</td><td>2.847</td><td>1.420</td><td>3.220</td><td>45.703</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td>3.598</td><td>1.962</td><td>1.521</td><td>3.655</td><td>4.418</td><td>8.249</td><td>4.118</td><td>4.862</td><td>4.215</td><td>2.646</td><td>3.150</td><td>3.995</td><td>3.706</td><td>1.864</td><td>4.388</td><td>56.347</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td>6.575</td><td>3.677</td><td>2.751</td><td>6.861</td><td>8.011</td><td>14.712</td><td>7.468</td><td>8.868</td><td>7.732</td><td>4.867</td><td>5.873</td><td>7.210</td><td>6.553</td><td>3.284</td><td>7.608</td><td>102.050</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</td> <td>LK</td><td>2.964</td><td>1.693</td><td>1.223</td><td>3.145</td><td>3.541</td><td>6.364</td><td>3.326</td><td>3.976</td><td>3.505</td><td>2.211</td><td>2.713</td><td>3.187</td><td>2.808</td><td>1.403</td><td>3.168</td><td>45.227</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td>3.583</td><td>1.944</td><td>1.510</td><td>3.640</td><td>4.368</td><td>8.147</td><td>4.098</td><td>4.829</td><td>4.211</td><td>2.640</td><td>3.141</td><td>3.971</td><td>3.669</td><td>1.849</td><td>4.318</td><td>55.918</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td>6.547</td><td>3.637</td><td>2.733</td><td>6.785</td><td>7.909</td><td>14.511</td><td>7.424</td><td>8.805</td><td>7.716</td><td>4.851</td><td>5.854</td><td>7.158</td><td>6.477</td><td>3.252</td><td>7.486</td><td>101.145</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 4.140 | 2.378 | 1.683 | 4.260 | 4.916 | 8.620 | 4.362 | 5.323 | 4.578 | 3.010 | 3.586 | 4.630 | 4.319 | 2.052 | 5.512 | 63.369 | JML | 4.350 | 2.474 | 1.829 | 4.252 | 5.426 | 10.014 | 4.783 | 5.727 | 4.972 | 3.255 | 3.745 | 5.071 | 4.653 | 2.241 | 5.928 | 68.720 | 132.089 | A | DATA PEMILIH | LK | 4.140 | 2.378 | 1.683 | 4.260 | 4.916 | 8.620 | 4.362 | 5.323 | 4.578 | 3.010 | 3.586 | 4.630 | 4.319 | 2.052 | 5.512 | 63.369 | FR | 4.350 | 2.474 | 1.829 | 4.252 | 5.426 | 10.014 | 4.783 | 5.727 | 4.972 | 3.255 | 3.745 | 5.071 | 4.653 | 2.241 | 5.928 | 68.720 | JML | 8.490 | 4.852 | 3.512 | 8.512 | 10.342 | 18.634 | 9.145 | 11.050 | 9.950 | 6.265 | 7.331 | 9.701 | 8.972 | 4.293 | 11.440 | 132.089 | B | PENGGUNA HAK PILIH | LK | 2.964 | 1.693 | 1.223 | 3.145 | 3.541 | 6.364 | 3.326 | 3.976 | 3.505 | 2.211 | 2.713 | 3.187 | 2.808 | 1.403 | 3.168 | 45.227 | FR | 3.583 | 1.944 | 1.510 | 3.640 | 4.368 | 8.147 | 4.098 | 4.829 | 4.211 | 2.640 | 3.141 | 3.971 | 3.669 | 1.849 | 4.318 | 55.918 | JML | 6.547 | 3.637 | 2.733 | 6.785 | 7.909 | 14.511 | 7.424 | 8.805 | 7.716 | 4.851 | 5.854 | 7.158 | 6.477 | 3.252 | 7.486 | 101.145 | 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 4 | 1 | 2 | 49 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | | 3 | 95 | FR | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | | 6 | 68 | JML | 6 | 1 | 6 | 55 | 24 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 20 | | 9 | 163 | 2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya | LK | 9 | 21 | 5 | 12 | 45 | 98 | 20 | 29 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | 10 | 47 | 381 | FR | 13 | 18 | 7 | 9 | 33 | 94 | 13 | 32 | 2 | 5 | 7 | 20 | 29 | 15 | 64 | 361 | JML | 22 | 39 | 12 | 21 | 78 | 192 | 33 | 61 | 11 | 12 | 15 | 46 | 56 | 31 | 113 | 742 | 3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 2.977 | 1.715 | 1.230 | 3.206 | 3.593 | 6.463 | 3.350 | 4.006 | 3.517 | 2.221 | 2.723 | 3.215 | 2.847 | 1.420 | 3.220 | 45.703 | FR | 3.598 | 1.962 | 1.521 | 3.655 | 4.418 | 8.249 | 4.118 | 4.862 | 4.215 | 2.646 | 3.150 | 3.995 | 3.706 | 1.864 | 4.388 | 56.347 | JML | 6.575 | 3.677 | 2.751 | 6.861 | 8.011 | 14.712 | 7.468 | 8.868 | 7.732 | 4.867 | 5.873 | 7.210 | 6.553 | 3.284 | 7.608 | 102.050 | 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) | LK | 2.964 | 1.693 | 1.223 | 3.145 | 3.541 | 6.364 | 3.326 | 3.976 | 3.505 | 2.211 | 2.713 | 3.187 | 2.808 | 1.403 | 3.168 | 45.227 | FR | 3.583 | 1.944 | 1.510 | 3.640 | 4.368 | 8.147 | 4.098 | 4.829 | 4.211 | 2.640 | 3.141 | 3.971 | 3.669 | 1.849 | 4.318 | 55.918 | JML | 6.547 | 3.637 | 2.733 | 6.785 | 7.909 | 14.511 | 7.424 | 8.805 | 7.716 | 4.851 | 5.854 | 7.158 | 6.477 | 3.252 |
| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 4.140 | 2.378 | 1.683 | 4.260 | 4.916 | 8.620 | 4.362 | 5.323 | 4.578 | 3.010 | 3.586 | 4.630 | 4.319 | 2.052 | 5.512 | 63.369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JML | 4.350 | 2.474 | 1.829 | 4.252 | 5.426 | 10.014 | 4.783 | 5.727 | 4.972 | 3.255 | 3.745 | 5.071 | 4.653 | 2.241 | 5.928 | 68.720 | 132.089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | DATA PEMILIH | LK | 4.140 | 2.378 | 1.683 | 4.260 | 4.916 | 8.620 | 4.362 | 5.323 | 4.578 | 3.010 | 3.586 | 4.630 | 4.319 | 2.052 | 5.512 | 63.369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FR | 4.350 | 2.474 | 1.829 | 4.252 | 5.426 | 10.014 | 4.783 | 5.727 | 4.972 | 3.255 | 3.745 | 5.071 | 4.653 | 2.241 | 5.928 | 68.720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JML | 8.490 | 4.852 | 3.512 | 8.512 | 10.342 | 18.634 | 9.145 | 11.050 | 9.950 | 6.265 | 7.331 | 9.701 | 8.972 | 4.293 | 11.440 | 132.089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | PENGGUNA HAK PILIH | LK | 2.964 | 1.693 | 1.223 | 3.145 | 3.541 | 6.364 | 3.326 | 3.976 | 3.505 | 2.211 | 2.713 | 3.187 | 2.808 | 1.403 | 3.168 | 45.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FR | 3.583 | 1.944 | 1.510 | 3.640 | 4.368 | 8.147 | 4.098 | 4.829 | 4.211 | 2.640 | 3.141 | 3.971 | 3.669 | 1.849 | 4.318 | 55.918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JML | 6.547 | 3.637 | 2.733 | 6.785 | 7.909 | 14.511 | 7.424 | 8.805 | 7.716 | 4.851 | 5.854 | 7.158 | 6.477 | 3.252 | 7.486 | 101.145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 4 | 1 | 2 | 49 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | | 3 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FR | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | | 6 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JML | 6 | 1 | 6 | 55 | 24 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 20 | | 9 | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya | LK | 9 | 21 | 5 | 12 | 45 | 98 | 20 | 29 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | 10 | 47 | 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FR | 13 | 18 | 7 | 9 | 33 | 94 | 13 | 32 | 2 | 5 | 7 | 20 | 29 | 15 | 64 | 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JML | 22 | 39 | 12 | 21 | 78 | 192 | 33 | 61 | 11 | 12 | 15 | 46 | 56 | 31 | 113 | 742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | | LK | 2.977 | 1.715 | 1.230 | 3.206 | 3.593 | 6.463 | 3.350 | 4.006 | 3.517 | 2.221 | 2.723 | 3.215 | 2.847 | 1.420 | 3.220 | 45.703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FR | 3.598 | 1.962 | 1.521 | 3.655 | 4.418 | 8.249 | 4.118 | 4.862 | 4.215 | 2.646 | 3.150 | 3.995 | 3.706 | 1.864 | 4.388 | 56.347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JML | 6.575 | 3.677 | 2.751 | 6.861 | 8.011 | 14.712 | 7.468 | 8.868 | 7.732 | 4.867 | 5.873 | 7.210 | 6.553 | 3.284 | 7.608 | 102.050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) | LK | 2.964 | 1.693 | 1.223 | 3.145 | 3.541 | 6.364 | 3.326 | 3.976 | 3.505 | 2.211 | 2.713 | 3.187 | 2.808 | 1.403 | 3.168 | 45.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FR | 3.583 | 1.944 | 1.510 | 3.640 | 4.368 | 8.147 | 4.098 | 4.829 | 4.211 | 2.640 | 3.141 | 3.971 | 3.669 | 1.849 | 4.318 | 55.918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JML | 6.547 | 3.637 | 2.733 | 6.785 | 7.909 | 14.511 | 7.424 | 8.805 | 7.716 | 4.851 | 5.854 | 7.158 | 6.477 | 3.252 | 7.486 | 101.145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(vide: Bukti T-124)

- 3) Bahwa begitupun pula dengan DPK, yang sebelumnya telah terjadi kesalahan penulisan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan telah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten sebagai berikut.

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Tongkuno

|  Kecamatan : TONGKUNO Kabupaten / Kota : MUNA Provinsi : SULAWESI TENGGARA | | MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|-------|-----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|--------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="17">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">I</td> <td>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap</td> <td>LK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.512</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11.440</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">A</td> <td rowspan="3">DATA PEMILIH</td> <td>LK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.168</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.318</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7.486</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya</td> <td>LK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya</td> <td>LK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>48</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>63</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>108</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya</td> <td>LK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.220</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.388</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7.608</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</td> <td>LK</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.168</td> </tr> <tr> <td>FR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.318</td> </tr> <tr> <td>JML</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7.486</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO. | URAIAN | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | | | | | | | | | | | | | | | | 5.512 | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.440 | A | DATA PEMILIH | LK | | | | | | | | | | | | | | | | 3.168 | FR | | | | | | | | | | | | | | | | 4.318 | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.486 | 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | FR | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | FR | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.220 | FR | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.388 | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.608 | 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.168 | FR | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.318 | JML | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | URAIAN | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | | | | | | | | | | | | | | | | 5.512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | DATA PEMILIH | LK | | | | | | | | | | | | | | | | 3.168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FR | | | | | | | | | | | | | | | | 4.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FR | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FR | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FR | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) | LK | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FR | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JML | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(vide: Bukti T-14)

Formulir Model D.Hasil Kabupaten

| NO. | | URAHAN | KABUPATEN / KOTA | | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|-----|--|--|------------------|----------|--------------------|----------|-------------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|--------|-------|-------|----------|--------|---------|
| 1 | | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | NAPALABANO | MALIKANG | WAKESURMBA SELAYAN | LABALEPA | BATALLAWORO | KATORU | DURUKA | LEHBA | WATOPUTE | KONTUNAGA | KABANGKA | KABAWO | PARGI | BONE | TUNGKUNO | JUMLAH | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| A | | DATA PEMILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 4.140 | 2.378 | 1.683 | 4.290 | 4.916 | 8.620 | 4.362 | 5.323 | 4.579 | 3.010 | 3.586 | 4.630 | 4.319 | 2.052 | 5.512 | 63.269 |
| | | | PR | 4.350 | 2.474 | 1.829 | 4.352 | 5.426 | 10.014 | 4.763 | 3.777 | 4.972 | 3.255 | 3.745 | 5.071 | 4.553 | 2.241 | 3.928 | 68.720 |
| | | | JML | 8.490 | 4.852 | 3.512 | 8.642 | 10.342 | 18.634 | 9.145 | 11.050 | 9.550 | 6.265 | 7.331 | 9.701 | 6.572 | 4.293 | 11.440 | 132.089 |
| B | | PENGGUNA HAK PILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 2.864 | 1.693 | 1.223 | 3.143 | 3.541 | 6.364 | 3.026 | 3.976 | 3.505 | 2.211 | 2.713 | 3.187 | 2.808 | 1.463 | 3.168 | 45.277 |
| | | | PR | 3.583 | 1.944 | 1.510 | 3.640 | 4.368 | 8.147 | 4.098 | 4.829 | 4.211 | 2.640 | 3.141 | 3.971 | 3.569 | 1.849 | 4.318 | 55.918 |
| | | | JML | 6.547 | 3.637 | 2.733 | 6.783 | 7.909 | 14.511 | 7.424 | 8.805 | 7.716 | 4.851 | 5.854 | 7.158 | 4.477 | 3.252 | 7.486 | 101.145 |
| | | 2. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 4 | 1 | 2 | 49 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 85 |
| | | | PR | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 68 |
| | | | JML | 6 | 1 | 6 | 55 | 24 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 20 | 11 | 7 | 163 |
| | | 3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 9 | 21 | 5 | 12 | 45 | 98 | 20 | 29 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | 16 | 49 | 281 |
| | | | PR | 15 | 18 | 7 | 9 | 33 | 94 | 13 | 32 | 2 | 5 | 7 | 20 | 29 | 15 | 64 | 361 |
| | | | JML | 24 | 39 | 12 | 21 | 78 | 192 | 33 | 61 | 11 | 12 | 15 | 46 | 56 | 31 | 113 | 742 |
| | | 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) | LK | 2.977 | 1.715 | 1.230 | 3.206 | 3.593 | 6.463 | 3.350 | 4.005 | 3.517 | 2.221 | 2.723 | 3.215 | 2.847 | 1.479 | 3.281 | 45.700 |
| | | | PR | 3.588 | 1.962 | 1.521 | 3.655 | 4.418 | 8.249 | 4.118 | 4.862 | 4.215 | 2.646 | 3.150 | 3.995 | 3.706 | 1.864 | 4.388 | 56.347 |
| | | | JML | 6.575 | 3.677 | 2.751 | 6.861 | 8.011 | 14.712 | 7.468 | 8.868 | 7.732 | 4.867 | 5.873 | 7.210 | 4.653 | 3.343 | 7.669 | 102.047 |

(vide: Bukti T-124)


4) Bahwa oleh karena telah terjadi perubahan pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten. Dan hal yang dipersoalkan oleh PEMOHON a quo tidak berdampak pada signifikansi perolehan suara, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON a quo.

p. Mengenai Perbedaan Data Pemilih DPT yang ditulis di dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Watopute

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya halaman 34 huruf C angka 3 tabel VI yang pada pokoknya terjadi kesalahan penulisan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan Watopute khususnya pada DPT Pemilih yakni Laki 4.585 orang dan Perempuan 4.965 dengan total 9.550 orang. Tetapi yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah laki-laki 4.578 orang dan perempuan 4.972 orang dengan jumlah 9.550 orang;
- 2) Bahwa benar telah terjadi kesalahan pengisian jumlah DPT jenis kelamin Laki-Laki dan Perempuan dalam Formulir Model C.Hasil pada TPS 002, Desa Labaha. Akan tetapi pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan, kesalahan pengisian tersebut tidak dikoreksi dan tidak dilakukan perbaikan karena tidak diketahui. Sehingga mempengaruhi jumlah data DPT Laki-Laki dan Perempuan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan yaitu jumlah DPT Laki-Laki berjumlah 186 dan Perempuan 219.


- 3) Bahwa saat PPK Kecamatan Watopute membacakan Formulir D.Hasil Kecamatan pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Muna menemukan kesalahan pengisian jumlah DPT Laki-Laki dan Perempuan, lalu PPK melakukan penelusuran atas kesalahan tersebut pada Formulir Model C.Hasil dan ditemukan telah terjadi kesalahan pada TPS 002 Desa Labaha, maka atas kesalahan tersebut dilakukan perbaikan dengan melakukan pembetulan angka menjadi yang sebenarnya pada D.Hasil Kecamatan yang dipegang Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten, dan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Muna serta arsip yang dipegang PPK dan dibubuhi paraf PPK dan saksi;
- 4) Bahwa terhadap peristiwa tersebut juga telah dicatatkan di dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus tingkat Kabupaten serta D.Hasil Kabupaten dilakukan penulisan data DPT Laki-Laki dan Perempuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna.
- 5) Bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan pada jumlah DPT pemilih pada Formulir D.Hasil Kecamatan, tetapi telah dilakukan perbaikan pada Formulir D.Hasil Kabupaten, sebagai berikut:

Formulir D.Hasil Kecamatan Watopute

|  Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi | | : WATOPUTE : MUNA : SULAWESI TENGGARA | | MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 2-1 | |
|---|---|---|---|--|-------|
| | | | | | |
| NO. | URAIAN | URAIAN | | JUMLAH | |
| 1 | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | 2 | 3 | 4 | |
| A | DATA PEMILIH | | | LK | 4.583 |
| | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | | | PR | 4.965 |
| | | | | JML | 9.550 |

(vide: Bukti T-17)

Formulir D.Hasil Kabupaten

|  Kabupaten / Kota Provinsi | | : MUNA : SULAWESI TENGGARA | | MODEL D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota Halaman 2-1 Lembar 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|----------|---|----------|--------------------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|---------|--------------------|
| | | | | | | REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH PENDAHAN |
| 1 | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | NAPABALANO | MALIGANO | WAKORUMBA SELATAN | LASALEPA | BATALAWORU | KATOBU | DURUKA | LOHIA | WATOPUTE | KONTUNAGA | KABANGKA | KABAWO | PARIGI | BONE | TONGKUNO | 18 | 19 | |
| A | DATA PEMILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 4.140 | 2.378 | 1.683 | 4.260 | 4.916 | 8.620 | 4.362 | 5.323 | 4.578 | 3.010 | 3.586 | 4.630 | 4.319 | 2.052 | 5.512 | 63.369 | |
| | | PR | 4.350 | 2.474 | 1.829 | 4.252 | 5.426 | 10.014 | 4.783 | 5.727 | 4.972 | 3.255 | 3.745 | 5.071 | 4.653 | 2.241 | 5.928 | 68.720 | |
| | | JML | 8.490 | 4.852 | 3.512 | 8.512 | 10.342 | 18.634 | 9.145 | 11.050 | 9.550 | 6.265 | 7.331 | 9.701 | 8.972 | 4.293 | 11.440 | 132.089 | |

(vide: Bukti T-124)


6) Berdasarkan uraian diatas, nampak perihal yang dipersoalkan oleh PEMOHON a quo tidak berdampak pada signifikansi perolehan suara, maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak PEMOHONan PEMOHON a quo.

q. Mengenai terjadi perbedaan data pada DPT pemilih di Formulir D.Hasil Kecamatan Kabangka

1) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 35 huruf C angka 3 tabel VI mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terjadi kesalahan penulisan pada DPT Pemilih di Formulir D.Hasil Kecamatan Kabangka dimana pemilih laki-laki 3.590 orang dan perempuan 7.331 orang tetapi yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah laki-laki 3.586 orang dan perempuan 7.331 orang.

2) Bahwa benar terjadi kesalahan penulisan pada DPT Pemilih di Formulir D.Hasil Kecamatan Kabangka, tetapi telah dilakukan perbaikan di Formulir Model D.Hasil Kabupaten sebagai berikut:


Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kabangka

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--|
|  | Kecamatan | : KABANGKA | MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 2-1 |
| | Kabupaten / Kota | : MUNA | |
| | Provinsi | : SULAWESI TENGGARA | |

REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

| NO. | URAIAN | JUMLAH | |
|-----|---|--------|-------|
| | | 3 | 4 |
| I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | |
| 1 | 2 | | |
| A | DATA PEMILIH | | |
| | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 3.590 |
| | | PR | 3.741 |
| | | JML | 7.331 |
| B | PENGGUNA HAK PILIH | | |

(vide: Bukti T-17)**Formulir Model D.Hasil Kabupaten**

| | | | |
|---|------------------|---------------------|---|
|  | Kabupaten / Kota | : MUNA | MODEL D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota Halaman 2-1 Lembar 1 |
| | Provinsi | : SULAWESI TENGGARA | |

| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH PINDAHAN |
|-----|--|------------|----------|-------------------|-----------|------------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|---------|-----------------|
| | | NAPABALANG | MALIGANO | WAKORUMBA SELATAN | LASALEMPA | BATALAWORU | KATOBU | DURUKA | LOHIA | WATOPUTE | KONTUNAGA | KABANGKA | GABAWO | PARIGH | BONE | TONGKONO | 18 | 19 | |
| I | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| A | DATA PEMILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 4.140 | 2.378 | 1.683 | 4.260 | 4.916 | 8.620 | 4.362 | 3.323 | 4.578 | 3.010 | 3.586 | 4.630 | 4.319 | 2.052 | 5.512 | 63.369 | |
| | | PR | 4.350 | 2.474 | 1.829 | 4.252 | 5.426 | 10.014 | 4.783 | 3.727 | 4.972 | 3.255 | 3.745 | 5.071 | 4.653 | 2.241 | 5.928 | 68.720 | |
| | | JML | 8.490 | 4.852 | 3.512 | 8.512 | 10.342 | 18.634 | 9.145 | 11.030 | 9.550 | 6.265 | 7.331 | 9.701 | 8.972 | 4.293 | 11.440 | 132.089 | |
| B | PENGGUNA HAK PILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap suara | LK | 2.964 | 1.693 | 1.223 | 3.145 | 3.541 | 6.364 | 3.326 | 3.976 | 3.505 | 2.211 | 2.713 | 3.187 | 2.808 | 1.403 | 3.168 | 45.227 | |
| | | PR | 3.583 | 1.944 | 1.510 | 3.640 | 4.368 | 8.147 | 4.098 | 4.829 | 4.211 | 2.640 | 3.141 | 3.971 | 3.669 | 1.849 | 4.318 | 55.918 | |

(vide: Bukti T-124)

- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas, nampak perihal yang dipersoalkan oleh PEMOHON a quo tidak berdampak pada signifikansi perolehan suara, maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak PEMOHONan PEMOHON a quo.

- 4) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti keseluruhan dalil PEMOHON di dalam permohonannya a quo. Sehingga sudah sepatutnya MAHKAMAH untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak terbukti untuk seluruhnya, dan karenanya seluruh pokok permohonan PEMOHON haruslah ditolak.

III. KESIMPULAN

Atas seluruh uraian jawaban sebagaimana Eksepsi dan bantahan terhadap pokok permohonan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*;
- 2) PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing in persona*) mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;
- 3) Permohonan yang diajukan mengandung kekaburan (*Obscuur Libellum*);
- 4) Tidak terbukti adanya penyalahgunaan mutasi, program dan kewenangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024;
- 5) Tidak terbukti adanya politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna 2024;
- 6) Tidak terdapat pelanggaran pada tahapan pemungutan suara yang berkonsekuensi atas Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024;

- 7) Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna 2024 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERMOHON.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Perolehan Suara |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Drs. H. BACHRUN, M.Si LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H | 53.908 |
| 2 | LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si | 47.655 |
| 3 | LA ODE KARDINI, S.E., M.Si Dr. Ir. NOOR DHANI, S.T., M.T., I.P.M. | 11.563 |
| 4 | Dr. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AWAL JAYA BOLOMBO, S.H, | 4.331 |
| 5 | LA ODE HUSUNA RINGA JHON, S.E., M.M. Drs. SYARIFUDDIN, M.M | 629 |
| Jumlah Seluruh Suara Sah | | 118.086 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-124 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 bertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dengan melampirkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/1790/Dukcapil.Ses, bertanggal 18 Desember 2024 perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1402/PY.02.1/7403/2/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Permintaan Informasi dan Dokumen Pendukung terkait Pelaksanaan Mutasi Pejabat Lingkup Pemda Muna ditujukan kepada Bupati Muna Cq. Sekretaris Daerah Kab. Muna;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Sekretariat Daerah Nomor 800.1.3/3234 pada tanggal 27 Desember 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Muna Nomor 242 Tahun 2024 tentang Pengukuhan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 06 Juni 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2597/SJ perihal Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, bertanggal 3 Juni 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 3433/R-AK.02.02/SD/K/2024 perihal Pertimbangan Teknis Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 14 Mei 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2265/OTDA perihal Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, bertanggal 22 Maret 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 3895/R-AK.02.02/SD/K/2024 perihal Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Pemberhentian, Promosi, dan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 6 Juni 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4872/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, bertanggal 2 Juli 2024;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Muna Nomor 345 Tahun 2024 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 12 Juli 2024;
Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 242 Tahun 2024 tentang Pengukuhan, Pelantikan, Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, bertanggal 6 Juni 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Tongkuno;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Kabawo;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Kontu Kowuna;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Watopute;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Kabangka;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Parigi;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Bone;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Tangkap Layar Berita Media Online Radar Sultra, bertanggal 17 Oktober 2024;
<https://radarsultra.co/pj-gubernur-sultra-salurkan-bantuan-dan-tinjau-gerakan-pasar-murah-di-muna/>;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 874 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 24 September 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye

Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 20 September 2024;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 23 September 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1326/PL.02.4-Und/7403/4/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi yang ditunjukkan kepada para pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1327/PL.02.4-Und/7403/4/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi yang ditunjukkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1328/PL.02.4-Und/7403/4/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi yang ditunjukkan kepada Kapolres Muna;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1329/PL.02.4-Und/7403/4/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi yang ditunjukkan kepada Dandim 1416 Muna;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1330/PL.02.4-Und/7403/4/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi yang ditunjukkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1331/PL.02.4-Und/7403/4/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi yang ditunjukkan

- kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembersihan APK pada tanggal 23 November 2024 bertempat di DJ Hotel Jln. Bypass Raha;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye, tanggal 23 November 2024.
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 388.a/PL.02.4-BA/7403/2024 tentang Rapat Koordinasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Pada Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 November 2024
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dengan Nomor Surat 1348/PL.02.4-Und/7403/4/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Pembersihan Alat Peraga Kampanye, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Muna.
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1349/PL.02.4-SD/7403/2024 tanggal 24 November 2024, perihal Permintaan Personil, yang ditujukan kepada Kapolres Muna.
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Muna Nomor: Sprin/1009/XI/OPS.1.3/2024, bertanggal 24 November 2024.
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 1350/PL.02.4-SD/7403/2024, tanggal 24 November 2024, perihal Permintaan Personil yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna.
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Nomor: 090/1179/SATPOL-PP/XI/2024, bertanggal 25 November 2024.
 39. Bukti T-39 : Fotokopi Dokumentasi Pembersihan Alat Peraga Kampanye Tanggal 25 November 2024.
 40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Maligano.

41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Pasi Kolaga.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Pasir Putih.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Batukara.
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI di Kecamatan Wakorumba Selatan.
45. Bukti T-45 : Fotokopi Undangan Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 02/PM.03.02/K.SG.20/10/2024, bertanggal 5 Oktober 2024, Perihal Undangan Narasumber
46. Bukti T-46 : Fotokopi Dokumentasi foto sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Bupati Muna Nomor 800.1/2050 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditanda tangani oleh Pjs Bupati Muna YUNI NURMALAWATI tanggal 27 September 2024;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan Sosialisasi bahaya *money politics*;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 6 Desa Napabalano Kecamatan Napabalo;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Tangkap Layar Situs Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 670/02-3/SET-02/XII/2024, bertanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 670/02-3/SET-02/XII/2024, bertanggal 31 Desember 2024;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Specimen Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Specimen Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Specimen Berita Acara, Sertifikat, Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

54. Bukti T-54 : Tangkapan layar percakapan *WhatsApp Group* (WAG) PPK Pilkada Muna;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Bone atas nama WA ODE NURLANSI;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Kabangka atas nama LA ODE BAIDAR;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Kabawo atas nama MUHAMMAD WAHYUDI;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Batalaiworu atas nama ARDIN;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Batukara atas nama MUHAMMAD SAFRI;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Duruka atas nama SYAWAL DANUWAIJAYA;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Kontunaga atas nama LA SANUSI;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Lasalepa atas nama LA IMAN SUPA;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Lohia atas nama SUPRIK LA NIA;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Maligano atas nama ASRUNT;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Napabalano atas nama LA HARUDIN;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Parigi atas nama LA ODE RAHMAN;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Pasir Putih atas nama LA RUHIJA;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Wakorumba Selatan atas nama MUHAMMAD GUSRIL VIRISI;

69. Bukti T-69 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Kontukowuna atas nama NOFRAN JAYA;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Watopute atas nama LA ODE MIRFAN ZAELAND;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Tongkuno Selatan atas nama MUHAMMAD ALAMSYAH HULU;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Tongkuno atas nama ILHAM KARIZAL;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kecamatan Towea atas nama SARIF;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Surat Klarifikasi CV. Irda Utama tanggal 26 November 2024;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1164/PP.04-SD/2022 tanggal 18 November 2022 Perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.9/9095/SJ Perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 tanggal 30 Desember 2022;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 613/SDM.12-SD/04/2024 Perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 21 April 2024;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir MODEL A.Daftar Pemilih pada TPS 002 di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir MODEL A.Daftar Pemilih di TPS 003 Desa Labone, Kecamatan Lasalepa;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK WA ODE NIA umur 57 tahun;

81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK WA ODE NIA umur 41 tahun;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 003 Desa Labone, Kecamatan Lasalepa;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI di TPS 003, Desa Labone, Kecamatan Lasalepa;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-BUPATI di Kecamatan Lasalepa;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Muna;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Tangkap Layar Cek Daftar Pemilih Tetap Online;
90. Bukti T-90 : Fotokopi KTP-el atas nama JULIANTI;
91. Bukti T-91 : Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 001, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Tangkap Layar Cek Daftar Pemilih Tetap Online;
93. Bukti T-93 : Fotokopi KTP-el atas nama MUJAHID;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 002, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK di TPS 002, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano;

96. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano
97. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 003 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model A.KabKo Daftar Pemilih;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di TPS 002, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano;
101. Bukti T-101 : Fotokopi KTP-el atas nama HASTI ERNI;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 003, Kelurahan Tampo;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK *speciment*;
104. Bukti T-104 : Fotokopi KTP-el atas nama SITTI RAHMAWATI ODE;
105. Bukti T-105 : Fotokopi KTP-el atas nama SAHABUL HIJRI;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Pentiro Kecamatan Napabalano;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001 Desa Pentiro Kecamatan Napabalano;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Formulir Model A-Daftar Pemilih di TPS 001, Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK di TPS 001 Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano;
110. Bukti T-110 : Fotokopi KTP-el atas nama La Ode Ronal;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, bertanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
112. Bukti T-112 : Fotokopi KTP-el atas nama WA ODE RAHMA GUSNI;
113. Bukti T-113 : Fotokopi KTP-el atas nama LA ODE MILA;
114. Bukti T-114 : Fotokopi KTP-el atas nama WA UCI;

115. Bukti T-115 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002, Desa Lohia, Kecamatan Lohia;
116. Bukti T-116 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati di Kecamatan Lohia;
117. Bukti T-117 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan Lohia pada tingkat Kecamatan;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 002, Desa Lakarama, Kecamatan Towea;
119. Bukti T-119 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 003 Desa Bhontu-Bhontu, Kecamatan Towea;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 006 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur di TPS 001 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati di TPS 001, Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan Tongkuno;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 001 Desa Bone Kainsitala, Kecamatan Bone;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil-KABKO-KWK-Bupati.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Muna Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dasar kewenangan Mahkamah berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya ditulis UU Pemilihan) yang berbunyi:

Perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- 2) Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” yang terdapat di dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022), bertanggal 29 September 2022. Sehingga mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dulunya bersifat sementara dalam hal mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, kini menjadi permanen karena Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan dalam norma Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tidak akan lagi dibentuk. Putusan MK 85/2022 paragraf 3.22, halaman 42 sebagai berikut:

Inkonstitusional Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan

peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2006 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- 3) Bahwa kemudian didalam Pasal (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya ditulis Peraturan MK 3/2024), secara terang menegaskan bahwa “objek dalam perkara Perselisihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”
- 4) Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pemilihan pada Tahun 2014 dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2014 yang diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemilihan), maka kewenangan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan, DKPP, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pengadilan Negeri, secara limitatif telah diatur kewenangan masing-masing oleh undang undang;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2024 adalah sebagai pelaksana undang undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:

- a. Untuk bentuk pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat Tersruktur, sistematis dan masif menjadi kompetensi kewenangan oleh Bawaslu, Mahkamah Agung;
 - b. Untuk bentuk pelanggaran kode etik menjadi kompetensi kewenangan DKPP;
 - c. Untuk bentuk pelanggaran Administrasi menjadi kompetensi kewenangan oleh KPU, Bawaslu/Panwaslu;
 - d. Untuk sengketa Pemilihan menjadi kompetensi kewenangan Bawaslu/Panwaslu;
 - e. Untuk bentuk Pelanggaran Pidana menjadi kompetensi kewenangan sentral Gakkumdu yaitu terdiri dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan, (*vide* Pasal 152) Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (*vide* Pasal 146 UU Pemilihan);
 - f. Untuk sengketa tata usaha Negara Pemilihan menjadi kompetensi kewenangan pengadilan tinggi Tata usaha negara (*vide* Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU Pemilihan);
 - g. Untuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* UU 6/2020, jo putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022);
- 6) Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya telah menerangkan bahwa permohonan pemohon yang diajukan adalah tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024, namun ternyata dalil-dalil pemohon adalah mengenai Persoalan yang berkaitan dengan proses pemilihan, yakni :
- a. Penggunaan program pemerintah dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Calon Petahana;
 - b. Netralitas ASN;
 - c. Dugaan *money politics*;
 - d. Dugaan pelanggaran penyelenggara pemilihan berkaitan dengan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara.
- 7) Bahwa terhadap Pokok Permohonan jika dikaitkan dengan lembaga yang berwenang mengadilinya, dapat kami uraikan, yakni :

- a. Terkait dalil Pemohon perihal penggunaan program pemerintah dan mutasi ASN oleh Pihak Terkait selaku Calon Petahana merupakan ranah administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Pasal 138 UU 8/2015 *jo* Pasal 139 UU Pemilihan *jo* Pasal 34 Perbawaslu 9/2024 *jo* Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan.
 - b. Terkait dalil Pemohon tentang netralitas ASN sepenuhnya merupakan ranah tindak pidana pemilihan berdasarkan Pasal 188 UU Pemilihan *jo* Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan, olehnya itu menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU Pemilihan.
 - c. Mengenai dalil Pemohon tentang *money politics* merupakan bidang hukum pidana yang dikualifisir sebagai bagian tindak pidana pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan, secara absolut menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU Pemilihan.
 - d. Dalil Pemohon tentang pelanggaran penyelenggara pemilihan *in casu* TERMOHON mengenai pelanggaran atas kegiatan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara yang penyelesaiannya melalui Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau melalui DKPP RI sebagaimana ketentuan Pasal 139 UU Pemilihan *Jo* Pasal 137 ayat (1) UU Pemilihan.
- 8) Bahwa diluar dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon terdapat pelanggaran yang sesungguhnya telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Muna, serta tidak memiliki dampak dan keterpengaruhan terhadap perolehan suara Termohon sehingga Mahkamah tidak mungkin mengadili kembali persoalan *a quo*, sebab berlaku asas hukum *litis finiri oportet* , setiap perkara ada akhirnya dalam rangka memenuhi kepastian hukum;
- 9) Kemudian pembagian kewenangan masing-masing kelembagaan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan, *in casu* telah di atur oleh undang-undang secara tegas, dan terhadap dugaan perkara-perkara *money politic* yang tidak ada kaitanya dengan objek perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024 harus dikesampingkan dalam perkara *a quo*, dikarenakan sampai diajukan permohonan Pemohon di Mahkamah, Pemohon tidak pernah melaporkan kejadian tersebut (**berdasarkan bukti affidavit yang diajukan Pemohon dalam P-40 sampai P-48**) kepada pihak atau lembaga yang berwenang untuk itu, agar diuji kebenarannya secara hukum ;

- 10) Bahwa telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan dan kemudian pasal (2) Peraturan MK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan **objek dalam perkara Perselisihan yaitu keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dan sedangkan pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah Mengenai Perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan calon bupati dan wakil bupati , tetapi mengenai dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga atau institusi lain.
- 11) Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah dibatasi oleh undang undang memperluas kewenangannya untuk mengadili perkara *a quo*, sebab substansinya tidak menyoal perselisihan hasil pemilihan. Penegasan perihal *a quo*, misalnya dapat dibaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PHP.GUBXV/2017, yang pada pokoknya menyatakan:
*“...Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah berpendapat:
“ bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tanpa menyerobot kewenangan yang*

dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU Pemilihan. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam Penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian Perkara perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan walikota sehingga pada saat yang sama, akan dengan sendirinya juga menjadi Preseden Buruk bagi Upaya membangun demokrasi yang menghormati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan Prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (Constitutional democratic state)...”.

- 12) Bahwa berdasarkan uraian di atas dapatlah terjawab bagaimana Mahkamah berwenang mengadili **pelanggaran yang berkaitan dengan proses** pemilihan, khususnya pelanggaran yang bersifat TSM dan mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dituduh melakukan pelanggaran TSM. Bahwa Mahkamah tidak serta merta lantas mengadili suatu perkara dengan permohonan yang diklaim sebagai permohonan dengan jenis TSM sebagaimana dimohonkan Pemohon, terlebih apa yang dimaksud oleh Pemohon sebagai TSM dalam Permohonannya tidak memiliki gambaran yang jelas serta tidak didukung oleh bukti yang kuat melainkan hanya asumsi-asumsi Pemohon belaka, juga selain itu hanyalah beberapa pelanggaran netralitas ASN yang tidak memiliki keterpengaruh terhadap hasil Pemilihan yang notabene terpaat selisih yang **SANGAT TERPAUT JAUH yakni 6.253 suara atau sebesar 5,29%**;
- 13) Pelaksanaan kewenangan Mahkamah yang membatasi diri untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan dan bukan proses pemilihan menunjukkan bahwa pembentuk undang undang secara konsisten berpegang teguh pada pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 85/PUU-

XX/2022 tertanggal 29 September 2022, yaitu bahwa dalam perkara perselisihan pemilihan calon bupati dan wakil bupati, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati;

- 14) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 (**Bukti PT-1**) olehnya itu beralasan menurut hukum bagi Mahkamah menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet vankerlijck on verklaard*).

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, dengan alasan – alasan sebagai berikut ;

- 1) Bahwa untuk dapat mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah, ditentukan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024, menyatakan :

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati,
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati , terdapat ketentuan:
 - a. *Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota”.*

- 3) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kependudukan Kabupaten Muna, data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Muna adalah 231.980 (dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh) jiwa (**Bukti PT-2**);
- 4) Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor Pemilihan dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 3/2024, maka kaidah hukum untuk dapat menjadi pihak Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati , yakni sepanjang memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - (1) **Pemohon** adalah peserta (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024;
 - (2) **Perbedaan jumlah perolehan suara** Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024 peroleh suara terbanyak, selisihnya wajib masuk dalam range 2% (dua) persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna;
 - (3) **Bahwa objek dalam perkara Perselisihan yaitu keputusan Termohon** mengenai Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 5) Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 231.980 (dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh) jiwa, atau sampai dengan 250.000 jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor Pemilihan. Artinya, Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah sepanjang selisih perolehan suara **paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon**;
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, (**Vide Bukti PT-1**), dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 1

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----------------|---|------------------------|
| 1 | Drs.H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH | 53.908 |
| 2 | La Ode Rajiun Tumada, Spd., M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si | 47.655 |
| 3 | Pasangan Calon Nomor Urut 3 La Ode Kardini , SE.,M.Si, dan Dr. Ir Noor Dhani, S.T., M,T,I,P.M | 11.563 |
| 4 | Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr.Abdul Rahman, SH., dan Awal jaya Bolombo, SH | 4.331 |
| 5 | Pasangan Calon Nomor Urut 5 La ode Husuna Ringa Jhon, dan S.E., M.M dan Drs. Syarifuddin, M.M | 629 |
| | Total suara Sah | 118.086 |

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna adalah sebesar 118.086 suara, maka untuk menentukan syarat keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. Pemilihan, dalam perkara

a quo digunakan penghitungan yakni **2% atau (2% x 118.086) = 2.361,72 (dibulatkan menjadi 2.362).**

Adapun, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan peserta peraih suara terbanyak, yakni Pasangan Drs.H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH yaitu (53.908 suara - 47.655 suara) = **6.253 suara atau SANGAT TERPAUT JAUH dengan perbedaan selisih sebesar 5,29%**

dimana hal itu tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor Pemilihan, dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

- 7) Bahwa walaupun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 tahun 2024, tanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 tahun 2024, tanggal 23 september 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* ;
- 8) Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir**. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan jo. Pasal (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (Peraturan MK 3/2024) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, secara *expressive verbis* menegaskan bahwa
“objek dalam perkara Perselisihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi

penetapan calon terpilih.” Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir.

- 9) Bahwa meskipun Pemohon sejak awal telah sadar dan mengetahui bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dikarenakan ketentuan ambang batas yang dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan tidak terpenuhi, namun Pemohon tetap memaksakan permohonan kepada Mahkamah untuk menampik atau memohon Penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, dengan dalih bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan luar biasa atau Pelanggaran administrasi yang berisat TSM yang sangat mempengaruhi proses pemilihan sehingga terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak, namun notabene Pemohon tidak menguraikan bagaimana pemenuhan unsur-unsur per kategori yakni bagaimana pemenuhan unsur Terstruktur, bagaimana pemenuhan unsur Sistematis dan bagaimana pemenuhan unsur Masif, **terlebih apa yang telah didalilkan oleh pemohon tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil yang dikonstruksi atas asumsi/opini dari Pemohon yang seolah-olah menyatakan terjadi keadaan yang memenuhi unsur Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM).**
- 10) Bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Persoalan yang berkaitan dengan **dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan, yang kewenangannya secara limitatif menjadi ranah lembaga-lembaga lain diluar Mahkamah. Di samping itu permasalahan dimaksud oleh Pemohon merupakan persoalan yang telah selesai dan merupakan pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara. Terhadap asumsi Pemohon mengenai terjadinya keadaan TSM, Pemohon tiba-tiba mengadukan ke Mahkamah walau tersedia sarana untuk melakukan laporan tersebut di Bawaslu Kabupaten Muna;**

- 11) Bahwa untuk memframing terjadinya pelanggaran TSM, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa *print out* berita media online dan rekaman video/audio, affidavit/surat pernyataan sepihak per orang yang tidak pernah teruji atau terverifikasi kebenarannya secara hukum, serta tidak menerangkan apapun jika dihubungkan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, serta bagaimana keterpengaruhannya terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Kemudian, sepanjang laporan yang ada kaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 berupa pelanggaran penyalahgunaan jabatan calon petahana yang tidak pernah terbukti sekalipun, tuduhan pengerahan ASN yang tidak teruji secara hukum dengan alat bukti yang tidak terverifikasi kebenarannya, perihal pelanggaran netralitas ASN dilingkup Pemda Muna yang produk hukumnya belum final yakni masih sebatas rekomendasi, Pelanggaran KPU Muna dalam praktek kecurangan dalam proses dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang telah diproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) **yang hasil verifikasi adalah Gugur (Bukti PT-3)**, yang kesemuanya adalah telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Muna sebagai jenis pelanggaran yang bukan TSM. Justru sebaliknya, Pemohon melakukan kecurangan-kecurangan dengan melibatkan Pejabat ASN, Panitia Pemungutan Suara, Koordinator Program Keluarga Harapan dan Pendamping, Kepala Desa dan Aparat Desa yang kesemuanya sudah diproses Bawaslu Kabupaten Muna dan berkepastian hukum telah dibuktikan oleh Pihak Terkait **(Bukti PT- 4)**;
- 12) Bahwa dengan demikian **tidak adanya kecurangan luar biasa yang mempengaruhi proses pemilihan atau kondisi yang spesifik yang mempengaruhi hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024 sebagaimana alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, maka dengan kerendahan hati Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan tetap diberlakukan demi menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;
- 13) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon tidak memberikan informasi yang benar perihal status La Ode Asrafil, S.H., M.H., (Calon Wakil Bupati) sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Agraria Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Notabene La Ode Asrafil, S.H., M.H., (Calon Wakil Bupati) telah mengundurkan diri sebagaimana menjadi persyaratan Calon yang diatur dalam Peraturan KPU dalam Pasal 14 ayat 2 huruf r yakni :

“menyatakan secara tertulis yakni pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.”

Bahwa pengunduran diri tersebut diajukan oleh La Ode Asrafil, S.H.,M.H. sejak tanggal 12 Agustus 2024 dan berproses di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta telah disetujui oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 00300/12030/AZ/07/24 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun (**Bukti PT-5**);

- 2) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemilihan tidak berdasarkan asas Langsung Umum Bebas rahasia dan jujur dan Adil didasarkan pada dalil-dalil yang asumtif yakni :
 - a. Bahwa Pemohon tidak menguraikan berdasarkan hukum apa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang oleh Calon Petahana dan Pemanfaatan program pemerintah, penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Pemohon menuding hanya berdasarkan asumsi dan

- tidak mampu membedakan yang mana pemerintah dan yang mana Pasangan Calon Petahana serta yang mana program pemerintah dan yang mana berupa kampanye. Pemohon mensimplifikasi seluruh perbuatan Petahana sebagai kampanye;
- b. Bahwa dalil Pemohon asumptif, dengan menuding keterlibatan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 tetapi tidak menjelaskan secara terperinci bentuk tindakan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara yang berdampak pada hasil;
 - c. Pemohon pada permohonannya **halaman 12 angka 4** mendalilkan pemanfaatan program oleh Pihak Terkait diluar jadwal kampanye dan pada masa tenang, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan tempos dan locus terjadinya hal yang dimaksudkan *a quo* sehingga berdampak atau mempengaruhi hasil pemilihan;
 - d. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan secara signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara Calon Petahana tanpa mampu menguraikan jenis pelanggaran secara jelas dan berdasar hukum serta masing-masing indikator yakni indikator Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dapat mempengaruhi hasil serta tidak mampu membuktikan secara jelas bahwa telah terjadi kesalahan proses pemungutan dan penghitungan suara yang dapat mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024;
 - e. Bahwa Pemohon mendalilkan pengerahan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV kepada semua Aparatur Sipil Negara dan honorer untuk memenangkan Calon Petahana dengan dalil yang menggeneralisir serta asumptif. Pemohon tidak memiliki indikator yang jelas bahwa dalil tersebut memenuhi unsur Terstruktur serta dapat mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024;
 - f. Bahwa Pemohon juga menuduh adanya sejumlah Camat, Lurah, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas berperan sebagai Donatur/pendana untuk melakukan politik uang/bagi-bagi uang

untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Calon Petahana dengan tidak berdasar. Bahwasanya tuduhan-tuduhan tersebut diajukan Pemohon berbekal rekaman suara/video yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya, bisa saja direkayasa karena hanya berdasar dokumen elektronik yang belum teruji forensik/terverifikasi kebenarannya, serta tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Muna. Notabene merupakan ranah pada proses pemilihan bukan hasil pemilihan sehingga bukan kewenangan oleh Mahkamah untuk mengadilinya;

- g. Bahwa Pemohon mendalilkan banyaknya jumlah anggota Penyelenggara PPS dan Anggota KPPS bersumber dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Muna, secara benderang menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami mekanisme perekrutan Penyelenggara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang secara teknis diatur Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024, bahwasanya hal tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang atau merupakan pelanggaran hukum. **Pemohon membangun asumsinya dengan menggeneralisir bahwasanya apapun yang berkaitan dengan pemerintahan dan aparatur sipil negara adalah berhubungan dengan pemenangan Petahana, notabene dalam jumlah yang tidak sedikit serta telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Muna terdapat pejabat aparatur sipil negara, kepala desa dan penyelenggara *adhoc* terbukti secara hukum menjadi pemenangan Pemohon;**
- h. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Semua yang didalilkan Pemohon merupakan asumsi belaka dan selebihnya telah diproses dan telah selesai baik di tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten. **Dalil ini sangat spekulatif**

dan asumtif, seolah jika ada suara yang hilang merupakan suara dari Pemohon. Dalam batas penalaran yang wajar bagaimana mungkin mengetahui seseorang memilih Pemohon jika didasarkan dengan kejadian tersebut.

- 3) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas penyebab terjadinya selisih 6.253 suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak serta tidak memberikan rincian perhitungan yang benar menurut Pemohon sebagai klaim yang berdasarkan bukti yang valid dan sah.
- 4) Dalam Pokok Permohonan Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 Tertanggal 4 Desember 2024 tanpa membandingkan rincian perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan berapa jumlah perolehan suara yang benar, secara jelas dan lengkap, baik dalam Posita maupun Petitum. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut: "*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***" Oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Selanjutnya, terjelaskan pula berdasarkan Lampiran I PMK NO. 3/2024 pada halaman 49 berkenaan dengan pedoman penyusunan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain Pemohon perlu mencantumkan Perolehan suara yang benar versi Termohon, harus pula mencantumkan perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon;
- 5) Bahwa urgensi pencantuman perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon tersebut, adalah sebagai "titik awal" membaca dan memaknai jika objek perselisihan dalam perkara *a quo*, terpenuhi sebagai perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 6) Pemohon tidak menguraikan pemenuhan unsur kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Muna. **Jika dicermati Pemohon hanya menuding terjadi kecurangan setidaknya di 9 kecamatan yang secara kuantitas tidak memenuhi unsur massif/ melebihi 50% wilayah pemilihan sebagaimana Kabupaten Muna terdiri dari 22 kecamatan.** Dalil pemohon sangat kabur serta asumtif dengan memaksakan terjadinya signifikansi, padahal yang terjadi **hanyalah beberapa pelanggaran netralitas pejabat aparatur sipil negara yang tidak dapat dipastikan keterpengaruhan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon atau Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara.** Di lain pihak justru terdapat pejabat aparatur sipil negara, ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara, pendamping program perlindungan dan jaminan sosial, kepala desa, kepala badan permusyawaratan desa yang notabene lebih banyak mendukung Pemohon dan terbukti telah direkomendasikan oleh **Bawaslu Kabupaten Muna;**
- 7) Bahwa terhadap dalil dalil Pokok – pokok Permohonan Pemohon tersebut seperti terurai di dalam permohonan pemohon telah di laksanakan dan putus di tingkatan Bawaslu Kabupaten Muna, olehnya itu sangat tidak berkesesuaian jika Persolan tersebut kembali diajukan ke Mahkamah sebab setiap perkara harus memiliki kepastian hukum dan tidak boleh dilakukan proses peradilan yang berulang, sebagaimana berlaku asas hukum litis finiri oportet, bahwa setiap perkara harus ada akhirnya;
- 8) Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran money politic yang mempengaruhi selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak, namun di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Tongkuno Selatan, Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Parigi, Kecamatan Maligano, faktanya bahwa di kecamatan tersebut pihak Pemohonlah yang memperoleh suara yang besar dibandingkan dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak;

9) Bahwa dalam Permohonan Pemohon Posita Tidak Bersesuaian Dengan Petitum

- (1) Bahwa Pemohon mendalilkan posita dalam pokok permohonan terdapat permasalahan yakni mengenai pelanggaran kampanye; pelanggaran administrasi; keberatan saksi pasangan calon dan; kejadian pasca pemungutan suara.sebagai hal yang menyebabkan adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
- (2) Bahwa pokok-pokok permasalahan yang dimaksud Pemohon disebabkan oleh adanya peristiwa yang dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dikaitkan dengan mempengaruhi perolehan suara calon secara signifikan;
- (3) Bahwa Pemohon kemudian meminta Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mendalilkan dan membuktikan sebab-musabab yang memenuhi unsur untuk dilakukan diskualifikasi pasangan calon;
- (4) Bahwa perihal diskualifikasi pasangan calon merupakan suatu konsekuensi jika terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif, sedang Pemohon tidak menguraikan dalam satu dalil pun perihal pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif;
- (5) Hal mana dengan terjadinya kontradiksi antara posita dengan petitum *in casu*, olehnya itu sangatlah beralasan dan patutlah permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

10)Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pihak Terkait, Permohonan Permohonan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. DALIL PEMOHON PERIHAL PENYALAHGUNAAN JABATAN CALON PETAHANA DAN PEMANFAATAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU);

- 1) Bahwa Pemohon menuding dalam rangka memuluskan rencana pemenangannya dalam Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna, Petahana telah melakukan penyalahgunaan jabatan secara berulang-ulang dalam berbagai kesempatan, seperti melakukan memutasi sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada tanggal 6 Juni 2024 terjadi mutasi 31 Pejabat Eselon II, Kedua tanggal 12 Juli 2024 terjadi penggantian 21 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemda Muna. Mutasi tersebut dilakukan tanpa Izin Menteri terkait, yang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon adalah keliru;
- 2) Bahwa terhadap dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan hanya sekedar asumsi pemohon, karena secara faktual **Pertama**, bahwa Calon Petahana Drs. H. Bachrun, M.Si. sebagai Plt. Bupati Muna telah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor : 100.2.2.6/2587/SJ Hal : Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, tertanggal 3 Juni 2024 dan **Kedua**, Calon Petahana Drs. H. Bachrun, M.Si. sebagai Plt. Bupati Muna telah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor : 100.2.2.6/4872/OTDA Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, tertanggal 2 Juli 2024 sehingga proses mutasi tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan (**Bukti PT- 6**);
- 3) Bahwa perihal mutasi *a quo* , Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Muna;
- 4) Kemudian, Pemohon mendalilkan telah terjadi pemanfaatan penyaluran program pemerintah di masa kampanye pada bulan November 2024, dalam bentuk pendistribusian 32.000 (tiga puluh dua ribu) ton bibit jagung untuk 7 (tujuh) Kecamatan, dilakukan secara untuk kepentingan pencitraan

Calon Petahana sebagai bentuk kecurangan dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya sebagai Plt. Bupati Muna yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah keliru;

- 5) Bahwa dalil Pemohon sangat keliru, karena Pemohon tidak memahami substansi pemberian bantuan jagung yang merupakan Pengadaan dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Program ini merupakan Bantuan Benih Jagung Hibrida Tahun 2024 dengan kontrak tertanggal 1 November 2024 yang diberikan pada periode tanam yakni dalam setahun terdapat dua periode, yaitu pertama periode April – September dan kedua yakni Oktober – Maret. Penyaluran bantuan yang dituding oleh Pemohon adalah penyaluran periode kedua yang wajib dilaksanakan setelah melalui tahapan pengujian daya tumbuh di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Sulawesi Tenggara di Kendari, penyaluran benih tiba di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan tertanggal 13 November 2024 dan disalurkan mulai tanggal 14 November 2024, olehnya itu pendistribusian Bantuan Benih Jagung Hibrida ini tidak ada sangkutpautnya sama sekali dengan pencitraan sebagaimana dituding oleh Pemohon (**Bukti PT- 7**);
- 6) Bahwa meskipun program ini adalah program pemerintah, **bahkan dalam proses penyalurannya tidak pernah sekalipun diberikan langsung oleh Plt. Bupati Muna sebagai petahana atau Pihak Terkait dalam perkara *a quo***, olehnya secara jelas dalil Pemohon tidak beralasan secara hukum, terlebih lagi terhadap dalil ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- 7) Bahwa Pemohon hanya menyebutkan peristiwa pembagian bibit jagung oleh Petahana sebagai Pihak Terkait di 7 kecamatan, yakni Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Kabawo, Kecamatan Kontu Kowuna, Kecamatan Watopute, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Bone. Pemohon

pun tidak menguraikan keterpengaruhannya signifikansi perolehan suara sebagaimana dimaksud massif oleh Pemohon, notabene Kabupaten Muna terdiri dari 22 Kecamatan, maka untuk memenuhi syarat agar suatu perbuatan Pasangan Calon terqualifikasi ke dalam pelanggaran yang masif berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan maka Pemohon “**wajib**” menguraikan dan memastikan 11+1 Kecamatan yang dianggap terdapat pelanggaran yang signifikan terhadap perolehan suara;

- 8) Bahwa Pihak Terkait tidak pernah sekalipun menerima rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Muna terkait pembagian bibit jagung sebagai bagian dari penyalahgunaan program yang menguntungkan Petahana atau Pihak Terkait;
- 9) Selanjutnya, bahwa Pemohon menuding pada tanggal 18 Oktober 2024, adanya kunjungan kerja oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andap Budhi Revianto di Kabupaten Muna, menyelenggarakan program saluran bantuan Pompanisasi kepada petani dan kegiatan Pasar Murah yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Muna dan Forum Komukasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muna. Menurut Pemohon kunjungan kerja dimaksud yang dilakukan pada masa Kampanye, Pemohon menilai kunjungan dimaksud adanya muatan politik untuk mengarahkan dukungan politik kepada Calon Petahana;
- 10) Bahwa terhadap dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan hanya sekedar asumsi dari pemohon, serta tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena faktanya dalam kunjungan Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto di Kabupaten Muna Pada tanggal 17 November 2024, tidak pernah mengarahkan untuk memilih salah satu calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024. justru sebaliknya, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto mengumpulkan Pejabat Kabupaten Muna dan

Kabupaten Muna Barat dalam rangka menekankan Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (**Bukti PT-8**);

- 11) Bahwa Pemohon menuding calon Petahana menggunakan/memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan kebijakan dan anggaran daerah secara langsung, untuk mendukung setiap kampanye Calon Petahana sebagai Calon Bupati yang dilakukan kampanye diluar jadwal dan di waktu/dalam masa tenang menjelang hari Pemilihan. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosial yang dijadikan sebagai media publisitas untuk kegiatan yang mendukung pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati. Hal tersebut di atas dapat dikonfirmasi dan dirujuk sebagaimana dikutip dari berita berbagai media online;
- 12) Terhadap dalil tersebut, adalah dalil-dalil yang tidak benar serta terkesan pemohon menuduh semua Program kegiatan pemerintah sebagai sesuatu yang menguntungkan Petahana. **Jika mengikuti alur berpikir Pemohon, maka sesungguhnya apapun yang menjadi tindakan pemerintah dalam melayani masyarakat adalah bentuk kampanye petahana, ini jelas sebuah generalisasi a priori atau kesesatan berpikir yang nyata.** Jika dicermati dalil Pemohon pada poin ini hanya mengulangi dalil sebelumnya dan menambahkan satu (1) hal yakni persoalan Calon Petahana melakukan kegiatan Pramuka dari Program Pemerintah yang memanfaatkan jabatannya. Kegiatan tersebut terjadi pada masa tenang menjelang hari pemilihan. Notabene persoalan ini telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Muna dan telah diputuskan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dan tidak cukup bukti (**Bukti PT-9**);
- 13) Bahwa Pemohon mempersoalkan terkait banyaknya pemasangan baliho Drs. H. Bachrun, M.Si selaku Plt. Bupati Muna beserta uraian program kerja, untuk kepentingan pencitraan Petahana pada masa kampanye yang dilakukan oleh Apartur Sipil Negera dan Kepala Desa. Baliho dimaksud

sampai selesai hari pelaksanaan pemilihan diselenggarakan tidak diturunkan/ ditertibkan oleh Termohon;

- 14) Bahwa terhadap dalil ini **Pemohon tidak bisa membedakan perihal program pemerintah dengan alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**. Uraian program kerja yang dimaksud sesungguhnya adalah Program Pemerintah Kabupaten Muna berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa yang dikeluarkan sejak tanggal 21 Oktober 2022 oleh Bupati saat itu La Ode Muhammad Rusman Emba **(Bukti PT-10)** dengan jenis komoditi yang terpampang dalam baliho tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Muna Tahun 2023 Tentang Jenis Komoditas Unggulan dan Lokasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa Tahun 2023 **(Bukti PT-11)**.
- 15) Bahwa Pihak Terkait tidak pernah sekalipun menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna terkait pelanggaran atas pemasangan baliho Drs. H. Bachrun, M.Si selaku Plt. Bupati Muna beserta uraian program kerja, untuk kepentingan pencitraan Petahana sebagaimana dimaksud Pemohon;
- 16) Bahwa menurut Pemohon Calon Petahana memanfaatkan beberapa fasilitas Pemerintah Kabupaten Muna untuk kepentingan dirinya sebagai Calon Bupati Muna, dengan uraian:
 - a. Bahwa Calon Petahana menggunakan menggunakan Speed Boat Sangke Palangga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Muna untuk mobilitas penyeberangan untuk melakukan kampanye-kampanye di wilayah Kecamatan Maligano, Kecamatan Pasikolaga, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Batukara dan Kecamatan Wakorumba Selatan. Terhadap dalil tersebut adalah dalil yang tidak

benar dan hanya sekedar asumsi dari pemohon, serta tidak berdasarkan Fakta yang sebenarnya, karena faktanya Calon Petahana tidak pernah menggunakan Speedboat Sangke Palangga milik Pemerintah daerah Kabupaten Muna terkecuali dalam rangka urusan pemerintahan daerah. **Secara faktual** Calon Petahana ketika berkampanye di wilayah Kecamatan Maligano, Kecamatan Pasikolaga, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Batukara dan Kecamatan Wakorumba Selatan menggunakan speedboat komersil yang disewakan oleh pihak swasta **(Bukti PT-12)** bahwa bentuk dan jenis speedboat yang digunakan sangat jauh berbeda dengan speedboat Sangke Palangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, penggunaan Speedboat Sangke Palangga yang dimaksud oleh Pemohon adalah peristiwa di bulan Agustus 2024 di saat sebelum ada penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna yakni silaturahmi Paguyuban Jawa yang ada di kawasan Muna Timur;

- b. Dalil Pemohon sangat kabur, karena tidak menguraikan apakah penggunaan Speedboat dapat mempengaruhi signifikansi perolehan suara pada 5 (lima) kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- c. Bahwa dalil Pemohon yang menuding Calon Petahana menggunakan fasilitas Rumah Jabatan Wakil Bupati sebagai tempat penghitungan *quick count*/hitung cepat perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang saat itu dihadiri oleh jajaran Pejabat Eselon termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Muna adalah keliru.
- d. Bahwa terhadap dalil ini, kejadian tersebut merupakan alur proses monitoring keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Muna sebagaimana sehari sebelumnya dikeluarkan Surat oleh Plt. Bupati Muna Drs. H. Bachrun, M.Si. melalui Surat Bupati Muna Nomor 200.2.1/2314 Hal :

Penyampaian Untuk Menjaga Situasi Kambtibmas yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas/Badan Lingkup Kabupaten Muna dan Camat Se-Kabupaten Muna (**Bukti PT- 13**). Bahwa kehadiran Sekretaris Daerah di Rumah Jabatan Wakil Bupati Muna adalah atas perintah Plt. Bupati Muna dalam monitoring situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sebagai bentuk respon atas Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang menempatkan Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak dengan daerah yang rawan tinggi salah satunya adalah Kabupaten Muna (**Bukti PT-14**) notabene dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 telah menelan korban jiwa akibat konflik antar pendukung (**Bukti PT- 15**).

- e. Bahwa monitoring tersebut terjadi di saat telah selesai masa kampanye yakni pada tanggal 27 November 2024 bertempat di rumah jabatan Wakil Bupati Muna, Pada saat itu juga berkunjung perwakilan dari Komando Distrik Militer 1416 Muna dan Badan Intelijen Strategis Daerah Muna dengan maksud berkoordinasi terkait perayaan pendukung yang terindikasi rawan terjadinya konflik;
 - f. Bahwa dalil Pemohon kabur sebab tidak menguraikan apakah peristiwa tersebut berdampak pada signifikansi perolehan suara;
- 17) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengarahan kepada masyarakat penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Wasolangka, Kecamatan Parigi sejumlah ± 200 orang dikumpul di Balai Kelurahan, dengan ancaman dan tekanan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Bachrun - Asrafil. Apabila tidak mengikuti arahan maka akan dihapus namanya dalam daftar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 18) Bahwa video yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak relevan dengan dalil Pemohon, sehingga hanya berupa tudingan sepihak. Notabene terhadap dalil tersebut ternyata Pemohon **tidak pernah** melaporkan hal tersebut ke Bawaslu

Kabupaten Muna untuk dapat dibuktikan kebenarannya dan diuji secara hukum. Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon hanyalah sekedar asumsi yang tidak berdasar;

- 19) Namun justru sebaliknya telah terjadi pengarahannya kepada masyarakat penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dimana Koordinator Kabupaten Muna Program Keluarga Harapan atas nama Plisa Dewa terlibat aktif dalam kampanye Pemohon dan atas nama Mirlan Ira Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Duruka Kabupaten Muna yang juga aktif dalam kampanye Pemohon, dan hal ini telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Muna (**Vide Bukti PT-4**).
- 20) Disamping itu berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Muna Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, di Kecamatan Parigi ternyata hasil perolehan suara Pemohon lebih besar dari pihak Terkait, dimana pihak pemohon memperoleh suara sebesar 2.988 suara dan Pihak Terkait sebesar 2.602 suara (vide Bukti PT-1) sehingga tuduhan pemohon tentang adanya arahan di Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Bachrun – Asrafil adalah tidak berdasar;
- 21) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, terdiri atas dalil- dalil asumsi, dugaan pelanggaran atau peristiwa yang menjadi ranah penegakan hukum pada tahapan proses, dan tidak pernah terbukti secara hukum di tahapan proses, serta tidak ada satupun yang beralasan hukum, dengan demikian dalil menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan.

B. DALIL PEMOHON PERIHAL TELAH TERJADI PENERAHAN PEJABAT-PEJABAT ESELON II, ESELON III DAN ESELON IV DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN MUNA.

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembentukan tim pemenang Calon Petahana dengan menggerakkan dan mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara mulai dari Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV (Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah) serta semua tenaga honorer Lingkungan Pemda Muna dan semua Kepala Desa secara berjenjang/tingkatan secara terstruktur, sistematis dan masif, untuk memenangkan dan memilih Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun- Asrafil. Bahwa, dalil *a quo* adalah tidak benar.
- 2) Dalil Pemohon sangat kabur (*obscur libels*) karena terjadi generalisasi apriori yang menyebutkan seolah terjadi pembentukan tim pemenang Calon Petahana dengan menggerakkan dan mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara mulai dari Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV (Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah) serta semua tenaga honorer Lingkungan Pemda Muna dan semua Kepala Desa secara berjenjang/tingkatan secara terstruktur, sistematis dan masif, untuk memenangkan dan memilih Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun- Asrafil **namun** Pemohon tidak menguraikan secara rinci bagaimana tim tersebut terbentuk dan yang mana tim yang dimaksud oleh pemohon. Pemohon hanya mengajukan bukti berupa rekaman suara yang tidak bisa teridentifikasi serta tidak terverifikasi secara hukum kebenarannya;
- 3) Terhadap hal ini patut dicermati setidaknya 4 (empat) hal, **Pertama**, Pemohon tidak mengurai siapa Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang dimaksud disertai bukti kepangkatannya. **Kedua**, Pemohon terlalu menggeneralisir semua tenaga honorer Lingkungan Pemda Muna tanpa mengurai siapa-siapa yang dimaksud oleh Pemohon. Bahkan

Pemohon tidak menguraikan jumlah tenaga honorer di Kabupaten Muna dan secara serba merta menuduh semua tenaga honorer Lingkungan Pemda Muna. **Ketiga**, Pemohon terlalu menggeneralisir semua Kepala Desa tanpa mengurai siapa-siapa yang dimaksud oleh Pemohon. Bahkan Pemohon tidak menguraikan jumlah kepala desa di Kabupaten Muna dan secara serba merta menuduh semua Kepala Desa terlibat dalam pemenangan Calon Petahana. **Keempat**, Pemohon tidak pernah melaporkan kejadian ini ke Bawaslu Kabupaten Muna sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

- 4) Bahwa khusus mengenai netralitas ASN di Kabupaten Muna, pada tanggal 27 September 2024 telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Muna Nomor 800.1/2050 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditanda tangani oleh Pjs Bupati Muna YUNI NURMALAWATI **(PT- 16)** yang ditujukan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna
 - b. Staf Ahli Bupati Muna
 - c. Asisten Sekda Kabupaten Muna
 - d. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kab. Muna
 - e. Direktur RSUD dr. H. L.M. Baharuddin M.Kes
 - f. Kepala UPTD/UPTB di Kabupaten Muna
 - g. Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
- 5) Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna atas dalil *aquo*. **Bahwa justru sebaliknya** terdapat **sejumlah pejabat ASN, Kepala Desa, Ketua KPPS, Koordinator Pendamping Program Keluarga**

Harapan dan sejumlah Kepala BPD yang terlibat dalam Pemenangan Pemohon sebagaimana telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Muna (**vide Bukti PT-4**), dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 1.1.

Daftar Pejabat/Penyelenggara/Kepala Desa/Kepala BPD
yang mendukung Pemohon
Telah Diproses Bawaslu Kabupaten Muna

| No | Nama Terlapor/ Jabatan | Nomor Laporan | Status Laporan |
|-----------|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 1. Ahmad Wakar Jaya, S.Sos. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2. Ilham Damu, S.E ASN Kepala Seksi di Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Rahabeam Lumbangaol, SP. M.Si. Perencana Ahli Madya di Badan Perencanaan Pembangunan | 002/LP/PB/K ab/28.09/09/2 024 | Diterusk an ke Badan Kepega waian Negara Republik Indonesi a (BKN) |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| | Daerah Kabupaten Muna; | | |
| 2 | <p>1. L.M Mushawir. Kepala Bidang Pencegahan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Muna;</p> <p>2. Asis Dahlan. Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna;</p> <p>3. Zainal Abidin. Kepala UPTD Pasar Laghontohe.</p> <p>4. Baharuddin Sello. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lasalepa.</p> | 003/LP/PB/Kab/28.09/09/2024 | Diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) |
| 3 | 1. Hidayat Tunggal, S.H. Kepala Desa Labunti; | 009/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 | Diteruskan ke Pjs. |

| | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| | 2. La Ode Muh. Sabaruddin, SP. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | | Bupati Muna Diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) |
| 4 | 1. La Ode Sarmin, S.Pd.,M.Pd. Kepala Bidang Teknis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna; 2. Andi Aris Nurdin Ketua KPPS Kelurahan Sidodadi | 006/REG/LP/PB/KAB/28.09/2024 | Diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) Diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna |
| 5 | Zuhu Ria Anggota PPS Desa Banggai | 227/PP.00.02/K.SG-13/11/2024 | Diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum |

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| | | | Kabupaten Muna/ Pemberhentian Tetap |
| 6 | <p>1. Ahmad Wakar Jaya, S.Sos/ Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>2. Drs. La Ode Salindo Perencana Ahli Madya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>3. Ilham Damu, SE Kepala Seksi di Samsat Provinsi Sulawesi Tenggara;</p> <p>4. Asis Dahlan H., S. Sos. Kepala Bidang Teknis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna;</p> | 034/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 | <p>Diteruskan ke Pjs. Bupati Muna</p> <p>Diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN)</p> |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| | <p>5. La Ode Suhaeni Kepala SMPN 1 Napano kusambi.</p> <p>6. Okto Zulhidayat,SP</p> <p>7. La Ode Hudi</p> <p>8. La Ode Tahjudin</p> <p>9. La Ode Rusuli Kepala Desa Lakapodo.</p> <p>10. Haiwa Kepala Desa Labaha</p> <p>11. La Ode Raesungku, S.Hut. Lurah Watopute, Kecamatan Watopute</p> | | |
| 7 | <p>1. La Ode Nasidin. SP. ASN di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Muda</p> <p>2. Muhardin, SE. M.Si ASN di Balitbang Muna Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Muda Sub</p> | 035/LP/PB/K ab/28.09/XII/ 2024 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Koordinator Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana.</p> <p>3. Rahabeam Lumbangaol S.P, M.Si. ASN di Bappeda Jabatan Fungsional</p> <p>Perencana Ahli Madya.</p> <p>4. Bongko Daeng S.KM. ASN di Dinas Kesehatan Muna Jabatan</p> <p>Administrator Kesehatan Sub. Koordinator Sumber Daya Manusia.</p> <p>5. La Kare, SPd.I ASN di Kecamatan Lohia, Jabatan</p> <p>Sekretaris Camat.</p> <p>6. La Ode Ahmad Firli Afu, S.Hut, ASN di Dinas Lingkungan Hidup, Jabata</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, dan Peningkatan</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| | <p>Kapasitas.</p> <p>7. La Ode Zafrullah, S.STP, ASN di Dinas Ketahanan Pangan, Jabatan Sekretaris Dinas.</p> <p>8. Abd. Rachman, S.P. M,Si ASN di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Madya.</p> <p>9. La Ode Ataluddin, S.T,M.T. di Bappeda, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya.</p> <p>10. Asis Dahlan, S.Sos ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian,</p> | | |
| 8 | 1. Hamliana Am.Keb. instansi PKM Wakorumba Selatan. | 037/LP/PB/K ab/28.09/XII/ 2024 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>2. dr. Van Deicen. instansi PKM Lambiku.</p> <p>3. Sudirman, AMK. instansi PKM Parigi.</p> <p>4. Wd Sitti Yuliana Mandi, S.KM. instansi PKM Wakorumba Selatan.</p> <p>5. La Fklun, S.Kep. instansi PKM Wapunto.</p> <p>6. Ns. Santy S.Kep instansi Laboratorium Kesehatan Daerah.</p> <p>7. drg. Jabariah Larisu instansi PKM Lohia.</p> <p>8. Lisa Budiman, S.Tr.Keb. instansi PKM Batukara.</p> <p>9. La Ode Hudi, S.Kep instansi PKM Mabodo.</p> <p>10. A mraini instansi PKM Waara.</p> | | |
| 9 | <p>1. Plisadewa jabatan Koordinator Kabupaten Program Pendamping</p> | <p>038/LP/PB/K ab/28.09/XII/ 2024</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Keluarga Harapan</p> <p>2. Mirlan Ira jabatan Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Duruka</p> | | |
| | | | |

- 6) **Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa adanya arahan dan terencana oleh sejumlah Pejabat ASN kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda Muna untuk melakukan urunan/patungan secara bersama-sama mengumpulkan uang dengan tujuan membantu pembiayaan politik Calon Petahana termasuk melakukan pembiayaan (donatur) oleh pejabat-pejabat ASN untuk melakukan politik uang/ *money politik* dengan tujuan memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil, adalah tidak benar;**
- 7) Bahwa Pemohon tidak menguraikan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi pelakunya, memastikan tempat kejadiannya dan waktu kejadiannya yang kemudian wajib dihubungkan dengan keterpengaruhan terhadap signifikansi perolehan suara;
- 8) Terhadap dalil tersebut, diketahui ternyata Pemohon tidak pernah melaporkan masalah tersebut ke Bawaslu Kabupaten Muna sehingga apa yang telah di dalilkan oleh pemohon belumlah teruji kebenarannya secara hukum. Pemohon hanya mengajukan bukti yang tidak terverifikasi kebenarannya, notabene perihal politik uang merupakan ranah pidana pemilihan sedang dalam bidang pidana dikenal *Asas In Criminalibus, Probationes Bedent Esse Luce Clariores* dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari Cahaya;
- 9) Jika terdapat politik uang seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Muna sebagai Lembaga yang berwenang, di

karenakan masih menjadi ranah pelanggaran proses pemilihan Yang bukan hasil pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah, kemudian atas tuduhan pemohon tersebut ternyata justru pihak pemohonlah yang ternyata mempengaruhi dan mengarahkan serta merencanakan sejumlah Pejabat ASN kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda Muna untuk melakukan urunan/patungan secara bersama-sama mengumpulkan uang dengan tujuan membantu pembiayaan politik pemohon termasuk melakukan pembiayaan (donatur) oleh pejabat-pejabat ASN untuk melakukan politik uang/*money politic*;

- 10) **Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengarahan oleh Kepala Sekolah Dasar kepada semua Guru-Guru yang terjadi di lingkungan sekolah untuk bersama-sama memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil adalah tidak benar;**
- 11) Terhadap dalil tersebut Pemohon ternyata tidak pernah melaporkan permasalahan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Muna sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon belumlah teruji kebenarannya secara hukum;
- 12) Jika terdapat pengarahan oleh Kepala Sekolah Dasar, kepada semua Guru-Guru yang terjadi di lingkungan sekolah seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Muna sebagai Lembaga yang berwenang untuk itu, dikarenakan dalil-dalil pemohon merupakan perkara berkaitan dengan Proses, dimana kewenangan untuk menyelesaikannya persoalan *a quo* telah diberikan kewenangan kepada lembaga lembaga lain diluar Mahkamah, terlebih Pemohon tidak merincikan siapa yang dimaksud Kepala Sekolah Dasar dan Semua Guru-Guru;
- 13) Pemohon terlalu mendramatisir seolah-olah, semua Kepala Sekolah dan Semua Guru tanpa menyebutkan dan membuktikan siapa Kepala Sekolah dan Semua Guru yang dimaksud berdasarkan bukti yang valid dan real. Dengan demikian dalil Pemohon sangat kabur dan tidak beralasan hukum;

14) **Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistemik, dan Masif hampir di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Muna, dengan uraian sebagai berikut:**

1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait temuan kejadian di Tongkuno Selatan : Adanya peristiwa bagi-bagi uang untuk masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada tanggal 24 November 2024 di Desa Labasa. Pembagian uang dimaksud untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1 (Bachrun - Asrafil), atas suruhan Kepala Desa;

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana *ulus testis nulus testis* satu saksi bukanlah saksi. Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon *a quo* adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna untuk penanganan tindak pidana money politics tersebut, yang mana faktualnya sampai pada jawaban ini diajukan tidak terdapat temuan pelanggaran atas tindak pidana *money politics* dimaksud

2) Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait temuan kejadian di Kecamatan Tongkuno : Adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) pada tanggal 25 November 2024 di Desa Lakologou. Pembagian uang dimaksud dilakukan oleh Istri Mantan Kepala Desa Lakologou untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1.

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan

sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana *ulus testis nulus testis* satu saksi bukanlah saksi. Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;

- Bahwa mengenai dalil Pemohon *a quo* adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna untuk penanganan tindak pidana money politics tersebut, yang mana faktualnya sampai pada jawaban ini diajukan tidak terdapat temuan pelanggaran atas tindak pidana *money politics* dimaksud;
- Bahwa jika menilai dalil Pemohon terhadap relevansi perolehan suara di Desa Lakologou, maka dapat diketahui sesungguhnya Pemohon hanya berasumsi bahwa terjadi politik uang secara massif yang berpengaruh terhadap perolehan suara di Kecamatan Tongkuno, justru sebaliknya perolehan suara Pemohon lebih unggul di wilayah *a quo* (**Vide Bukti T-17**)

| KECAMATAN TONGKUNO | |
|---|-------------------|
| <u>PIHAK TERKAIT</u> | |
| Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 2.272 |
| <u>PEMOHON</u> | |
| LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 2 .396 |

- 3) Dalil Pemohon tidak benar terkait temuan kejadian di Kecamatan Parigi : Adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) yang bungkus amplop pada tanggal 25 November 2024 di Desa Wakumoro. Pembagian uang dimaksud

dilakukan masyarakat atas perintah Camat Parigi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1. Selain itu ada arahan dan tekanan oleh Kepala Puskesmas kepada Honrer Puskesmas untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1.

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana *ulus testis nulus testis* satu saksi bukanlah saksi.
- Bahwa jika menilai relevansi dalil Pemohon terhadap signifikansi perolehan suara, sesungguhnya tidak ada relevansi dalil Pemohon terhadap kejadian di *locus* yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana **di Kecamatan ini Pemohon meraih suara terbanyak (Vide Bukti T-17);**

| KECAMATAN PARIGI | |
|---|--------------|
| <u>PIHAK TERKAIT</u> | |
| Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 2.602 |
| <u>PEMOHON</u> | |
| LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 2.988 |

- Bahwa mengenai dalil Pemohon *a quo* adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna untuk penanganan tindak pidana money politics tersebut, yang mana faktualnya sampai pada jawaban ini diajukan tidak terdapat temuan pelanggaran atas tindak pidana *money politics* dimaksud.

- 4) Dalil Pemohon tidak benar terkait Temuan kejadian di Kecamatan Kontukowuna;
- Bahwa tidak benar adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat yang masing-masing mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop pada tanggal 26 November 2024 di Desa Kontukowuna yang terjadi di rumah Kepala Desa, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1. Uang dimaksud bersumber dari Pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
 - Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana *ulus testis nulus testis* satu saksi bukanlah saksi. Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
 - Bahwa mengenai dalil Pemohon *a quo* adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna untuk penanganan tindak pidana *money politics* tersebut, yang mana faktualnya sampai pada jawaban ini diajukan tidak terdapat temuan pelanggaran atas tindak pidana *money politics* dimaksud;
- 5) Bahwa dalil Pemohon tidak benar terhadap peristiwa adanya bagi-bagi amplop sebanyak 24 (dua puluh empat) amplop yang berisi uang masing-masing terisi Rp. 200.00,- (dua ratus ribu), telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Muna, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor:: 026/LP/PB/Kab/28.09/ XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, namun belum mendapat tanggapan/respon;
- Bahwa laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Muna sesungguhnya telah diproses, bukan tidak mendapat respon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk ditindaklanjuti sehingga dihentikan karena sepanjang yang dimaksud pelanggaran *aquo* Pihak terkait tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan pelanggaran dari Bawaslu kabupaten Muna;
 - Bahwa dengan diprosesnya laporan *a quo* dan tidak memenuhi unsur pelanggaran, maka secara hukum dalil yang dimaksud oleh Pemohon teruji kebenarannya secara hukum sehingga dapat dinilai sebagai suatu dalil yang tidak beralasan hukum;
- 6) Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait ada tanggal 26 November 2024 ada pembagian uang sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu) dalam amplop yang dilakukan oleh anggota BPD Desa Kontukowuna dibagikan kepada masyarakat atas perintah Kepala Desa, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1.
- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana *ulus testis nulus testis* satu saksi bukanlah saksi. Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
 - Bahwa ketiaadaan peristiwa *money politics* dimaksud sebagaimana tidak adanya temuan Bawaslu Kabupaten Muna, maka dalil *a quo* haruslah dipandang sebagai suatu dalil yang tidak pernah terjadi, maka beralasan bagi Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon dimaksud;
- 7) Bahwa dalil Pemohon tidak benar terkait, adanya pembagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dalam amplop yang dilakukan oleh KAUR/Perangkat Desa Kontukowuna dibagikan kepada masyarakat atas perintah Kepala Desa, untuk

mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor Urut 1, Pada tanggal 26 November 2024.

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana *ulus testis nulus testis* satu saksi bukanlah saksi. Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
- Bahwa ketiadaan peristiwa *money politics* dimaksud sebagaimana tidak adanya temuan Bawaslu Kabupaten Muna, maka dalil *a quo* haruslah dipandang sebagai suatu dalil yang tidak pernah terjadi, maka beralasan bagi Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon dimaksud;

8) Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait pada tanggal 27 November 2024 terjadi pemecatan/ pemberhentian, tekanan kepada 4 (empat) orang Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kontukowuna karena tidak mengikuti keinginan/perintah Kepala Desa untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1.

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana *ulus testis nulus testis* satu saksi bukanlah saksi.
- Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
- Bahwa ketiadaan peristiwa *money politics* dimaksud sebagaimana tidak adanya temuan Bawaslu Kabupaten Muna, maka dalil *a quo* haruslah dipandang sebagai suatu dalil yang tidak pernah terjadi, maka beralasan bagi Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon dimaksud;

- 9) Bahwa dalil Pemohon tidak benar terkait temuan kejadian di Kecamatan Wakorumba Selatan : Pada tanggal 21 November 2024 terjadi ancaman dan tekanan, kepada masyarakat yang memiliki keluarga/ anak sebagai ASN Pemda Muna untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adanya pemaksaan kepada warga untuk menurunkan Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ada di halaman rumah warga, dengan ancaman akan memindah tugaskan keluarga/ anak yang seorang Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana *ulus testis nulus testis* satu saksi bukanlah saksi. Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
 - Bahwa ketiadaan peristiwa dimaksud sebagaimana tidak adanya laporan maupun temuan Bawaslu Kabupaten Muna, maka dalil *a quo* haruslah dipandang sebagai suatu dalil yang tidak pernah terjadi, maka beralasan bagi Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon dimaksud;
- 10) Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait temuan kejadian di Kecamatan Maligano : Adanya pembagian uang sebanyak Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 November 2024, dimulai pukul 21.30 sampai pukul 04.30 dini hari (dalam satu malam). Pembagian uang kepada masyarakat, yang masing-masing sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu) per amplop yang dilakukan oleh Soerang warga dibagikan kepada masyarakat Desa Pohorua dan Desa Bone-Bone. Uang sebesar Rp. 25.500.000,- tersebut bersumber urunan/patungan secara bersama-sama dari Kepala Desa Pohorua dan Kepala SD Batukara dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan

masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1.

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana ulus testis nulus testis satu saksi bukanlah saksi. Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
- Berdasarkan Formulir D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI perolehan suara masing-masing Pason di Desa Pohorua, Kecamatan Maligano justru menunjukkan peraih suara terbanyak pada TPS wilayah dimaksud adalah Pemohon. Sehingga dalil politik uang *a quo* menjadi tidak relevan dengan hasil pemungutan suara (**Vide Bukti T-17**).

| KECAMATAN MALIGANO | |
|---|--------------|
| <u>PIHAK TERKAIT</u> | |
| Drs. H. BACHRUN, M.Si. LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H. | 1.634 |
| <u>PEMOHON</u> | |
| LA ODE M. RAJIUN TUMADA, S.Pd., M.Si. PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si. | 1.757 |

- Bahwa ketiadaan peristiwa *money politics* dimaksud sebagaimana tidak adanya temuan Bawaslu Kabupaten Muna, maka dalil *a quo* haruslah dipandang sebagai suatu dalil yang tidak pernah terjadi, maka beralasan bagi Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon dimaksud;

11) Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait temuan kejadian di Kecamatan Napabalano, sebagaimana diuraikan :

- Bahwa tidak benar adanya peristiwa pembagian uang kepada masyarakat mendapat besaran Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop pada tanggal 25 November 2024 di Kelurahan Tampo, yang dilakukan oleh Pengurus Partai Nasdem, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1;
- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana ulus testis nulus testis satu saksi bukanlah saksi.
- Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
- Bahwa sesungguhnya dalil Pemohon *a quo* sekaitan dengan *money politics* sangat mudah membuktikannya sebab penanganan atas pelanggaran politik uang merupakan ranah wewenang Bawaslu Kabupaten Muna, dan hingga saat ini tidak ada peristiwa politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabuptaen Muna sehubungan dengan dalil Pemohon *a quo*.

12) Bahwa tidak benar adanya peristiwa bagi-bagi uang kepada masyarakat Kelurahan Tampo dan Kelurahan Napabalano, yang masing- masing mendapat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop, uang tersebut bersumber dari Lurah Tampo dan Lurah Napabalano, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1.

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat

pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana ulus testis nulus testis satu saksi bukanlah saksi.

- Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
- Bahwa sesungguhnya dalil Pemohon *a quo* sekaitan dengan *money politics* sangat mudah membuktikannya sebab penanganan atas pelanggaran politik uang merupakan ranah wewenang Bawaslu Kabupaten Muna, dan hingga saat ini tidak ada peristiwa politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabuptaen Muna sehubungan dengan dalil Pemohon *a quo*.

13) Bahwa tidak benar adanya pembagian uang kepada masyarakat Desa Langkumapo, yang masing-rnasing mendapat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) dalam amplop. Uang tersebut dibagi-bagikan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Langkumapo, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1.

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana ulus testis nulus testis satu saksi bukanlah saksi.
- Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
- Bahwa sesungguhnya dalil Pemohon *a quo* sekaitan dengan *money politics* sangat mudah membuktikannya sebab penanganan atas pelanggaran politik uang merupakan ranah wewenang Bawaslu Kabupaten Muna, dan hingga saat ini tidak ada peristiwa politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabuptaen Muna sehubungan dengan dalil Pemohon *a quo*.

- 14) Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait temuan kejadian di Kecamatan Katobu, adanya pembagian uang kepada masyarakat Katobu, yang mendapat sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) dan bagi-bagi beras ukuran 5 Kg. kepada warga. uang dan beras tersebut dibagi-bagikan oleh seorang Camat, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.
- Bahwa peristiwa ini sudah dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Muna oleh Pemohon dan telah dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, DIKARENAKAN TIDAK ADA LAPORAN TINDAK PIDANA yang memenuhi syarat formil dan materil di Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Muna;
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak patut dipertimbangkan karena telah teruji secara hukum bahwa tidak benar apa yang dimaksud oleh Pemohon dalam dalilnya.
- 15) Bahwa tidak benar dalil Pemohon terkait temuan kejadian di Kecamatan Kontunaga Adanya pengalokasian uang kepada team satgas Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk dibagi-bagi kepada masyarakat. Uang tersebut sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta). Uang tersebut bersumber dari seorang Camat, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1.
- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena tidak terverifikasi kebenarannya dan hanya mengajukan affidavit/surat pernyataan sepihak orang per orang, yang berarti tidak memenuhi kaidah kesaksian sebagaimana ulus testis nulus testis, satu saksi bukanlah saksi. Pemohon juga tidak pernah melaporkan peristiwa ini ke Bawaslu Kabupaten Muna;
 - Bahwa mengenai dalil Pemohon *a quo* adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Muna untuk penanganan tindak pidana *money*

politics tersebut, yang mana faktualnya sampai pada jawaban ini diajukan tidak terdapat temuan pelanggaran atas tindak pidana *money politics* dimaksud.

16) Dalil Pemohon perihal adanya *Money Politics* di Kecamatan Kontunaga adalah tidak benar

- Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengalokasian uang sebesar Rp. 77.000.000.- oleh seorang Camat kepada Tim Satgas Paslon Nomor Urut 1 untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di Kecamatan Kontunaga untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan kenyataan adanya. Hal ini terukur dengan tidak adanya temuan dan laporan ke Bawaslu Kabupaten Muna perihal peristiwa politik uang sebagaimana dalil Pemohon *a quo*;
- Bahwa dengan demikian karena peristiwa politik uang sebagaimana dalil Pemohon *a quo* tidak ada sebagaimana ketiadaan kasus dimaksud yang tertangani oleh Bawaslu Kabupaten Muna, maka dalil Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan secara hukum.

17) Dalil Pemohon perihal *Money Politics* di Kecamatan Batukara adalah Tidak Benar

- Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa terjadi pembagian untuk sebesar Rp. 200.000,- per orang di Desa Bone-Bone, Kecamatan Maligano untuk mempengaruhi pemilih memilih Paslon Nomor Urut 1;
- Bahwa dalil PEMOHON *a quo* kabur, sebab pada Kecamatan Maligano tidak terdapat Desa Bone-Bone. Melainkan keberadaan Desa Bone-Bone berada pada Kecamatan Batukara;
- Bahwa karena dalil politik uang yang didalilkan tidak jelas *locus* kejadiannya, maka menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil *a quo*.

C. DALIL PEMOHON TERKAIT PELANGGARAN PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG MENGUNTUNGKAN PIHAK TERKAIT

Pencetakan Buku Visi-Misi yang dianggap Menguntungkan Pihak Terkait

- 1) Bahwa Pemohon menuding saat mencetak buku visi-misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna pada halaman pertama visi-misi Paslon Nomor Urut 1 terdapat logo Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang menurut Pemohon, seharusnya Termohon tidak mencetak dan tidak membagikan buku visi-misi tersebut karena terdapat logo Pemda Kabupaten Muna;
- 2) Bahwa desain materi visi-misi untuk setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap Operator Sistem Pencalonan (SILON) Paslon melalui aplikasi SILON Pemilihan Kepala Daerah yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Muna, sehingga masing-masing pasangan calon diberi kebebasan untuk mendesain tampilan, isi dan kontennya;
- 3) Bahwa terhadap peristiwa ini Pemohon telah melaporkan peristiwa yang didalilkan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Muna, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024, Pemohon berbohong dengan mendalilkan belum mendapat tanggapan/respon, notabene diteruskan ke DKPP;
- 4) Bahwa atas laporan Pemohon oleh DKPP telah menyatakan gugur pada verifikasi administrasi sehingga menjadi terukur secara hukum bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah merupakan suatu pelanggaran pemilihan (**Vide Bukti PT-4**);
- 5) Pemohon juga tidak mengurai apa relevansi diil Pemohon dengan keterpengaruhan terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, secara jelas bahwa dalil Pemohon tidak berkaitan dengan framing TSM yang diupayakan oleh Pemohon dalam pokok-pokok permohonan *aquo*;

- 6) Bahwa dalil Pemohon tidak berbasis logika yang wajar dikarenakan menyamakan logo pemerintah daerah sebagai representasi Pihak Terkait, notabene pencantuman logo adalah sebagai simbol yang menunjukkan wilayah yang sedang menyelenggarakan pemilihan.

Dalil Pemohon Terkait Pemasangan Baliho yang mencantumkan Ajakan Memilih yang Menguntungkan Pihak Terkait

- 7) Bahwa Pemohon mencetak Baliho yang berisi tulisan “UNTUK MEMILIH I” yang diasumsikan oleh PEMOHON bahwa tulisan tersebut sebagai seruan kepada Masyarakat Kabupaten Muna untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 dan atas Baliho tersebut telah dilakukan pemasangan atas Baliho tersebut diseluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Muna pada tanggal 24 Desember 2024;
- 8) Bahwa tidak ada temuan ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna berkaitan dengan Baliho dan Spanduk “AYO DATANG KE TPS” yang telah dicetak dan terpasang mulai tanggal 23 s.d 24 November 2024;
- 9) Bahwa dalil Pemohon sangat sulit dihubungkan dengan pengaruh signifikansi suara. Terlebih simbol yang terpampang bukanlah angka 1 (satu) dan secara jelas dapat dibedakan dengan angka 1(satu);
- 10) Bahwa jika apa yang dituding Pemohon sebagai suatu ajakan yang bernilai signifikan dalam mempengaruhi pemilih maka seharusnya berlaku pula kemenangan pada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, namun kenyataannya tidak demikian sebagaimana perolehan suaranya berada di bawah pasangan calon lainnya (**Bukti PT-18**)

Perihal Penertiban Baliho Sampai dengan Selesainya Pemilihan

- 11) Bahwa Pemohon mengulangi dalilnya dengan menyatakan bahwa adanya Baliho dari Pihak terkait yang tidak ditertibkan hingga sampainya berakhirnya pemilihan;
- 12) Bahwa dalil *aquo* telah terjawab pada Jawaban Pihak Terkait Dalil A angka 13) halaman 19;

- 13) Bahwa pengulang-ulangan dalil oleh Pemohon mengindikasikan maksud Pemohon agar memframing seolah kejadian yang terjadi yang diasumsikan Pemohon sebagai suatu peristiwa yang massif;

Pemohon mendallikan bahwa perekrutan PPK dan KPPS lebih banyak bersumber dari ASN dan Honorer di Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna sehingga menguntungkan Pihak Terkait;

- 14) Bahwa Pemohon tidak memahami regulasi perekrutan PPK dan KPPS sebagaimana tidak ada larangan untuk merekrut PPK dan KPPS dari kalangan ASN dan Honorer;

- 15) Bahwa Pemohon pun mengakui bahwa apa yang ia dalilkan sendiri bukanlah hal yang terlarang sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 26 s.d 26 pada poin 1.4 *“Bahwa TERMOHON melakukan perekrutan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPP) banyak dari kalangan Aparatur Sipil Negara dan tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. Kendati secara normatif tidak ada yang salah dengan TERMOHON, namun mengingat Calon Nomor Urut 1 adalah calon petahana, untuk menjaga netralitas dan independensi penyelenggaraan Pemilihan, seharusnya TERMOHON membatasi atau tidak boleh menerima anggota PPS dan anggota KPPS dari kalangan ASN dan Honorer dari Lingkungan Pemda Muna...”*

- 16) Bahwa dalil Pemohon bersifat kabur (*Obscuur Libels*) dikarenakan telah mempersoalkan malah juga menganggap sebagai suatu hal yang tidak dilarang. Pemohon bahkan melarang atau menciptakan norma baru dengan mengarahkan agar membatasi atau tidak boleh anggota PPK dan KPPS berasal dari kalangan ASN dan honorer, dengan demikian patut untuk tidak dipertimbangkan;

- 17) Bahwa apakah ASN dan Honorer merupakan suatu jabatan yang dilarang untuk menjadi PPK dan KPPS sesungguhnya sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota, mengenai syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS telah diatur yakni sebagai berikut:

Syarat untuk mejadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *Barusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
- c. *Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- d. *Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
- e. *Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
- f. *Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
- g. *Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*

Pasal 58 PKPU 8/2022

- (1) *Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota*
- (2) *Sarana dan prasarana kesekretariatan PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten/kota.*

Pasal 69 PKPU 8/2022

- (1) *Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.*
- (2) *Sarana dan prasarana kesekretariatan PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.*

Bahwa Pemohon mendalilkan Kecurangan yang Terjadi di Beberapa TPS yang dilakukan oleh Anggota KPPS pada Beberapa Kecamatan dan Banyak Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;

18) Bahwa terhadap dalil Pemohon, kejadian yang dimaksud sebagai suatu syarat terjadinya kebatalan atau pemilihan suara ulang adalah sebagai berikut :

- a)** Mengenai peristiwa di Kecamatan Lasalepa, Desa Labone, TPS 003 KPPS membatasi pemilih yang terdaftar dalam DPT atas nama WA ODE NIA untuk memilih.
- b)** Mengenai Peristiwa di Kecamatan Napabalano, Kelurahan Tampo, TPS 001 KPPS membiarkan ODGJ atas nama LA DUMA No. DPT 190 menggunakan hak pilihnya.
- c)** Mengenai Pemilih atas nama JULIANTI, MUJAHID dan HASTIERNI menyalurkan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Tampo padahal tidak masuk dalam DPT
- d)** Mengenai KPPS TPS 003 Kelurahan Tampo mencoblos surat suara untuk pemilih atas nama LA FIIDI
- e)** Mengenai pemilih atas nama DWI YANI tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena membawa Kartu Keluarga di TPS 005 Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano Mengenai Pemilih atas nama SITTI RAHMAWATI ODE dan SAHABUL HIJRI menyalurkan hak pilih di TPS 001 Desa Pentiro Kecamatan Napabalano padahal tidak masuk dalam DPT
- f)** Mengenai Pemilih atas nama SITTI RAHMAWATI ODE dan SAHABUL HIJRI menyalurkan hak pilih di TPS 001 Desa Pentiro Kecamatan Napabalano padahal tidak masuk dalam DPT
- g)** Mengenai Pemilih atas nama LA ODE RONAL dan WA ODE RAHMAT GUSTI yang memilih lebih dari 1 (satu) kali
- h)** Mengenai Pemilih Atas Nama LA ODE MILA Dan WA UCI Mengenai Perbedaan Data Pada C.Hasil, C.Hasil Salinan Daftar Hadir dengan Jumlah Surat Suara Sah di TPS 002 Desa Lohia
- i)** Mengenai Kekeliruan Memasukkan Sampul C.Hasil Salinan Bupati dan Wakil Bupati ke dalam Kota Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 002 Desa Lakarama, Kecamatan Towea
- j)** Mengenai Kekeliruan Memasukkan Sampul C.Hasil Salinan Bupati dan Wakil Bupati ke dalam Kota Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 003 Desa Bhontu-Bhontu, Kecamatan Towea
- k)** Mengenai Anggota KPPS TPS 006 Kelurahan Laiworu, Kecamatan

Laiworu enumpahkan Isi Kota Suara ke Lantai Mengenai Anggota KPPS TPS 006 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Laiworu Menumpahkan Isi Kota Suara ke Lantai

f) Mengenai Kesalahan Pengisian Formulir C. Hasil pada Kolom Jumlah Sisa Suara yang Tidak Digunakan yang terjadi di TPS 1, Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno.

19) Bahwa seluruh kejadian yang dimaksud oleh Pemohon tidak ada satu pun yang berujung pada dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana tidak ada satu pun rekomendasi Pengawas Pemilihan Kecamatan;

20) Bahwa Kejadian-kejadian tersebut sesungguhnya kejadian yang sudah terselesaikan di tingkat TPS dan tidak ada rekomendasi pengawas pemilihan bahwa kejadian-kejadian *aquo* merupakan bentuk pelanggaran pemilihan;

21) Bahwa selanjutnya, dapatlah terukur apakah kejadian-kejadian yang dimaksud oleh Pemohon dapat memenuhi unsur Terstruktur dalam kerangka TSM, secara penalaran hukum yang wajar dapat disimpulkan bahwa kejadian-kejadian *aquo* bukanlah bentuk perbuatan yang sengaja dilakukan oleh penyelenggara untuk memenangkan Pihak Terkait.

Mengenai Pada Beberapa Kejadian Khusus Terlihat Tidak Profesionalnya TERMOHON Dalam Melakukan Proses Rekapitulasi

22) Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Muna dalam Melakukan Rekapitulasi di lokasi yakni :

- a. Kecamatan Bonea
- b. Kecamatan Katobu
- c. Kesalahan Penulisan Formulir D. Hasil Kecamatan Tongkuno
- d. Perbedaan Data Pemilih DPT yang ditulis di dalam Formulir D. Hasil Kecamatan Watopute
- e. Perbedaan Data pada DPT Pemilih di Formulir D. Hasil Kecamatan Kabangka

- 23) Bahwa terhadap dalil-dalil *aquo*, Pemohon tidak pernah melaporkannya ke Pengawas Pemilihan dan tidak ada temuan Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan maupun kabupaten yang berujung pada PSU.
- 24) Bahwa untuk membuktikan bahwa dalil Pemohon beralasan hukum setidaknya dapat terukur atau teruji keabsahannya jika Pemohon melaporkan kejadian-kejadian *a quo* sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan dan pelanggaran etik. Namun tidak ada satu pun yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana **jenis pelanggaran proses notabene bukan penyelesaian hasil** yang dimaksud oleh Pemohon adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya;
- 25) Bahwa kejadian-kejadian yang dimaksud oleh Pemohon tidak berdampak terhadap perolehan suara Pihak Terkait, apalagi untuk sekadar memenuhi signifikansi, tidak memiliki relevansi terhadap konstruksi TSM, melainkan jenis pelanggaran-pelanggaran yang telah terselesaikan di sesuai tingkatannya.
- 26) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang mencoba menggiring kesimpulan pada terjadinya peristiwa TSM, terlaksanannya PSU, serta hal yang mempengaruhi signifikansi perolehan suara tidak ada satu pun yang terbukti, maka dengan demikian patutlah ditolak dalil-dalil Pemohon oleh Mahkamah;
- 27) Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran pada tahapan pemungutan suara yang berkonsekuensi atas Pemungutan Suara Ulang;
- 28) Bahwa dengan demikian Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna 2024 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Data Rekapitulasi Kependudukan Kabupaten Muna, data Konsolidasi Bersih (DKB) semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Muna;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Status Pemberitahuan Laporan DKPP No : 670/02-3/SET-02/XII/2024 Tanggal 10 Januari 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Kumpulan Laporan dan Status Pemberitahuan Laporan dari Bawaslu Kabupaten Muna;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 00300/12030/AZ/07/24 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Nomor : 100.2.2.6/2587/SJ, Tertanggal 3 Juni 2024 dan Fotokopi Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrasi dan pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Nomor : 100.2.2.6/4872/OTDA, Tertanggal 2 Juli 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kontrak Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Bantuan Benih Jagung Hibrida Tahun 2024 dengan kontrak tertanggal 1 November 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Undangan Monitoring Kesiapan Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Muna Tanggal 15 Oktober 2024 dan Prinout Berita Kunjungan Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 03 Oktober 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Peraturan Bupati Muna Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa yang dikeluarkan sejak tanggal 21 Oktober 2022;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Muna Tahun 2023 Tentang Jenis Komoditas Unggulan dan Lokasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa Tahun 2023;
12. Bukti PT-12 : Foto Speedboat yang ditumpangi oleh Calon Bupati Drs.H. Bachrun, M.Si. dan Foto Speedboat Sangke Palangga dan Foto Plt. Bupati Muna sebelum penetapan calon;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat oleh Plt. Bupati Muna Drs. H. Bachrun, M.Si. melalui Surat Bupati Muna Nomor 200.2.1/2314 Hal: Penyampaian Untuk Menjaga Situasi

- Kambtibmas yang ditujukan kepada Para Kepala Dinas/Badan Lingkup Kabupaten Muna dan Camat Se-Kabupaten Muna, tanggal 26 November 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Pemberitaan Resmi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak dengan daerah yang rawan tinggi salah satunya adalah Kabupaten Muna, <https://sultra.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2024/09/whatsapp> tanggal 9 September 2024;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Pemberitaan Korban Meninggal akibat konflik Pilkada Muna Tahun 2020, <https://timurnews.com/koordinator-satgas-kompi-b-meninggal-bupatu-muna-dan-ketua-tim-terbaik-dihimbau-tahan-diri/12605/> tanggal 27 Desember 2024;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Muna Nomor 800.1/2050 perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditanda tangani oleh Pjs Bupati Muna YUNI NURMALAWATI tanggal 27 September 2024;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO /KWK/BUPATI Kabupaten Muna;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi MODEL D.HASIL GUB Provinsi Sulawesi Tenggara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENYALAGGUNAAN JABATAN CALON PATAHANA DAN PEMANFAATAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU);

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan penyalagunaan jabatan calon patahana dan pemanfaatan program pemerintah untuk memenangkan pasangan

calon nomor urut 1 (satu) (huruf A angka 6 sampai 9 halaman 4 sampai dengan 15) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.00.02/K.SG-13/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.00.02/K.SG-13/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, dengan jumlah hasil perolehan D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada proses pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024, dengan jumlah perolehan suara sebagai berikut, **(Vide Bukti PK.26.3-1).**

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH. | 53.908 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si. | 47.655 |
| 3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 La Ode Kardini, SE., M.Si., dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T.I.P.M | 11.563 |
| 4. | Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Abdul Rahman, SH., MH. dan Awal Jaya Bolombo, SH. | 4.331 |

| | | |
|-----------------|--|---------|
| 5. | Pasangan Calon Nomor Urut 5 La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M. dan Drs. Syarifuddin, M.M | 629 |
| Total Suara Sah | | 118.086 |

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa calon Petahana dalam rangka memuluskan rancana pemenangannya dalam Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna, telah melakukan penyalahgunaan jabatan secara berulang-ulang dalam berbagai kesempatan, seperti melakukan mutasi sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada tanggal 6 Juni 2024 terjadi mutasi 31 Pejabat Eselon II, *Kedua* tanggal 12 Juli 2024 terjadi penggantian 21 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemda Muna. Mutasi tersebut dilakukan tanpa Izin Menteri terkait, yang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon. (Huruf A angka 1 halaman 11) Terhadap dalil Pemohon, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 190/PM.00.02/K.SG.13/4/2024 tanggal 3 April 2024 yang ditujukan kepada Plt Bupati Muna untuk tidak melakukan pergantian mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, imbauan tersebut dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota

dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,

(Vide Bukti PK.26.3-2).

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah mengeluarkan surat nomor 59/HM.02/K.SG-13/07/2024 Tanggal 15 Juli Tahun 2024 perihal permintaan salinan dokumen surat persetujuan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri tentang mutasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-3).**
3. Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 100.2.2.6/2265/OTDA tanggal 22 Maret 2024 tentang Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-4).**
4. Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor 100.2.2.6/4872/OTDA tanggal 2 Juli 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-5).**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pemanfaatan penyaluran program pemerintah ditahapan kampanye pada bulan November 2024, dalam bentuk pendistribusian 32.000 (tiga puluh dua ribu) ton bibit jangung untuk 7 (tujuh) Kecamatan, selanjutnya adanya kunjungan kerja oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andap Budhi Revianto di Kabupaten Muna, yang menyelenggarakan program saluran bantuan Pompanisasi kepada petani dan kegiatan Pasar Murah yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Muna dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muna. (Huruf A angka 2 sampai dengan angka 3 Tabel IV nomor urut 1 sampai 4, dan 6 sampai 9 halaman 11 sampai dengan halaman 14) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dengan menerbitkan Imbauan, sebagai berikut :

1. Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 325/PM.00.02/K.SG-10/09/2024 Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dalam menjalankan aktivitas kampanye untuk patuh dan berpedoman terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang pada pokoknya :
 - 1.1 Menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dalam menjalankan aktivitas kampanye untuk patuh dan berpedoman terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.2 Imbauan tersebut menerangkan agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tidak menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama masa kampanye yang berlangsung dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, **(Vide Bukti PK.26.3-6).**
2. Surat Imbauan Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 413/PM.00.02/K.SG-13/11/2024 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna perihal Imbauan Pencegahan Pelanggaran untuk Tidak Melakukan Kampanye pada masa tenang, **(Vide Bukti PK.26.3-7).**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012 /LHP/PM.01.02/K.SG-13/11/2024 Tanggal 25 November 2024 yang pada

pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan pengawasan terkait Pembersihan APK, **(Vide Bukti PK.26.3-8)**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan calon Petahana menggunakan/memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan kebijakan dan anggaran daerah secara langsung untuk mendukung setiap kampanye Calon Petahana sebagai Calon Bupati yang dilakukan diluar jadwal dan diwaktu/dalam masa tenang menjelang hari pemilihan. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosial yang dijadikan sebagai media publisitas untuk kegiatan yang mendukung pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati; (huruf A angka 4 tabel IV nomor urut 5 halaman 14) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

1.1 Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Muhammad Rayu Welendo, berdasarkan formulir Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, **(Vide Bukti PK.26.3-9)**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Rayu Welendo dengan Terlapor atas nama Drs. Bachrun, M. Si (Calon Bupati Muna Nomor Urut 1) terkait dugaan Kampanye diluar jadwal yang diregistrasi pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor Register 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, **(Vide Bukti PK.26.3-9)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

1.1. Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-10)**.

- 1.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi serta kajian, **(Vide Bukti PK.26.3-11)**.
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Muna kajian dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 07 Desember 2024 dengan nomor 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, **(Vide Bukti PK.26.3-12)**.
- 1.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan kedua sebagaimana dituangkan dalam berita acara pembahasan kedua tanggal 08 Desember 2024 laporan pelapor bukan merupakan perbuatan pidana dan dihentikan pada pembahasan kedua karena dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti maka laporan bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam pendapatnya :
 - 1.4.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
 - 1.4.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
 - 1.4.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa sangkaan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti, **(Vide Bukti PK.26.3-13)**.
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 8 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-14)**.

BAHWA TELAH TERJADI Pengerahan Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemda Kabupaten Muna.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pembentukan tim pemenangan Calon Patahana dengan menggerakkan dan mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara mulai dari Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV (Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah) serta semua tenaga honorer Lingkungan Pemda Muna dan semua Kepala Desa secara berjenjang/tingkatan secara terstruktur, sistematis dan masif.(Huruf B angka 1 halaman 16-18) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 013/LP/PB/Kab/28.09/X/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Abdi Nipangeran dengan Terlapor atas La Harifu, Siti Zalia, Nur Ida Alim dan Rahman terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Aparatur sipil negara, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 24 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-15)**.
2. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 005/Lp/Pb/Kab/28.09/09/2024 atas nama Abdi Nipangeran pada tanggal 30 September Terlapor atas Wiraman Almia terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-16)**.
3. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 004/Lp/Pb/Kab/28.09/09/2024 tanggal 30 september 2024, pelapor atas nama Abdi Nipangeran terlapor atas nama La harifu, Rahman, Mustati dan farlin, terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-17)**.
4. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 030/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor atas nama sitti Rahmawati terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan

status laporan pada tanggal 6 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-18**).

5. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, terlapor Edi Uga terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-19**).
6. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 028/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor La Ode Tasman Amd terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-20**).
7. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Marwin berdasarkan formulir Laporan Nomor 031/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor Badrun Mbaai, Salam, LM Saidin Dan Alibaba; terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-21**).
8. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 029/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor La Ode Mania; terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-22**).
9. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama La Ode Syahribin, S.Sos., S.H berdasarkan Formulir Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor Bachrun MSi; terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-23**).
10. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan

atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 023/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, terlapor Kubais, Amirudin dan Sunarti terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-24)**.

11. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Hasan Jufri berdasarkan formulir Laporan Nomor 024/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, Terlapor Kubais terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-25)**.
12. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Muhammad Rayu Welendo, berdasarkan Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, Terlapor DRS Bahrul MSi terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 08 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-9)**.
13. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama SAHRUL MARIANA berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/Lp/Pb/Kab/28.09/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024, terlapor La Ode Kadimba terkait dugaan Netralitas Perangkat Desa. Terhadap laporan tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Kontunaga telah menjadikan sebagai temuan pelanggaran dan mengeluarkan status laporan dan meneruskan dugaan pelanggaran pada Pjs. Bupati Muna pada tanggal 09 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-26)**.
14. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 012/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, terlapor La Ode Munagul terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 14 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-27)**.
15. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor

011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, Terlapor Wa Lindo, S. Pd, terkait dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal; 14 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-28)**.

16. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/Lp/Pb/Kab/28.09/9/2024 tanggal 30 September 2024, terlapor Pasangan Calon Bupati Muna Nomor urut 1 Bahrin-Asrafil terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-29)**.

17. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Laporan Nomor 019/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 Terlapor 33 Orang Aparatur Sipil Negara terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 8 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-30)**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 013/LP/PB/Kab/28.09/X/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Abdi Nipangeran dengan Terlapor atas La Harifu, Siti Zalia, Nur Ida Alim dan Rahman terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Aparatur sipil negara, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 24 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-15)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

1.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 013/LP/Pb/Kab/28.09/X/2024 pada tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-31)**.

1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya laporan dengan Nomor Register

04/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 berdasarkan hasil kajian awal dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti maka laporan dilanjutkan pada tahapan kalrifikasi para pihak pelapor dan terlapor.

- 1.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 1.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 1.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-32)**.
- 1.3 Bawaslu melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor Register 04/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2024 Dalam perkara *a quo*, Pleno Bawaslu Kabupaten Muna memutuskan laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal pada tanggal 24 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-33)**
- 1.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan kedua sebagaimana dituangkan dalam berita acara pembahasan kedua tanggal 24 Oktober 2024 laporan pelapor bukan merupakan perbuatan pidana dan dihentikan pada pembahasan kedua karena dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti maka laporan bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam pendapatnya :
 - 1.4.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
 - 1.4.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
 - 1.4.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa sangkaan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti, **(Vide Bukti PK.26.3-**

34).

- 1.5 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan Nomor Register 04/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-35)**.
- 1.6 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi surat Nomor 105/HM.02/K.SG-13/11/2024 tanggal 03 November 2024 hasil kajian kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), **(Vide Bukti PK.26.3-36)**.
2. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 005/Lp/Pb/Kab/28.09/09/2024 atas nama Abdi Nipangeran pada tanggal 30 September Terlapor atas Wiraman Almia terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-16)** dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 005/LP/Pb/Kab/28.09/09/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-37)**.
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan Nomor 005/LP/PB/KAB/28.09/09/2024 tanggal 04 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-38)**.
 - 2.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan penanganan pelanggaran nomor 89/HM.02/K.SG-13/10/2024 Tanggal 09 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) Regional Makasar, **(Vide Bukti PK.26.3-39)**.
3. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 004/Lp/Pb/Kab/28.09/09/2024 tanggal 30 september 2024, pelapor atas nama Abdi Nipangeran terlapor atas nama La Harifu, Rahman, Mustati dan farlin, terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-17)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

- 3.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 004/LP/Pb/Kab/28.09/09/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-40)**.
- 3.2 Bawaslu Muna mengeluarkan status laporan Nomor 004/LP/Pb/Kab/28.09/09/2024 tanggal 04 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-41)**.
- 3.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 89/HM.02/K.SG-13/10/2024 Tanggal 09 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) Regional Makasar, **(Vide Bukti PK.26.3-39)**.
4. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 030/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor atas nama sitti Rahmawati terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-18)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 4.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 030/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-42)**.
 - 4.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 023/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 :
 - 4.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 4.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan

dihentikan pada pembahasan pertama.

- 4.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama; **(Vide Bukti PK.26.3-43)**.
- 4.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan Nomor 023/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-44)**.
- 4.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, **(Vide Bukti PK.26.3-45)**.
5. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, terlapor Edi Uga terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-19)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
- 5.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian nomor 020/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-46)**.
- 5.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 014/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

- 5.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 5.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 5.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-47)**.
- 5.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status Laporan Nomor 014/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-48)**.
6. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 028/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor La Ode Tasman Amd terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-20)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 6.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 028/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-49)**.
 - 6.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register: 021/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :
 - 6.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 6.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak

dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

6.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-50)**.

6.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan Status Laporan dengan Nomor 021/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-51)**.

6.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan a quo Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, **(Vide Bukti PK.26.3-45)**.

7. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Marwin berdasarkan formulir Laporan Nomor 031/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor Badrun Mbaai, Salam, LM Saidin Dan Alibaba; terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-21)** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

7.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 031/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-52)**.

7.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal

yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register: 024/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

- 7.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 7.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 7.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-53)**.
- 7.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 024/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-54)**.
- 7.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan Penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan a quo Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, **(Vide Bukti PK.26.3-45)**.
8. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 029/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor La Ode Mania; terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-22)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 8.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 029/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-55**).

8.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register: 022/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

8.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

8.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

8.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti dan dihentikan pada pembahasan pertama, (**Vide Bukti PK.26.3-56**).

8.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 022/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-57**).

8.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 kepada Badan Kepegawain Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, (**Vide Bukti PK.26.3-45**).

9. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama La Ode Syahribin, S.Sos.,S.H berdasarkan Formulir Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor

Bachrun MSi; terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-23**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

9.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 036/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-58**).

9.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 029/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

9.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

9.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

9.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, (**Vide Bukti PK.26.3-59**).

9.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 029/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-60**).

10. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 023/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, terlapor Kubais, Amirudin dan Sunarti terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-24**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

10.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor

023/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-61**).

10.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 017/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

10.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

10.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

10.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, (**Vide Bukti PK.26.3-62**).

10.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 017/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-63**).

10.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan a quo Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, (**Vide Bukti PK.26.3-45**).

11. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Hasan Jufri berdasarkan formulir Laporan Nomor

024/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, Terlapor Kubais terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-25**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

11.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 024/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-64**).

11.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 018/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

11.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

11.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

11.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, (**Vide Bukti PK.26.3-65**).

11.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 018/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-66**).

12. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Muhammad Rayu Welendo, berdasarkan formulir Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, (**Vide Bukti PK.26.3-9**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

- 12.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-10)**.
- 12.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi serta kajian, **(Vide Bukti PK.26.3-11)**.
- 12.3 Bawaslu Kabupaten Muna kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, **(Vide Bukti PK.26.3-12)**.
- 12.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan kedua sebagaimana dituangkan dalam berita acara pembahasan kedua tanggal 08 Desember 2024 laporan pelapor bukan merupakan perbuatan pidana dan dihentikan pada pembahasan kedua karena dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti maka laporan bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam pendapatnya :
- 12.4.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
- 12.4.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
- 12.4.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa sangkaan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti, **(Vide Bukti PK.26.3-13)**.
- 12.5 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 08 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-14)**.
13. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama SAHRUL MARIANA berdasarkan Formulir Laporan Nomor

008/Lp/Pb/Kab/28.09/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024,terlapor La Ode Kadimba terkait dugaan Netralitas Perangkat Desa. Terhadap laporan tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Kontunaga telah menjadikan sebagai temuan pelanggaran dan mengeluarkan status laporan dan meneruskan dugaan pelanggaran pada Pjs. Bupati Muna pada tanggal 09 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-26)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

13.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 008/LP/PB/KAB/28.09/9/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-67)**.

13.2 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 008/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 pada tanggal 09 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-68)**.

13.3 Panwascam Kontunaga memuat Formulir Model A2 temuan nomor 01/TM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 pada tanggal 07 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-69)**.

13.4 Panwascam Kontunaga melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 01/TM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan dugaan netralitas perangkat desa kepada Pjs. Bupati Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-70)**.

13.5 Panwascam Kontunaga mengumumkan status temuan nomor 01/PM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-71)**.

13.6 Panwascam Kontunaga meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa ke Pjs. Bupati Muna nomor 01/TM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-72)**.

14. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 012/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, terlapor La Ode Munagul terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada

tanggal 14 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-27**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

14.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 012/LP/Pb/Kab/28.09/10/2024 tanggal 13 Oktober 2024 dimana sebelumnya Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Nomor 008/PP.01.02/K.SG-13/10/2024 pada tanggal 12 Oktober, yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* memenuhi syarat formal dan materil, (**Vide Bukti PK.26.3-73**).

14.2 Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status laporan dengan nomor 012/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-74**).

14.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 116/HM.02/K.SG-13/10/2024 pada tanggal 15 November 2024 kepada Pjs Bupati Muna, (**Vide Bukti PK.26.3-75**)

15. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, Terlapor Wa Lindo, S. Pd, terkait dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal;14 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-28**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

15.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, (**Vide Bukti PK.26.3-76**).

15.2 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status Laporan dengan nomor : 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024, (**Vide Bukti PK.26.3-77**).

15.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 119/HM.02/K.SG-13/11/2024 Tanggal 22 November 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi

atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, **(Vide Bukti PK.26.3-78)**.

16. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/Lp/Pb/Kab/28.09/9/2024 tanggal 30 September 2024, terlapor Pasangan Calon Bupati Muna Nomor urut 1 Bahrin-Asrafil terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-29)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

16.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 006/LP/Pb/Kab/28.09/9/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-79)**.

16.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register : 01/REG/LP/PB/KAB/28.09/10/2024 :

16.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

16.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

16.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-80)**.

16.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan nomor 01/REG/LP/PB/KAB/28.09/10/2024 pelanggaran Pemilihan dan

diumumkan status laporan pada tanggal 03 Oktober 2024, (**Bukti PK.26.3-81**).

17. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 08 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-30**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

17.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 019/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, (**Vide Bukti PK.26.3-82**).

17.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 013/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi serta kajian, (**Vide Bukti PK.26.3-83**).

17.3 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 013/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 08 Desember 2024 dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, (**Vide Bukti PK.26.3-84**).

17.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya :

17.4.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

17.4.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

17.4.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa sangkaan

terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti, **(Vide Bukti PK.26.3-85)**.

17.5 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan nomor 013/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal pada tanggal 08 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-86)**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya arahan dan terencana oleh sejumlah Pejabat ASN kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda Muna untuk melakukan urunan/patungan secara bersama-sama mengumpulkan uang dengan tujuan membantu pembiayaan politik Calon Petahana termasuk melakukan pembiayaan (donatur) oleh pejabat-pejabat ASN untuk melakukan politik uang/*money politik* dengan tujuan memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. (Huruf B angka 2 halaman 18) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna:

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengarahan oleh Kepala Sekolah Dasar kepada semua Guru-Guru yang terjadi dilingkungan sekolah untuk bersama-sama memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. (Huruf B angka 3 halaman 18) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 036/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 dari Pelapor atas nama La Ode Syahribin S.Sos.,S.H dengan Terlapor Calon Bupati Muna Drs. Bachrun, MSi terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Aparatur sipil negara, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-23)**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan

atas nama La Ode Syahribin, S.Sos.,S.H berdasarkan Formulir Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor Bachrun MSi; terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024; **(Vide Bukti PK.26.3.-23)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 036/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-58)**.
- 1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register: 029/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :
 - 1.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 1.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 1.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-59)**.
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 029/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-60)**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistemik, dan Masif dan adanya pembagian uang hampir di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Muna khususnya di kecamatan di Kecamatan Tongkuno Selatan, Kecamatan Tongkuno, Kecamatan, Kecamatan Parigi, Kecamatan Kontukowuna, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kecamatan Maligano, Kecamatan Napabalano,

Kecamatan Katobu, dan Kecamatan Kontunaga (Huruf B angka 4 halaman 18) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 026/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 atas nama Dani Arsas terlapor Laghombato terkait pelanggaran tindak pidana pemilihan di Kecamatan Kontu Kowuna. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26-3-87**).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tongkuno nomor 56/LHP/PM.01.02/SG-13.15/11/2024 tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, (**Vide Bukti PK.26-3-88**).
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tongkuno Selatan nomor 8/LHP/PM.01.00/SG-13.16/11/2024 tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, (**Vide Bukti PK.26.3-89**).
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Parigi nomor 53/LHP/PM/01.02/SG-13.12/11/2024 tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, (**Vide Bukti PK.26.3-90**).
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kontukowuna nomor 048/LHP/PM.01.02/SG-13.09/XI/2024 tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, (**Vide Bukti PK.26.3-91**).
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wakorumba Selatan nomor 101/LHP/PM.01.02/SG.13.17/11/2024 tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran; (**Vide Bukti PK.26.3-92**).
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maligano nomor 21/LHP/PM.01.02/SG-13.19/11/2024 Tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, (**Vide Bukti PK.26.3-93**).
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Napabalano nomor 35/LHP/PM.01.02/SG.13.04/11/2024 Tanggal 24 sampai 26

November 2024 tidak terdapat pelanggaran, (**Vide Bukti PK.26.3-94**).

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Katobu nomor 110//LHP/PM.01.02/SG-13.01/11/2024 Tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, (**Vide Bukti PK.26.3-95**).
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kontunaga nomor 45/LHP/PM.01.02/K.SG-13.08/11/2024 Tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, (**Vide Bukti PK.26.3-96**).
10. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 026/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 atas nama Dani Arsat terlapor Laghombato terkait pelanggaran tindak pidana pemilihan di Kecamatan Kontu Kowuna. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-87**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 10.1. Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 026/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, (**Vide Bukti PK.26.3-97**)
 - 10.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register : 020/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :
 - 10.2.1. Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 10.2.2. Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 10.2.3. Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, (**Vide Bukti PK.26.3-98**).
 - 10.3. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan

nomor 020/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26-3-99**).

ADANYA KETERLIBATAN TERMOHON DALAM PRAKTEK KECURANGAN PROSES DAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon mencetak banyak buku visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati muna dan ada perbedaan pasangan calon nomor 1 dengan yang lain pasangan bachrun asrafil gambarnya sangat besar dan tampak halaman depannya sedangkan calon lain tidak terlihat dan bahkan kecil (Huruf C angka 1.1 Halaman 25), terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024 atas nama La Ode Syahribin S.Sos.,S.H terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna terkait dugaan pelanggaran Kode Etik pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 07 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-100**).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024 atas nama La Ode Syahribin S.Sos.,S.H terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna terkait dugaan pelanggaran Kode Etik pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 07 Desember 2024; (**Vide Bukti PK.26.3-100**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, (**Vide Bukti PK.26.3-101**).

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor register 016/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya sehingga laporan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), **(Vide Bukti PK.26.3-102).**
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan nomor 16/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 07 desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya diumumkan di Papan Pengumuman kantor Sekretariat Bawaslu kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-103).**
- 1.4 Bawaslu kabupaten Muna mengeluarkan rekomendasi pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran direkomendasikan ke DKPP dengan surat rekomendasi nomor 292/PP.01.02/K/SG-13/12/2024, **(Vide Bukti PK.26.3-104).**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon mencetak Baliho yang kemudian semua anggota PPS dan KPPS memasang Baliho tersebut secara serentak diseluruh Desa dan Kelurahan se Kabupaten Muna,yang didalamnya adanya bentuk seruan dan ajakan untuk memilih nomor 1 (satu) pada tanggal 24 November 2024; (Huruf C angka 1.2 halaman 26) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima Laporan dari saudara Muhamad Rayu Welendo S.E Tanggal 30 November 2024 berdasarkan formulir Laporan nomor 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024. Terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna. Selanjutnya status laporan tersebut diumumkan di papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Tanggal 07 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-105)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima Laporan dari saudara Muhamad Rayu Welendo S.E Tanggal 30 November 2024 berdasarkan formulir Laporan nomor 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024. Terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna. Selanjutnya status laporan tersebut diumumkan di papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna; Tanggal 07 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-105)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal laporan nomor 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, **(Vide Bukti PK.26.3-106)**.
 - 1.2. Bahwa berdasarkan kajian dugaan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna berdasarkan formulir laporan nomor 012/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, pada pokoknya laporan merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya sehingga laporan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), **(Vide Bukti PK.26.3-107)**.
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan nomor 12/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 07 desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya diumumkan di Papan Pengumuman kantor Sekretariat Bawaslu kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-108)**.
 - 1.4. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan rekomendasi pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran direkomendasikan ke DKPP dengan surat rekomendasi nomor 293/PP.01.02/K.SG-13/12/2024 pada tanggal 18 Desember 2024, **(Bukti PK.26.3-109)**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kesengajaan dari pihak Termohon untuk tidak menurunkan baliho-baliho pasangan nomor urut 1 (Huruf C angka 1.3 halaman 26) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan bawaslu kabupaten muna

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima Laporan dari saudara Muhamad Rayu Welendo S.E tanggal 30 November 2024 berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024. Terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna (KPU). Selanjutnya status laporan tersebut diumumkan di papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna; Pada tanggal 07 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-110)**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima Laporan dari saudara Muhamad Rayu Welendo S.E tanggal 30 November 2024 berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024. Terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna (KPU). Selanjutnya status laporan tersebut diumumkan di papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna pada tanggal 07 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-110)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

1.1. Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal laporan nomor: 017/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, **(Vide Bukti PK.26.3-111)**.

1.2. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna berdasarkan formulir laporan nomor 011/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 07 Desember 2024, Laporan tersebut mengandung pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya sehingga laporan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), **(Vide Bukti PK.26.3-112)**.

1.3. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan nomor 11/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 07 desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya diumumkan di Papan Pengumuman kantor Sekretariat Bawaslu kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-113)**.

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan rekomendasi pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran direkomendasikan ke DKPP dengan surat rekomendasi nomor 294/PP.01.02/K.SG-13/12/2024 pada tanggal 18 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-114**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melakukan perekrutan Anggota PPS dan Anggota KPPS banyak dari kalangan ASN dan tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, kendati secara normatif tidak ada yang salah dengan Termohon, namun mengingat calon nomor urut 1 adalah calon Petahana, untuk menjaga Netralitas dan Independensi Penyelenggara Pemilihan, seharusnya termohon membatasi atau tidak boleh menerima anggota PPS dan anggota KPPS dari kalangan ASN dan Honorer dari Lingkungan Pemda Muna. Huruf C angka 1.4 Halaman 26 terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan langkah pencegahan pelanggaran dengan menerbitkan Surat Imbauan nomor 191/PM.00.02/K.SG.13/4/2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Muna pada tanggal 23 April 2024 Perihal Imbauan Pencegahan Pelanggaran Perekrutan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Muna, (**Vide Bukti PK.26.3-115**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya temuan-temuan kecurangan yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa kecamatan yang mengindikasikan banyak kesalahan karena pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. (Huruf C

angka 2 Halaman 27). Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003, Desa Labone, Kecamatan Lasalepa Nomor 001/LHP/PM.01.02/SG-13.03.02.3/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pemilih atas nama Waode Nia yang berusia 57 tahun, terdaftar pada TPS 002, namun dia datang menyalurkan suaranya di TPS 003 Desa Labone. Berdasarkan hasil penelusuran bahwa Waode nia tidak menyalurkan hak suaranya di TPS 002 Dimana dia terdaftar dalam DPT. Atas kejadian tersebut dituangkan pada kejadian khusus. Proses perhitungan suara Bupati dan wakil Bupati dimulai pukul 18.30 sampai pukul 20.00 WITA, **(Vide Bukti PK.26.3-116).**
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano nomor 01/LHP/PM.01.02/SG-13.04.04.1/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-117).**
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano nomor 01/LHP/PM.01.02/SG-13.04.05.3/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-118).**
4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano nomor 01/LHP/PM.00.02/SG-13.04.04.5/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-119).**

5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano nomor 01/LHP/PM.00.02/SG-13.04.06.1/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-120)**.
6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Desa Kondongia, Kecamatan Lohia nomor 003/LHP/PM.01.02/SG-13.06.06.27/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-121)**.
7. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Desa Kondongia, Kecamatan Lohia nomor 003/LHP/PM.01.02/SG-13.06.06.27/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-122)**.
8. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Desa Lohia, Kecamatan Lohia nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-13.06.07.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-123)**.
9. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Desa Lohia, Kecamatan Lohia nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-13.06.07.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-124)**.
10. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, Desa Lakarama, Kecamatan Towea nomor 01/LHP/PM.01.02/SG-13.22.02.2/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-125)**.
11. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu nomor 002/LHP/PM.01.02/SG-13.02.04.6/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti**

PK.26.3-126).

12. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno nomor 5/LHP/PM.01.02/SG-13.15.15.2/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, (**Vide Bukti PK.26.3-127**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya temuan pada Pleno di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, sebagai bukti tidak profesionalnya termohon dalam melakukan proses rekapitulasi. (Huruf C angka 3). Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM.00.02/K-SG.13/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Muna, (**Vide Bukti PK.26-3.1**).
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 02/LHP/PM.00.02/K-SG.13/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Muna, (**Vide Bukti PK.26-3.1**).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Muna mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.26.3-1 sampai dengan Bukti PK.26.3-127, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 26.3-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.00.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024 Dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.00.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024;
2. Bukti PK. 26.3-2 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 190/PM.00.02/K.SG.13/4/2024 Tanggal 3 April 2024, Plt. Bupati Muna Untuk Tidak Melakukan Pergantian Mutasi Pejabat;
3. Bukti PK. 26.3-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Muna Nomor 59/HM.02/K.SG-13/07/2024 Tanggal 15 Juli Tahun 2024 Perihal Permintaan Salinan Dokumen Surat Persetujuan Izin Tertulis Dari Menteri Dalam Negeri Tentang Mutasi;
4. Bukti PK. 26..3-4 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2265/OTDA Tanggal 22 Maret 2024 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
5. Bukti PK. 26.3-5 : Fotokopi Surat Persetujuan Kementrian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4872/OTDA Tanggal 2 Juli 2024 Tentang Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
6. Bukti PK. 26.3-6 : Fotokopi Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 325/PM.00.02/K.SG-10/09/2024

Tanggal 24 September 2024, Kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muna;

7. Bukti PK. 26.3-7 : Fotokopi Surat Imbauan Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 413/PM.00.02/K.SG/11/2024 Tanggal 18 November 2024 Yang Ditujukan Kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muna;
8. Bukti PK. 26.3-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 012/LHP/PM.01.02/K.SG-13/11/2024 Tanggal 25 November 2024 Terkait Pembersihan APK;
9. Bukti PK. 26.3-9 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
10. Bukti PK. 26.3-10 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 06 Desember 2024;
11. Bukti PK. 26.3-11 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 3 Desember 2024;
12. Bukti PK. 26.3-12 : Fotokopi Kajian Akhir A11 Nomor 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024;
13. Bukti PK. 26.3-13 : Fotokopi Berita Acara Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Tanggal 08 Desember 2024 Nomor 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024;
14. Bukti PK. 26.3-14 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 8 Desember 2024;
15. Bukti PK. 26.3-15 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 013/LP/PB/Kab/28.09/X/2024 Pada Tanggal 17 Oktober 2024;

16. Bukti PK. 26.3-16 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 005/Lp/Pb/Kab/28.09/09/2024 Pada Tanggal 30 September 2024;
17. Bukti PK. 26.3-17 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 004/Lp/Pb/Kab/28.09/09/2024 Tanggal 30 September 2024;
18. Bukti PK. 26.3-18 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 030/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
19. Bukti PK. 26.3-19 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 020/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
20. Bukti PK. 26.3-20 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 028/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
21. Bukti PK. 26.3-21 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 031/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
22. Bukti PK. 26.3-22 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 029/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
23. Bukti PK. 26.3-23 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 036/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
24. Bukti PK. 26.3-24 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 023/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
25. Bukti PK. 26.3-25 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 024/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
26. Bukti PK. 26.3-26 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 008/Lp/Pb/Kab/28.09/10/2024 Tanggal 07 Oktober 2024;

27. Bukti PK. 26.3-27 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 012/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024;
28. Bukti PK. 26.3-28 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024;
29. Bukti PK. 26.3-29 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 006/Lp/Pb/Kab/28.09/9/2024 Tanggal 30 September 2024;
30. Bukti PK. 26.3-30 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 019/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
31. Bukti PK. 26.3-31 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 013/LP/Pb/Kab/28.09/X/2024 Pada Tanggal 19 Oktober 2024;
32. Bukti PK. 26.3-32 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 04/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2024 Tanggal 19 Oktober 2024;
33. Bukti PK. 26.3-33 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2024. Tanggal 24 Oktober 2024;
34. Bukti PK. 26.3-34 : Fotokopi Berita Acara Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 04/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2024;
35. Bukti PK. 26.3-35 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 04/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024;
36. Bukti PK. 26.3-36 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Muna Meneruskan Rekomendasi Surat Nomor 105/HM.02/K.SG-13/11/2024 Tanggal 03 November 2024 Hasil Kajian Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN);

37. Bukti PK. 26.3-37 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 005/LP/Pb/Kab/28.09/09/2024 Tanggal 04 Oktober 2024;
38. Bukti PK. 26.3-38 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 005/LP/PB/KAB/28.09/09/2024 Tanggal 04 Oktober 2024;
39. Bukti PK. 26.3-39 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Muna Meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran Nomor 89/HM.02/K.SG-13/10/2024 Tanggal 09 Oktober Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN);
40. Bukti PK. 26.3-40 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 004/LP/Pb/Kab/28.09/09/2024 Tanggal 04 Oktober 2024;
41. Bukti PK. 26.3-41 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 004/LP/Pb/Kab/28.09/09/2024 Tanggal 04 Oktober 2024;
42. Bukti PK. 26.3-42 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 030/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
43. Bukti PK. 26.3-43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor 023/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
44. Bukti PK. 26.3-44 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 023/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 06 Desember 2024;
45. Bukti PK. 26.3-45 : Fotokopi Surat Penerusan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) 15 Desember 2024 Nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024;
46. Bukti PK. 26.3-46 : Fotokopi Kajian Awal 020/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024;

47. Bukti PK. 26.3-47 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor 014/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024;
48. Bukti PK. 26.3-48 : Fotokopi Status Laporan Nomor 014/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 03 Desember 2024;
49. Bukti PK. 26.3-49 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 028/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
50. Bukti PK. 26.3-50 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Nomor 021/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
51. Bukti PK. 26.3-51 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 021/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 06 Desember 2024;
52. Bukti PK. 26.3-52 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 031/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
53. Bukti PK. 26.3-53 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 024/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024;
54. Bukti PK. 26.3-54 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 024/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 06 Desember 2024;
55. Bukti PK. 26.3-55 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 029/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
56. Bukti PK. 26.3-56 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor Register

- 022/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024;
57. Bukti PK. 26.3-57 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 022/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 06 Desember 2024;
58. Bukti PK. 26.3-58 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 036/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
59. Bukti PK. 26.3-59 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 029/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
60. Bukti PK. 26.3-60 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 029/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 06 Desember 2024;
61. Bukti PK. 26.3-61 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 023/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
62. Bukti PK. 26.3-62 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 017/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024;
63. Bukti PK. 26.3-63 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 017/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 03 Desember 2024;
64. Bukti PK. 26.3-64 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 024/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
65. Bukti PK. 26.3-65 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 018/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024;

66. Bukti PK. 26.3-66 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 018/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 03 Desember 2024;
67. Bukti PK. 26.3-67 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 008/LP/PB/KAB/28.09/9/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;
68. Bukti PK. 26.3-68 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 008/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 Pada Tanggal 09 Oktober 2024;
69. Bukti PK. 26.3-69 : Fotokopi Panwascam Kontunaga Memuat Formulir Model A2 Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 Pada Tanggal 07 Oktober 2024;
70. Bukti PK. 26.3-70 : Fotokopi Panwascam Kontunaga Melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024;
71. Bukti PK. 26.3-71 : Fotokopi Panwascam Kontunaga Mengumumkan Status Temuan Nomor 01/PM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 Pada Tanggal 10 Oktober 2024;
72. Bukti PK. 26.3-72 : Fotokopi Panwascam Kontunaga Meneruskan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Ke Pjs. Bupati Muna Nomor 01/TM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 Pada Tanggal 10 Oktober 2024
73. Bukti PK. 26.3-73 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 012/LP/Pb/Kab/28.09/10/2024 Tanggal 13 Oktober 2024;
74. Bukti PK. 26.3-74 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 012/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 Pada Tanggal 14 Oktober 2024;

75. Bukti PK. 26.3-75 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Muna Meneruskan Rekomendasi Nomor 116/HM.02/K.SG-13/10/2024 Pada Tanggal 15 November 2024 Kepada Pjs Bupati Muna;
76. Bukti PK. 26.3-76 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 Tanggal 12 Oktober 2024;
77. Bukti PK. 26.3-77 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024, tanggal 12 Oktober 2024;
78. Bukti PK. 26.3-78 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Muna Meneruskan Rekomendasi Nomor 119/HM.02/K.SG-13/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN);
79. Bukti PK. 26.3-79 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 006/LP/Pb/Kab/28.09/9/2024 Tanggal 03 Oktober 2024;
80. Bukti PK. 26.3-80 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 01/REG/LP/PB/KAB/28.09/10/2024, tanggal 2 Oktober 2024;
81. Bukti PK. 26.3-81 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 01/REG/LP/PB/KAB/28.09/10/2024 Pada Tanggal 03 Oktober 2024;
82. Bukti PK. 26.3-82 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 019/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
83. Bukti PK. 26.3-83 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 013/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 3 Desember 2024;

84. Bukti PK. 26.3-84 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 013/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 08 Desember 2024;
85. Bukti PK. 26.3-85 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG2 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 013/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 08 Desember 2024;
86. Bukti PK. 26.3-86 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 013/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal Pada Tanggal 08 Desember 2024;
87. Bukti PK. 26.3-87 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 026/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
88. Bukti PK. 26.3-88 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tongkuno Nomor 56/LHP/PM.01.02/K.SG-13.15/11/2024 Tanggal 24 Sampai 26 November 2024;
89. Bukti PK. 26.3-89 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tongkuno Selatan Nomor 8/LHP/PM.01.00/SG-13.16/11/2024 Tanggal 24 Sampai 26 November 2024;
90. Bukti PK. 26.3-90 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Parigi Nomor 53/LHP/PM/01.02/SG-13.12/11/2024 Tanggal 24 Sampai 26 November 2024;
91. Bukti PK. 26.3-91 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kontukowuna Nomor 048/LHP/PM.01.02/SG-13.09/XI/2024 Tanggal 24 Sampai 26 November 2024;
92. Bukti PK. 26.3-92 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wakorumba Selatan Nomor 101/LHP/PM.01.02/SG.13.17/11/2024 Tanggal 24 Sampai 26 November 2024;

93. Bukti PK. 26.3-93 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maligano Nomor 21/LHP/PM.01.02/SG-13.19/11/2024 Tanggal 24 Sampai 26 November 2024;
94. Bukti PK. 26.3-94 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Napabalano Nomor 35/LHP/PM.01.02/SG.13.04/11/2024 Tanggal 24 Sampai 26 November 2024;
95. Bukti PK. 26.3-95 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Katobu Nomor 110//LHP/PM.01.02/SG-13.01/11/2024 Tanggal 24 Sampai 26 November 2024;
96. Bukti PK. 26.3-96 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kontunaga Nomor 45/LHP/PM.01.02/K.SG-13.08/11/2024 Tanggal 24 Sampai 26 November 2024;
97. Bukti PK. 26.3-97 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 026/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
98. Bukti PK. 26.3-98 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan SG1 Laporan Penangan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 020/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024;
99. Bukti PK. 26.3-99 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 020/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 06 Desember 2024;
100. Bukti PK. 26.3-100 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024;
101. Bukti PK. 26.3-101 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024;

102. Bukti PK. 26.3-102 : Fotokopi Kajian Akhir Penanganan Pelanggaran Nomor Register 016/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, Tanggal 07 Desember 2024;
103. Bukti PK. 26.3-103 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 16/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 07 Desember 2024;
104. Bukti PK. 26.3-104 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Muna Merekomendasikan Surat Nomor 292/PP.01.02/K/SG-13/12/2024 Ke DKPP, tanggal 18 Desember 2024;
105. Bukti PK. 26.3-105 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024 Tanggal 30 November 2024;
106. Bukti PK. 26.3-106 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
107. Bukti PK. 26.3-107 : Fotokopi Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024;
108. Bukti PK. 26.3-108 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Dengan Nomor 12/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 07 Desember 2024;
109. Bukti PK. 26.3-109 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Muna Merekomendasikan Surat Nomor 293/PP.01.02/K.SG-13/12/2024 Pada Tanggal 18 Desember 2024 Ke DKPP;
110. Bukti PK. 26.3-110 : Fotokopi Status Laporan A17 Nomor 017/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024 Pada Tanggal 30 November 2024;
111. Bukti PK. 26.3-111 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 017/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024 Tanggal 02 Desember 2024;

112. Bukti PK. 26.3-112 : Fotokopi Kajian Akhir Laporan Nomor 011/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 07 Desember 2024;
113. Bukti PK. 26.3-113 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Dengan Nomor 11/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 Pada Tanggal 07 Desember 2024;
114. Bukti PK. 26.3-114 : Fotokopi Bawaslu Kabupaten Muna Merekomendasikan Surat Nomor 294/PP.01.02/K.SG-13/12/2024 Pada Tanggal 18 Desember 2024 Ke DKPP;
115. Bukti PK. 26.3-115 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 191/PM.00.02/K.SG.13/4/2024 Kepada Ketua KPU Kabupaten Muna Pada Tanggal 23 April 2024;
116. Bukti PK. 26.3-116 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Labone, Kecamatan Lasalepa Nomor 001/LHP/PM.01.02/SG-13.03.02.3/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
117. Bukti PK. 26.3-117 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 1, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano Nomor 01/LHP/PM.01.02/SG-13.04.04.1/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
118. Bukti PK. 26.3-118 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 3, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano Nomor 01/LHP/PM.01.02/SG-13.04.05.3/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
119. Bukti PK. 26.3-119 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 005, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano Nomor 01/LHP/PM.00.02/SG-13.04.04.5/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
120. Bukti PK. 26.3-120 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001, Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano Nomor 01/LHP/PM.00.02/SG-13.04.06.1/11/2024 Tanggal 27 November 2024;

121. Bukti PK. 26.3-121 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02, Desa Kondongia, Kecamatan Lohia Nomor 003/LHP/PM.01.02/SG-13.06.06.27/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
122. Bukti PK. 26.3-122 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03, Desa Kondongia, Kecamatan Lohia Nomor 003/LHP/PM.01.02/SG-13.06.06.27/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
123. Bukti PK. 26.3-123 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01, Desa Lohia, Kecamatan Lohia Nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-13.06.07.01/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
124. Bukti PK. 26.3-124 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02, Desa Lohia, Kecamatan Lohia Nomor 02/LHP/PM.01.02/SG-13.06.07.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
125. Bukti PK. 26.3-125 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2, Desa Lakarama, Kecamatan Towea Nomor 01/LHP/PM.01.02/SG-13.22.02.2/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
126. Bukti PK. 26.3-126 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 6, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu Nomor 002/LHP/PM.01.02/SG-13.02.04.6/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
127. Bukti PK. 26.3-127 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 2, Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno Nomor 5/LHP/PM.01.02/SG-13.15.15.2/11/2024 Tanggal 27 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya sebab penyelesaian masalah dari keempat hal yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan lembaga lain, yaitu:

1. dalil Pemohon terkait penggunaan program pemerintah dan mutasi ASN oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 selaku Calon Petahana merupakan ranah administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. dalil Pemohon terkait netralitas ASN sepenuhnya merupakan ranah tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
3. dalil Pemohon terkait *money politics* sepenuhnya menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. dalil Pemohon terkait pelanggaran penyelenggara pemilihan *in casu* Termohon yaitu mengenai pelanggaran atas kegiatan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara penyelesaiannya melalui Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan/ atau melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan demikian Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Muna 1362/2024) [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1= Bukti PT- 1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum

terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Muna 1362/2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1= Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Muna 1362/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.30 WITA [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1= Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.35 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 84/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan

dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena:

1. Dalil Pemohon tidak jelas dan terperinci mengenai perbedaan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Pemohon mendalilkan keterlibatan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara tanpa menjelaskan dampaknya terhadap hasil pemilihan;
3. Pemohon menyatakan adanya pemanfaatan program di luar jadwal kampanye dan masa tenang, namun tidak menjelaskan *tempus* dan *locus* serta pengaruhnya pada hasil pemilihan;
4. Pemohon menyatakan adanya pemilih ganda atas nama La Ode Ronal, namun tidak menguraikan dengan jelas lokasi di mana yang bersangkutan menggunakan hak pilih sebanyak dua kali;
5. Pemohon tidak menyertakan NIK untuk memvalidasi pernyataan adanya pemilih ganda dalam DPT atas nama Wa Ode Rahmat Gusni;
6. Pemohon menyatakan adanya pemilih dalam DPK atas nama La Ode Mila tanpa menyertakan NIK untuk verifikasi;
7. Pemohon mendalilkan KPPS menumpahkan isi kotak suara ke lantai namun tidak menguraikan dampaknya terhadap hasil Pemilihan;
8. Pemohon mendalilkan adanya pemilih di TPS 01 Desa Bone Kainsetala mencoblos 2 surat suara, faktualnya peristiwa yang didalilkan *a quo* tidak pernah terjadi.
9. Pemohon mendalilkan adanya kunjungan PPK ke rumah pemilih pada waktu yang tidak diperbolehkan, padahal kewenangan kunjungan ke rumah pemilih terletak pada KPPS, bukan PPK.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena:

1. Pemohon tidak menyampaikan informasi yang benar mengenai status La Ode Asrafil, S.H., M.H. yang telah mengundurkan diri dari ASN sesuai dengan ketentuan;

2. Dalil Pemohon tentang pelanggaran asas pemilihan bersifat asumptif dan tidak didukung bukti yang jelas, serta tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil Pemilihan;
3. Pemohon tidak menguraikan secara jelas penyebab selisih suara dengan Pihak Terkait serta tidak menyertakan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024;
4. Perkara yang telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Muna tidak dapat diajukan kembali, mengingat asas kepastian hukum (*litis finiri oportet*);
5. Tuduhan politik uang yang memengaruhi hasil suara tidak berdasar, mengingat Pemohon justru memperoleh suara lebih banyak di beberapa kecamatan yang didalilkan;
6. Terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan menyatakan terjadinya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan karena adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

yang berpengaruh pada hasil Pemilihan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penyalahgunaan jabatan calon petahana dan program pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan dengan melakukan mutasi pejabat tanpa izin Menteri terkait tiga bulan sebelum penetapan calon; pemanfaatan program dan fasilitas pemerintah di masa kampanye; pemasangan baliho Plt. Bupati Muna untuk pencitraan petahana oleh ASN dan Kepala Desa; serta penyalahgunaan jabatan dengan mengarahkan kebijakan dan anggaran daerah untuk mendukung kampanye petahana di luar jadwal kampanye dan masa tenang;
2. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengerahan ASN, tenaga honorer, dan kepala desa secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan dengan cara melakukan urunan/patungan guna mendukung pembiayaan politik calon petahana; praktik *money politics*; dan pengarahan Kepala Sekolah Dasar kepada guru untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan Termohon dalam praktik kecurangan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan dengan cara pembiaran penggunaan logo Pemerintah Daerah pada buku visi misi calon petahana; mencetak baliho yang dipasang oleh anggota PPS dan KPPS berisi ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1; membiarkan baliho petahana tidak diturunkan hingga pemilihan selesai; merekrut anggota PPS dan KPPS dari kalangan ASN dan honorer dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; membiarkan terjadinya kecurangan di beberapa TPS, seperti pembatasan hak pilih, adanya pemilih dari luar daerah, pencoblosan oleh KPPS, dan adanya pemilih ganda.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-153.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-124, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Muna dan alat bukti yang diajukan Bukti PK. 26.3-1 sampai dengan Bukti

PK. 26.3-127, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan jabatan calon petahana dan program pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan tidak terdapat pelanggaran serta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna terkait dalil Pemohon *a quo*. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 bertanggal 1 Desember 2024 dengan Terlapor atas nama Drs. Bachrun, M. Si (Calon Bupati Nomor Urut 1) terkait dugaan melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.26.3-9 sampai dengan Bukti PK.26.3-14]. Selain hal tersebut tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat adanya mutasi pejabat yang dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 [vide Bukti T-6 sampai dengan T-13 dan Bukti PT-6]. Sementara itu terhadap berbagai dugaan pelanggaran lainnya yang didalilkan Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga memengaruhi pilihan pemilih dan/atau perolehan suara pasangan calon. Terlebih, tidak ada satu pun rekomendasi Bawaslu terkait dalil Pemohon *a quo*.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengerahan ASN, tenaga honorer, dan kepala desa secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan dengan berbagai cara, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menerangkan bahwa tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna kepada Termohon terkait dalil Pemohon *a quo*. Kemudian Bawaslu Kabupaten Muna

menyatakan telah menerima 19 laporan terkait dalil Pemohon *a quo*, yang 10 di antaranya terdapat penerusan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dan 2 di antaranya terdapat penerusan rekomendasi kepada Pjs. Bupati Muna terkait adanya dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa [Vide Bukti PK.26.3-15 sampai dengan Bukti PK.26.3-99].

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat penyelesaian terhadap persoalan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan. Adapun dugaan pelanggaran lainnya terkait dalil Pemohon *a quo* yang tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau pada hasil perolehan suara pasangan calon.

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat keterlibatan Termohon dalam praktik kecurangan dalam mendukung pasangan calon nomor urut 1. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menerangkan bahwa tidak terdapat rekomendasi Bawaslu terkait dalil *a quo* kecuali berkenaan dengan adanya logo Pemerintah Kabupaten Muna yang tercetak pada buku visi misi pasangan calon nomor urut 1. Bawaslu telah merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) terkait adanya dugaan pelanggaran yang selanjutnya DKPP telah menyatakan gugur pada verifikasi administrasi DKPP. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan bahwa terkait dalil Pemohon *a quo* telah menerima 3 laporan dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna sebagai terlapor yaitu Laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 berkaitan dengan pencetakan buku visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati muna dimana terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1 yang lebih besar dari pasangan calon lainnya, Laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024 tanggal 30 November 2024 berkaitan dengan adanya baliho Terlapor yang di dalamnya diduga terdapat bentuk seruan dan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1; dan Laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024 tanggal 30 November 2024 berkaitan dengan dugaan kesengajaan Termohon untuk tidak menurunkan baliho-baliho pasangan nomor urut

1. Terhadap ketiga laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan rekomendasi dan meneruskan ke DKPP. Lebih lanjut diperoleh fakta hukum oleh Mahkamah sepanjang terkait keterlibatan Termohon dalam praktik kecurangan dalam mendukung pasangan calon nomor urut 1 dengan cara mencetak baliho yang dipasang oleh anggota PPS dan KPPS berisi dugaan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dan pembiaran baliho pasangan calon petahana terpasang hingga pemilihan, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Muna dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna sebagai terlapor. Berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran berkesimpulan laporan-laporan tersebut mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan kode etik penyelenggara Pemilu yang diteruskan ke DKPP [vide Bukti PK.26.3-105 s.d. Bukti PK.26.3-114]. Kemudian, terdapat pula rekomendasi Bawaslu yang juga diteruskan ke DKPP dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna sebagai terlapor terkait laporan pembiaran pencetakan gambar pasangan calon nomor urut 1 yang lebih besar dari gambar pasangan calon lainnya pada buku visi misi pasangan calon, dasar laporan tersebut bukan terkait dengan pencantuman logo Pemerintah Kabupaten Muna di gambar pasangan calon nomor urut 1 pada buku visi misi pasangan calon seperti yang didalilkan Pemohon [vide Bukti PK.26.3-100 s.d. Bukti PK.26.3-104].

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah berpendapat persoalan dimaksud telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Adapun terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran lain yang didalilkan Pemohon, hal tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa-peristiwa tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau pada hasil perolehan suara pasangan calon

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan La Ode Muh. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan La Ode Muh. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P2 = Bukti T-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

"(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di

Kabupaten Muna adalah 231.980 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 118.086$ suara (total suara sah) = 2.362 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 47.655 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 53.908 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 53.908 suara - 47.655 suara = 6.253 suara (5,29%) atau lebih dari 2.362 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.41 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Haifa Arief Lubis



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id